

LAPORAN

KINERJA



**PEMERINTAH
KOTA
SURABAYA**

Tahun 2014



PEMERINTAH KOTA SURABAYA



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014



Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2015

KATA PENGANTAR



Era saat ini merupakan era keterbukaan dimana masyarakat menuntut segala proses pemerintahan dapat diketahui oleh masyarakat. Selain hal tersebut, tuntutan atas pelayanan kepada masyarakat juga semakin tinggi. Pemerintah tidak bisa lagi hanya bertugas melayani masyarakat sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap tahun tetapi juga dituntut untuk mampu melakukan inovasi terhadap percepatan pelayanan publik. Oleh karena itu kami di Pemerintah Kota Surabaya, terus berupaya memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan.

Banyak hal telah kami lakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan dalam hal pelayanan publik pada khususnya. Saya menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bekerja secara bersama-sama untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat kota Surabaya serta atas beberapa capaian yang telah diraih. Kerja keras ini harus kita niatkan secara ikhlas untuk kepentingan masyarakat.

Laporan Kinerja (LKj) Kota Surabaya ini disusun dalam rangka memberikan informasi atas beberapa capaian kinerja Pemerintah Kota Surabaya selama tahun 2014. Sebagian besar target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada awal tahun 2014 telah berhasil dicapai dan diraih namun demikian masih ada beberapa target yang belum bisa dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi evaluasi bagi kami untuk dapat bekerja lebih keras lagi di tahun 2015.

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI



DAFTAR ISI

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014



Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GRAFIK	V
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA SURABAYA ...	1
B. PERMASALAHAN UMUM PEMBANGUNAN YANG DIHADAPI PEMERINTAH KOTA SURABAYA.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
B. REALISASI ANGGARAN	156
BAB IV PENUTUP	159
A. SIMPULAN	159
B. SARAN	160
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014



Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2015

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	7
TABEL III.1	SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP WARGA KOTA	13
TABEL III.2	SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	18
TABEL III.3	SASARAN MENINGKATNYA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL, PENCEGAHAN, DAN REHABILITASI SOSIAL	22
TABEL III.4	SASARAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN.....	25
TABEL III.5	SASARAN MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	36
TABEL III.6	SASARAN TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG DITANDAI DENGAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK	51
TABEL III.7	SASARAN PENINGKATAN DAYA SAING KOTA UNTUK MENDUKUNG IKLIM INVESTASI	63
TABEL III.8	SASARAN MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH..	68
TABEL III.9	SASARAN PENINGKATAN KEKAYAAN DAERAH	73
TABEL III.10	SASARAN MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	75
TABEL III.11	SASARAN MENINGKATNYA DAYA SAING EKONOMI LOKAL BERBASIS KOMUNITAS	79
TABEL III.12	SASARAN TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG TERPADU.....	94
TABEL III.13	SASARAN PENINGKATAN TARAF HIDUP DAN KESEJAHTERAAN	99
TABEL III.14	SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS DAN KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA KOTA.....	105
TABEL III.15	SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN.....	133
TABEL III.16	SASARAN TERWUJUDNYA RENCANA DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG TERINTEGRASI DENGAN RENCANA TATA RUANG KOTA.....	150

TABEL III.17	SASARAN TERWUJUDNYA REVITALISASI DAN KONSERVASI CAGAR BUDAYA	153
TABEL III.18	PERSENTASE REALISASI PER SASARAN	157



DAFTAR GRAFIK

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK III.1	MENINGKATNYA KUALITAS PEMUDA/KELOMPOK PEMUDA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MANDIRI.....	14
GRAFIK III.2	MENINGKATNYA ATLET/ORGANISASI OLAHRAGA YANG BERPRESTASI	16
GRAFIK III.3	PERSENTASE KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ANAK YANG DILAPORKAN DAN DITANGANI	19
GRAFIK III.4	JUMLAH LEMBAGA YANG PEDULI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	20
GRAFIK III.5	PERSENTASE PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	23
GRAFIK III.6	PERSENTASE PSKS YANG BERPARTISIPASI DALAM PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	24
GRAFIK III.7	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD/MI	27
GRAFIK III.8	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP/MTs	29
GRAFIK III.9	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMA/MA/SMK	30
GRAFIK III.10	ANGKA KELULUSAN (AL) SD/MI	31
GRAFIK III.11	ANGKA KELULUSAN (AL) SMP/MTs	32
GRAFIK III.12	ANGKA KELULUSAN (AL) SMA/MA.....	33
GRAFIK III.13	ANGKA KELULUSAN (AL) SMK	34
GRAFIK III.14	ANGKA MELEK HURUF (AMH).....	35
GRAFIK III.15	CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN (TOLINAKES) YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEBIDANAN.....	38
GRAFIK III.16	BALITA GIZI BURUK MENDAPAT PERAWATAN	39
GRAFIK III.17	PENINGKATAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT RSUD DR. MOHAMAD SOEWANDHI.....	41
GRAFIK III.18	PENINGKATAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT BHAKTI DHARMA HUSADA	42
GRAFIK III.19	JUMLAH PUSKESMAS INDUK YANG MENINGKAT MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP	44

GRAFIK III.20	JUMLAH PUSKESMAS PEMBANTU YANG MENINGKAT MENJADI PUSKESMAS INDUK.....	45
GRAFIK III.21	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MASYARAKAT MISKIN	46
GRAFIK III.22	CAKUPAN KELURAHAN MENGALAMI KLB YANG DITANGANI < 24 JAM	49
GRAFIK III.23	PERSENTASE PESERTA KB AKTIF	50
GRAFIK III.24	JUMLAH KASUS PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR.....	53
GRAFIK III.25	PERSENTASE RANCANGAN PRODUK HUKUM YANG DAPAT DISELESAIKAN.....	55
GRAFIK III.26	PERSENTASE JUMLAH KELUHAN YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI	56
GRAFIK III.27	PERSENTASE PEMROSESAN PRODUK INTI (CORE BUSINES) YANG MEMILIKI PROSEDUR TETAP	57
GRAFIK III.28	PERSENTASE PENDUDUK YANG BER-KTP	58
GRAFIK III.29	CAKUPAN PENERBITAN AKTE KELAHIRAN	60
GRAFIK III.30	TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN)	61
GRAFIK III.31	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PELAYANAN PERIJINAN PENUNJANG INVESTASI.....	64
GRAFIK III.32	PERSENTASE ANTARA JUMLAH LAYANAN PUBLIK BERBASIS TIK DENGAN JUMLAH TOTAL LAYANAN PUBLIK (108 PELAYANAN PUBLIK).....	66
GRAFIK III.33	PERSENTASE ANTARA JUMLAH PENGGUNA LAYANAN PUBLIK BERBASIS WEB DENGAN JUMLAH TOTAL PENGGUNA LAYANAN PUBLIK BERBASIS TIK	67
GRAFIK III.34	PERSENTASE PENINGKATAN PAD	69
GRAFIK III.35	PERSENTASE PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH LAINNYA .	72
GRAFIK III.36	JUMLAH ASET PEMKOT YANG TERSERTIFIKAT	74
GRAFIK III.37	PERSENTASE PENEMPATAN PENCAHARI KERJA PADA PASAR KERJA	76
GRAFIK III.38	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA PEKERJA-PENGUSAHA	77

GRAFIK III.39	JUMLAH KELOMPOK SKALA MIKRO KECIL YANG MEMILIKI DAYA SAING	81
GRAFIK III.40	PENINGKATAN JUMLAH KOPERASI BERKUALITAS	85
GRAFIK III.41	PENINGKATAN JUMLAH KELEMBAGAAN BARU KOPERASI YANG TERBENTUK	86
GRAFIK III.42	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA.....	88
GRAFIK III.43	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA	90
GRAFIK III.44	JUMLAH SENTRA PKL YANG MEMILIKI DAYA SAING USAHA	92
GRAFIK III.45	PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN.....	96
GRAFIK III.46	JUMLAH KELUARGA MISKIN YANG MELAKUKAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF	100
GRAFIK III.47	POLA PANGAN HARAPAN	102
GRAFIK III.48	TERBENTUKNYA SENTRA PRODUK PERTANIAN.....	104
GRAFIK III.49	LAMA JAM SIBUK	109
GRAFIK III.50	LUAS WILAYAH GENANGAN	111
GRAFIK III.51	RATA-RATA LAMA TERJADINYA GENANGAN.....	113
GRAFIK III.52	RATA-RATA TINGGI GENANGAN YANG TERJADI	114
GRAFIK III.53	PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN AIR BERSIH	116
GRAFIK III.54	JUMLAH MBR YANG TELAH MENDAPATKAN MANFAAT RUMAH LAYAK HUNI (KK)	117
GRAFIK III.55	LUAS KAWASAN KUMUH YANG MENDAPAT PENINGKATAN LAYANAN PRASARANA PERMUKIMAN (Ha)	119
GRAFIK III.56	RASIO ANGKA KETERSEDIAAN MAKAM SELAMA LIMA TAHUN KE DEPAN	120
GRAFIK III.57	PENCAPAIAN WAKTU TANGGAP KURANG <15 MENIT.....	121
GRAFIK III.58	CAKUPAN PELAYANAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN ..	123
GRAFIK III.59	RASIO PANJANG JALAN YANG SUDAH MENDAPATKAN PENERANGAN TERHADAP SELURUH PANJANG JALAN	124
GRAFIK III.60	KECEPATAN RATA-RATA KENDARAAN (KM/JAM) PADA JALAN ARTERI PRIMER.....	125

GRAFIK III.61	KECEPATAN RATA-RATA KENDARAAN (KM/JAM) PADA JALAN ARTERI SEKUNDER.....	127
GRAFIK III.62	HEADWAY ANGKUTAN UMUM (MENIT) UNTUK MIKROLET	129
GRAFIK III.63	HEADWAY ANGKUTAN UMUM (MENIT) UNTUK BISKOTA.....	130
GRAFIK III.64	PERSENTASE LUAS RTH YANG BERFUNGSI OPTIMAL TERHADAP KESELURUHAN LUAS RTH YANG ADA	132
GRAFIK III.65	CAKUPAN LAYANAN KEBERSIHAN.....	137
GRAFIK III.66	KUALITAS AIR LIMBAH INDUSTRI BOD	138
GRAFIK III.67	KUALITAS AIR LIMBAH INDUSTRI COD.....	141
GRAFIK III.68	KUALITAS AIR LIMBAH INDUSTRI TSS.....	141
GRAFIK III.69	KUALITAS AIR LIMBAH DOMESTIK BOD	142
GRAFIK III.70	KUALITAS AIR LIMBAH DOMESTIK TSS	143
GRAFIK III.71	KUALITAS AIR LIMBAH RS BOD.....	144
GRAFIK III.72	KUALITAS AIR LIMBAH RS COD	144
GRAFIK III.73	KUALITAS AIR LIMBAH RS TSS	145
GRAFIK III.74	KUALITAS AIR LIMBAH HOTEL BOD.....	146
GRAFIK III.75	KUALITAS AIR LIMBAH HOTEL COD	147
GRAFIK III.76	KUALITAS AIR LIMBAH HOTEL TSS	148
GRAFIK III.77	KUALITAS UDARA EMISI DI KAWASAN INDUSTRI SO ₂	148
GRAFIK III.78	KUALITAS UDARA EMISI DI KAWASAN INDUSTRI NO ₂	149
GRAFIK III.79	PROPORSI LUAS AREA YANG TELAH TERLAYANI OLEH RENCANA TATA RUANG	151
GRAFIK III.80	JUMLAH KELOMPOK SENI YANG LAYAK DITAMPILKAN DALAM EVEN/FESTIVAL SENI BUDAYA.....	154
GRAFIK III.81	TERBENTUKNYA DESTINASI WISATA.....	155



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014



Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Arah pembangunan Kota Surabaya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2010-2015. Oleh karena itu pelaksanaan RPJMD Kota Surabaya harus terus dimonitor dan dievaluasi agar pembangunan Kota Surabaya tetap berjalan sesuai dengan perencanaan semula.

Pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dengan indikator kinerjanya serta target yang telah ditentukan. Dalam RPJMD Kota Surabaya terdapat 17 (tujuh belas) sasaran dan sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 188.45/236/436.1.2/2014 terdapat 81 (delapan puluh satu) indikator utama yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Surabaya.

Dari 17 sasaran dan 81 indikator utama tersebut pada tahun 2014 secara keseluruhan telah mencapai target, hanya terdapat 6 sasaran dengan 9 indikator utama yang belum berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yaitu:

1. Sasaran *meningkatnya derajat kesehatan masyarakat* dengan indikator kinerja utama *peningkatan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada*
2. Sasaran *peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi* dengan indikator utama *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi*
3. Sasaran *mewujudkan kemadirian keuangan daerah* dengan indikator utama *persentase peningkatan PAD*
4. Sasaran *Peningkatan Kekayaan Daerah* dengan indikator utama *Jumlah Aset Pemkot yang Tersertifikat*
5. Sasaran *Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal Berbasis Komunitas* dengan indikator utama *Jumlah Sentra PKL yang Memiliki Daya Saing Usaha*

6. Sasaran *Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Kota* dengan indikator utama *Jumlah MBR yang Telah Mendapatkan Manfaat Rumah Layak Huni (KK), Headway Angkutan Umum (menit) untuk Mikrolet, Headway Angkutan Umum (menit) untuk Biskota, dan Persentase Luas RTH yang Berfungsi Optimal Terhadap Keseluruhan Luas RTH yang Ada.*

Capaian kinerja tahun 2014, sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Warga Kota	1	Meningkatnya Kualitas Pemuda/Kelompok Pemuda Dalam Pengembangan Usaha Mandiri	75	75	100.00%
		2	Meningkatnya Atlit/Organisasi Olahraga yang Berprestasi	1578	1761	111.60%
2	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Anak yang Dilaporkan dan Ditangani	100.00%	100.00%	100.00%
		2	Jumlah Lembaga yang Peduli Terhadap Perempuan dan Anak	85	85	100.00%
3	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial	1	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54.00%	149.98%	277.74%
		2	Persentase PSKS yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	60.00%	91.87%	153.12%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan	1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%
		2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.30%	99.99%	100.70%
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95.00%	97.02%	102.12%
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95.00%	95.87%	100.91%
		5	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA	99.15%	99.93%	100.79%
		6	Angka Kelulusan (AL) SMK	99.11%	99.95%	100.85%
		7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92.50%	93.47%	101.05%
		8	Angka Melek Huruf (AMH)	100.00%	100.00%	100.00%
5	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	96.00%	96.45%	100.47%
		2	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100.00%	100.00%	100.00%
		3	Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi	Kelas B	Kelas B	100.00%
		4	Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	Kelas B	Kelas C	75.93%
		5	Jumlah Puskesmas Induk yang Meningkatkan Menjadi Puskesmas Rawat Inap	19	20	105.26%
		6	Jumlah Puskesmas Pembantu yang Meningkatkan Menjadi Puskesmas Induk	8	9	112.50%
		7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100.00%	100.00%	100.00%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		8	Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani < 24 jam	100.00%	100.00%	100.00%
		9	Persentase Peserta KB Aktif	80.26%	81.42%	101.45%
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Ditandai Dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik	1	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur	203	27	186.69%
		2	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Dapat Diselesaikan	100.00%	100.00%	100.00%
		3	Persentase Pemrosesan Produk Inti (Core Busines) yang Memiliki Prosedur Tetap	44.00%	55.00%	125.00%
		4	Persentase Jumlah Keluhan yang Selesai Ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%
		5	Persentase Penduduk yang Ber-KTP	93.00%	93.79%	100.85%
		6	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	90.00%	99.92%	111.02%
		7	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100.00%	100.00%	100.00%
7	Peningkatan Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi	1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Penunjang Investasi	90.00%	75%	83.69%
		2	Persentase Antara Jumlah Layanan Publik Berbasis TIK Dengan Jumlah Total Layanan Publik (108 Pelayanan Publik)	18.52%	22.22%	119.99%
		3	Persentase Antara Jumlah Pengguna Layanan Publik	7.00%	13.83%	197.57%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			Berbasis Web Dengan Jumlah Total Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK			
8	Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah	1	Persentase Peningkatan PAD	22.22%	18.42%	82.90%
		2	Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya	28.52%	29.75%	104.32%
9	Peningkatan Kekayaan Daerah	1	Jumlah Aset Pemkot yang Tersertifikat	647	580	89.64%
10	Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	1	Persentase Penempatan Pencari Kerja Pada Pasar Kerja	5.00%	5.01%	100.20%
		2	Persentase Penyelesaian Sengketa Pekerja-Pengusaha	75.00%	80.87%	107.83%
11	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal Berbasis Komunitas	1	Jumlah Kelompok Skala Mikro Kecil yang Memiliki Daya Saing	59	60	101.69%
		2	Peningkatan Jumlah Koperasi Berkualitas	172	306	177.91%
		3	Peningkatan Jumlah Kelembagaan Baru Koperasi yang Terbentuk	30	54	180.00%
		4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	190872	742084	388.79%
		5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	8296157	15929745	192.01%
		6	Jumlah Sentra PKL yang Memiliki Daya Saing Usaha	36	26	72.22%
12	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Terpadu	1	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100.00%	100.00%	100.00%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
13	Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan	1	Jumlah Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	1487	1655	111.30%
		2	Pola Pangan Harapan	92.92	92.93	100.01%
		3	Terbentuknya Sentra Produk Pertanian	30	30	100.00%
14	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Kota	1	Lama Jam Sibuk	6 jam 37 menit	6 jam 30 menit	101.76%
		2	Luas Wilayah Genangan	2111	1303.13	138.27%
		3	Rata-rata Lama Terjadinya Genangan	60	54.75	108.75%
		4	Rata-rata Tinggi Genangan yang Terjadi	20	16.82	115.90%
		5	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	88.06%	92.64%	105.20%
		6	Jumlah MBR yang Telah Mendapatkan Manfaat Rumah Layak Huni (KK)	3361	3242	96.46%
		7	Luas Kawasan Kumuh yang Mendapat Peningkatan Layanan Prasarana Permukiman (Ha)	508	510.91	100.57%
		8	Rasio Angka Ketersediaan Makam Selama Lima Tahun ke Depan	0.47	0.21	155.32%
		9	Pencapaian Waktu Tanggap Kurang <15 Menit	82.00%	89.93%	109.67%
		10	Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	91.00%	92.56%	101.71%
		11	Rasio Panjang Jalan yang Sudah Mendapatkan Penerangan	83.36%	94.54%	113.41%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			Terhadap Seluruh Panjang Jalan			
		12	Kecepatan Rata-rata Kendaraan (km/jam) Pada Jalan Arteri Primer	23.73	31.23	131.61%
		13	Kecepatan Rata-rata Kendaraan (km/jam) Pada Jalan Arteri Sekunder	21.47	28.75	133.91%
		14	Headway Angkutan Umum (menit) untuk Mikrolet	14.72	25.91	23.98%
		15	Headway Angkutan Umum (menit) untuk Biskota	20	43.12	-15.60%
		16	Persentase Luas RTH yang Berfungsi Optimal Terhadap Keseluruhan Luas RTH yang Ada	47.37%	32.76%	69.17%
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	1	Cakupan Layanan Kebersihan	173/175	184/175	106.06%
		2	Kualitas Air Limbah Industri BOD	72.00%	73.26%	101.75%
		3	Kualitas Air Limbah Industri COD	66.00%	67.67%	102.53%
		4	Kualitas Air Limbah Industri TSS	66.00%	67.40%	102.12%
		5	Kualitas Air Limbah Domestik BOD	46.00%	49.50%	107.61%
		6	Kualitas Air Limbah Domestik TSS	48.00%	48.51%	101.06%
		7	Kualitas Air Limbah RS BOD	63.00%	64.58%	102.51%
		8	Kualitas Air Limbah RS COD	62.00%	63.87%	103.02%
		9	Kualitas Air Limbah RS TSS	60.00%	61.18%	101.97%
		10	Kualitas Air Limbah Hotel BOD	48.00%	49.83%	103.81%
		11	Kualitas Air Limbah Hotel COD	36.00%	36.57%	101.58%
		12	Kualitas Air Limbah Hotel TSS	42.00%	43.72%	104.10%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		13	Kualitas Udara Emisi di Kawasan Industri SO ₂	80.00%	81.37%	101.71%
		14	Kualitas Udara Emisi di Kawasan Industri NO ₂	70.00%	70.85%	101.21%
16	Terwujudnya Rencana dan Kebijakan Pembangunan yang Terintegrasi Dengan Rencana Tata Ruang Kota	1	Proporsi Luas Area yang Telah Terlayani Oleh Rencana Tata Ruang	81.12%	89%	109.62%
17	Terwujudnya Revitalisasi dan Konservasi Cagar Budaya	1	Jumlah Kelompok Seni yang Layak Ditampilkan Dalam Even/Festival Seni Budaya	200	211	105.50%
		2	Terbentuknya Destinasi Wisata	19	19	100.00%

BAB I



Pendahuluan

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pemerintah Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan;

penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Penyelenggara Pemerintah Kota Surabaya dipimpin oleh seorang Walikota yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas : asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; dan asas efektivitas. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaan otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih pimpinan daerah; mengelola aparatur daerah; mengelola kekayaan daerah; memungut pajak daerah dan retribusi daerah; mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan.

Sedangkan dalam pelaksanaan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mewujudkan keadilan dan pemerataan; meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; mengembangkan sistem jaminan sosial; menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; mengembangkan sumber daya produktif di daerah; melestarikan lingkungan hidup; mengelola administrasi kependudukan; melestarikan nilai sosial budaya; membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang Walikota sebagai Kepala Daerah, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Walikota sebagai Kepala Daerah, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; melaksanakan kehidupan demokrasi; mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; memajukan dan mengembangkan daya saing Daerah; melaksanakan prinsip taat pemerintahan yang bersih dan baik; melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan

daerah; menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah dan semua perangkat Daerah; menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

B. PERMASALAHAN UMUM PEMBANGUNAN YANG DIHADAPI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya serta dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target yang direncanakan. Beberapa permasalahan pembangunan di Kota Surabaya tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kawasan permukiman kumuh dan ilegal;
2. Belum optimalnya upaya penertiban bangunan liar;
3. Belum sempurnanya koneksi antar saluran serta tingginya sedimentasi saluran;
4. Tingginya tingkat pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan pertumbuhan jalan;
5. Belum sempurnanya aksesibilitas antar kawasan, kapasitas jalan dan jembatan;
6. Belum optimalnya daya tampung sekolah khususnya sekolah negeri untuk menampung lulusan jenjang sebelumnya;
7. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
8. Masih rendahnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja;
9. Belum optimalnya pemenuhan sumber daya kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh penduduk Kota Surabaya;
10. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sehingga masih perlu ditingkatkannya pengawasan kecukupan gizi dan keamanan bahan pangan di masyarakat;

11. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan keluarga miskin;
12. Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin;
13. Masih rendahnya aksesibilitas keluarga miskin dalam usaha skala mikro;
14. Keterbatasan sistem jaringan kerjasama usaha dan pemasaran pelaku usaha skala mikro dan kecil;
15. Belum optimalnya pengelolaan lembaga dan usaha koperasi;
16. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat koperasi;
17. Rendahnya kualitas calon tenaga kerja yang disebabkan belum selarasnya dunia pendidikan dengan dunia usaha, serta rendahnya minat pencari kerja untuk menciptakan lapangan kerja baru;
18. Masih adanya lahan aset pemerintah kota yang bukti kepemilikannya baik secara administrasi maupun fisik kurang/tidak lengkap sehingga belum dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk diproses sertifikatnya/legalitasnya;
19. Kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat terhadap peraturan daerah ketentraman dan ketertiban;
20. Belum optimalnya prasarana olahraga di masyarakat dan sekolah yang berstandar nasional dan internasional;
21. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya dalam mendukung pengembangan potensi pariwisata;
22. Pencemaran air dan tanah yang disebabkan oleh limbah industri dan kegiatan/usaha serta limbah rumah tangga;
23. Pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari suatu kegiatan/usaha;
24. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan sistem sanitasi terpadu dan monitoring penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di Kota Surabaya;
25. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan;
26. Belum optimalnya partisipasi perempuan dan anak dalam mendukung pengarusutamaan gender.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi perhatian dan prioritas bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat lebih memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Kota Surabaya karena tujuan utama pemerintah kota adalah menjadi pelayan bagi warga kota Surabaya.

BAB II



Perencanaan & Penetapan Kinerja

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan merupakan standard dalam mengukur kinerja Pemerintah Kota. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya tahun 2010-2015 maka telah disusun Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani oleh Walikota Surabaya pada awal tahun 2014.

Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani selanjutnya terdapat penyesuaian yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/236/436.1.2/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas hidup warga kota	Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri	75
		Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang Berprestasi	1578
2.	Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani	100.00%
		Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85
3.	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial. Pencegahan dan rehabilitasi sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54.00%
		Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	60.00%
4.	Peningkatan kualitas pendidikan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100.00%
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.30%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95.00%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95.00%
		Angka Kelulusan (AL) SMA/MA	99.15%
		Angka Kelulusan (AL) SMK	99.11%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92.50%
		Angka Melek Huruf (AMH)	100.00%
5.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan	96.00%
		Balita gizi buruk mendapat perawatan	100.00%
		Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi	Kelas B
		Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	Kelas B
		Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap	19
		Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk	8
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100.00%
		Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100.00%
		Persentase pe serta KB aktif	80.26%
6.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Yang Ditandai Dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur	203
		Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan	100.00%
		Persentase pemrosesan produk inti (<i>core Business</i>) yang memiliki prosedur tetap	44.00%
		Persentase jumlah keluhan yang selesai ditindak lanjuti	100.00%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		% penduduk yang berKTP	93.00%
		Cakupan penerbitan akte kelahiran	90.00%
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	100.00%
7.	Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi	90.00%
		Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)	18.52%
		Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK	7.00%
8.	Mewujudkan kemandirian keuangan daerah	% Peningkatan PAD	22.22%
		% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	28.52%
9.	Peningkatan kekayaan daerah	Jumlah aset pemkot yang tersertifikat	647
10.	Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja	5.00%
		Persentase penyelesaian sengketa pekerja pengusaha	75.00%
11.	Meningkatkan daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas	Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing	59
		Peningkatan jumlah koperasi berkualitas	172
		Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk	30
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	190872
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	8296157

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha	36
12.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100.00%
13.	Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan	Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487
		Pola Pangan harapan	92.92
		Terbentuknya sentra produk pertanian	30
14.	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota	Lama jam sibuk	6 jam 37 menit
		Luas wilayah genangan	2111
		rata-rata Lama terjadinya genangan	60
		rata-rata Tinggi genangan yang terjadi	20
		% Cakupan Layanan Air Bersih	88.06%
		Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)	3361
		Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)	508
		Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan	0.47
		Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit	82.00%
		Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	91.00%
Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan	83.36%		

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer	23.73
		Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder	21.47
		Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet	14.72
		Headway angkutan umum (menit) untuk Biskota	20
		Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	47.37%
15.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175
		Kualitas air limbah industri BOD	72.00%
		Kualitas air limbah industri COD	66.00%
		Kualitas air limbah industri TSS	66.00%
		Kualitas air limbah domestik BOD	46.00%
		Kualitas air limbah domestik TSS	48.00%
		Kualitas air limbah RS BOD	63.00%
		Kualitas air limbah RS COD	62.00%
		Kualitas air limbah RS TSS	60.00%
		Kualitas air limbah hotel BOD	48.00%
		Kualitas air limbah hotel COD	36.00%
		Kualitas air limbah hotel TSS	42.00%
		Kualitas udara emisi di kawasan industri SO ₂	80.00%
		Kualitas udara emisi di kawasan industri NO ₂	70.00%
16.	Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota	Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang	81.12%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
17.	Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya	Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya	200
		Terbentuknya destinasi wisata	19

BAB III



Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP WARGA KOTA

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 2 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama sasaran strategis meningkatnya kualitas hidup warga kota mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Hidup Warga Kota

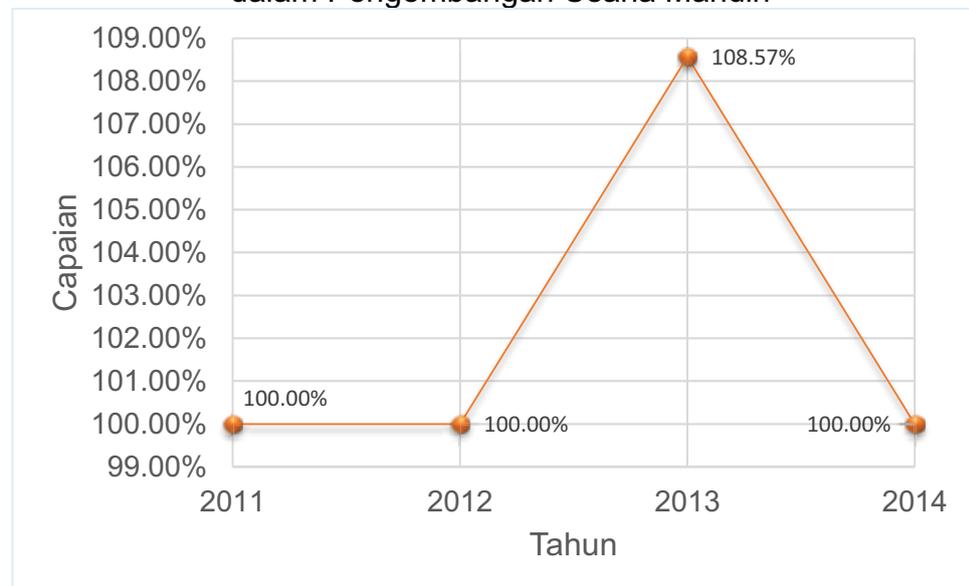
Meningkatnya Kualitas Pemuda/Kelompok Pemuda Dalam Pengembangan Usaha Mandiri			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	60	60	100.00%
2012	65	65	100.00%
2013	70	76	108.57%
2014	75	75	100.00%
Meningkatnya Atlet/Organisasi Olahraga yang Berprestasi			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	1186	1186	100.00%
2012	1305	1359	104.14%
2013	1435	1435	100.00%
2014	1578	1761	111.60%

Rincian capaian indikator sasaran strategis meningkatnya kualitas hidup warga kota tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Pemuda/Kelompok Pemuda dalam Pengembangan Usaha Mandiri

Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil membina 75 pemuda yang telah mampu mengembangkan usaha mandiri. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 75 pemuda, maka capaian kinerjanya adalah 100,00%. Perbandingan pencapaian indikator meningkatnya pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.1.

Grafik III.1 Meningkatnya Kualitas Pemuda/Kelompok Pemuda dalam Pengembangan Usaha Mandiri



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan, yaitu:

1. Koordinasi kepemudaan masih belum optimal;
2. Kurangnya modal usaha untuk kewirausahaan mandiri tetapi terdapat dukungan akomodasi dari instansi terkait dan organisasi masyarakat.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator meningkatnya pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti ajang peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
2. Pembinaan Kemitraan antar Pemuda;
3. Pembinaan Mental, Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda;
4. Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kewilayahan (Karang Taruna);
5. Peningkatan Pemahaman Pemuda tentang Bahaya HIV-AIDS, narkoba, dan Kenakalan Remaja;
6. Sosialisasi Lembaga Kepemudaan;
7. Temu Wicara dan Sarasehan/Silaturahmi Peran Pemuda;
8. Pengembangan Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan Pemuda;
9. Peningkatan Pemahaman wawasan Lingkungan;
10. Fasilitasi Kerja Magang Pemuda Terlatih;
11. Pembinaan Kewirausahaan Bagi Pemuda;
12. Ajang Unjuk Kreasi Pemuda;
13. Aktualisasi dan Pembinaan Pemuda.

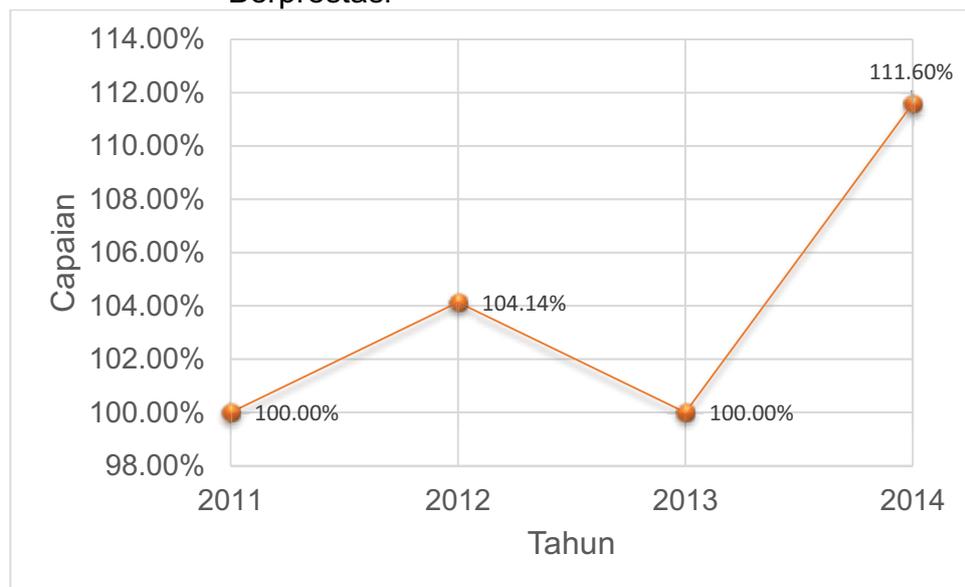
Pencapaian dari indikator meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri adalah melalui program “Peningkatan Peran Serta Kepemudaan” dengan kegiatan:

1. Fasilitasi Peningkatan Peran kepemudaan;
2. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri;
3. Pengembangan Kreativitas dan Aktualisasi Kepemudaan;
4. Penumbuhan jiwa sosial kepemudaan;
5. Peningkatan pemahaman pemuda dan pencegahan kenakalan remaja;
6. Peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
7. Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda.

b. Meningkatnya Atlit/Organisasi Olahraga Yang Berprestasi

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pembinaan kepada atlit/organisasi sehingga berhasil menorehkan prestasi di beberapa cabang olahraga. Pada tahun 2014, sebanyak 1.761 atlit/organisasi yang berhasil dan berprestasi di beberapa cabang olahraga. Jumlah tersebut melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu 1.578 atlit/organisasi. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerjanya adalah 111,60%. Perbandingan pencapaian indikator meningkatnya atlit/organisasi olahraga yang berprestasi selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.2.

Grafik III.2 Meningkatnya Atlit/Organisasi Olahraga Yang Berprestasi



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan, yaitu kurang optimalnya koordinasi keolahragaan terutama masalah pembibitan. Namun demikian, terdapat dukungan akomodasi dari instansi lain seperti KONI untuk tingkat Kota dan Dinas Pendidikan untuk tingkat sekolah (POBDA).

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target meningkatnya atlit/organisasi olahraga yang berprestasi adalah sebagai berikut:

1. Pemberian penghargaan bagi para pelaku olah raga berprestasi;
2. Pemberian transport dan reward untuk atlet dan pelatih.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi;
2. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi;
3. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat;
4. Pengembangan olahraga rekreasi;
5. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat;
6. Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Lapangan Olahraga;
7. Peningkatan SDM dan Manajemen Olahraga Prestasi;
8. Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
9. Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Prestasi;
10. Operasional dan Pengadaan Fasilitas Gelora Bung Tomo.

2. SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 2 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama sasaran strategis meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

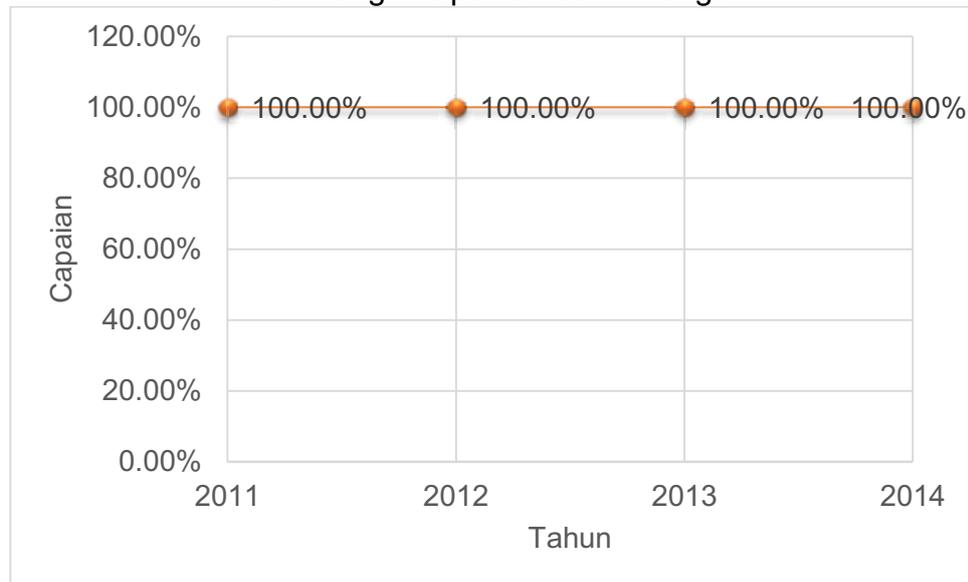
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Anak yang Dilaporkan dan Ditangani			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	100.00%	100.00%	100.00%
2012	100.00%	100.00%	100.00%
2013	100.00%	100.00%	100.00%
2014	100.00%	100.00%	100.00%
Jumlah Lembaga yang Peduli Terhadap Perempuan dan Anak			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	85	85	100.00%
2012	85	85	100.00%
2013	85	85	100.00%
2014	85	85	100.00%

Rincian capaian indikator sasaran strategis meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Anak Yang Dilaporkan dan Ditangani

Pada tahun 2014, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan adalah sebanyak 217 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 217 kasus atau 100% telah ditangani. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kerjanya adalah 100%. Perbandingan pencapaian indikator persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.3.

Grafik III.3 Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Anak Yang Dilaporkan dan Ditangani



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan yaitu pelayanan PKBM di kecamatan yang optimal.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani adalah sebagai berikut:

1. Inisiasi Kelurahan Ramah Anak;
2. Sosialisasi penanganan permasalahan anak bagi Kepala Sekolah dan Guru BP dari tingkat TK sampai SLTA baik negeri maupun swasta;
3. Memberikan bekal berupa training ESQ (Emotional Spiritual Quotient) kepada korban kekerasan maupun trafficking;
4. Penambahan shelter baru khusus bagi anak-anak laki-laki yang berhadapan dengan hukum (ABH);
5. Menyediakan sarana curhat dan konseling bagi anak-anak Surabaya melalui Rumah Sahabat Anak (RSA) Surabaya.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program "Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta

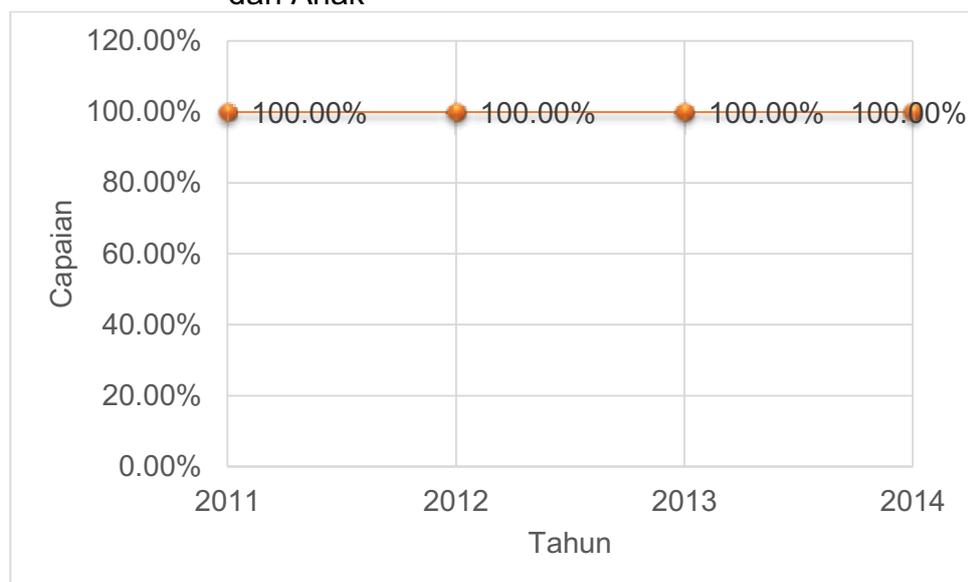
Kesejahteraan dan Perlindungan Anak” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak;
2. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan.

b. Jumlah Lembaga Yang Peduli Terhadap Perempuan dan Anak

Pada tahun 2012, 2013, dan 2014 di Kota Surabaya terdapat 85 lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak yang dibina secara berturut-turut setiap tahunnya. Pembinaan yang dilakukan kepada Organisasi Perempuan tersebut berupa *Capacity Building* Organisasi Peduli Perempuan dan Anak terutama dalam bidang PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak). Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 85 lembaga, maka capaian kerjanya adalah 100%. Perbandingan pencapaian indikator jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.4.

Grafik III.4 Jumlah Lembaga yang Peduli Terhadap Perempuan dan Anak



Pencapaian target indikator kinerja jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak didukung oleh adanya persebaran lembaga yang merata sehingga membantu gerak cepat dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah komunikasi baik formal maupun non formal dengan lembaga.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak;
3. Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender;
4. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

3. SASARAN MENINGKATNYA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL, PENCEGAHAN, DAN REHABILITASI SOSIAL

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 2 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pencegahan, Dan Rehabilitasi Sosial mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3 Sasaran Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pencegahan, Dan Rehabilitasi Sosial

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	20.00%	53.27%	266.35%
2012	25.00%	78.76%	315.05%
2013	39.00%	106.58%	273.27%
2014	54.00%	149.98%	277.74%

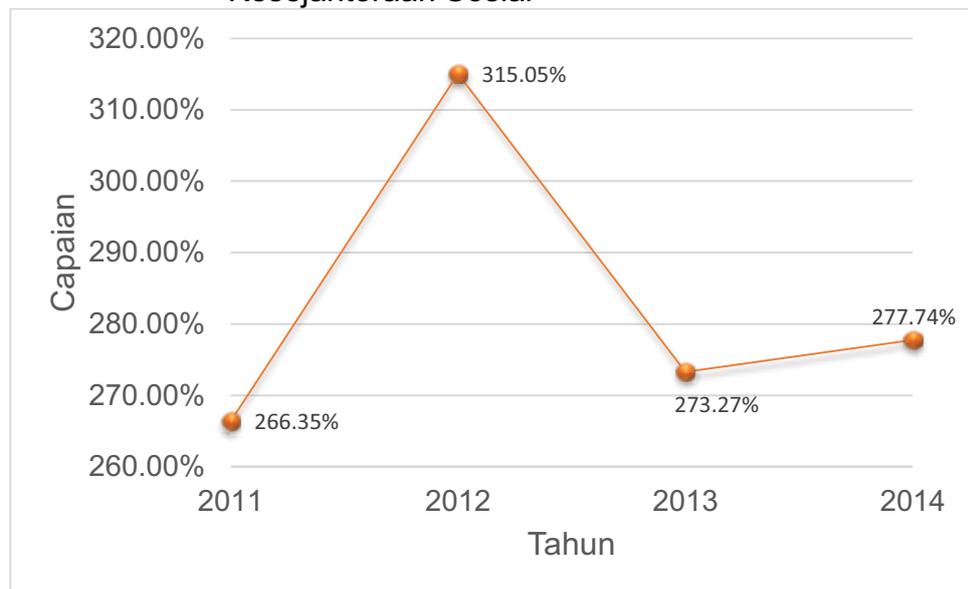
Persentase PSKS yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	30.00%	30.24%	100.80%
2012	40.00%	62.64%	156.60%
2013	50.00%	74.09%	148.18%
2014	60.00%	91.87%	153.12%

Rincian capaian indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pencegahan, Dan Rehabilitasi Sosial tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 95.548 orang atau 149,98% telah berhasil ditangani. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 54% atau 34.402 orang, maka capaian kerjanya adalah 277,74%. Perbandingan pencapaian indikator persentase penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.5.

Grafik III.5 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS;
3. Penyusunan dokumen kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
4. penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa;
5. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat;
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri;

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih;
9. Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia;
10. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD Griya Werdha;
11. Pendataan PMKS dan PSKS.

b. Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

Selama tahun 2014, PSKS yang telah berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial adalah 1.209 PSKS atau mencapai 91,87% dari 1.316 PSKS. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sampai sebesar 60%, maka capaian kerjanya adalah 153,12%. Perbandingan pencapaian indikator Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.6.

Grafik III.6 Persentase PSKS yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial;
3. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN);
4. Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial / Organisasi Sosial;
5. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan.

4. SASARAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 8 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Peningkatan Kualitas Pendidikan mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4 Sasaran Peningkatan Kualitas Pendidikan

Angka Kelulusan (AL) SD/MI			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	100.00%	100.00%	100.00%
2012	100.00%	100.00%	100.00%
2013	100.00%	100.00%	100.00%
2014	100.00%	100.00%	100.00%
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	98,88%	99.73%	100.86%
2012	98.98%	99.89%	100.92%
2013	99.00%	99.89%	100.90%
2014	99.30%	99.99%	100.70%

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	92,95%	93.02%	100.08%
2012	93.00%	93.97%	101.04%
2013	95.00%	95.34%	100.36%
2014	95.00%	97.02%	102.12%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	90.00%	90.26%	100.29%
2012	92.50%	92.63%	100.14%
2013	92.50%	92.88%	100.41%
2014	95.00%	95.87%	100.91%
Angka Kelulusan (AL) SMA/MA			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	98,78%	99.33%	100.56%
2012	98.88%	99.93%	101.06%
2013	99.00%	99.94%	100.95%
2014	99.15%	99.93%	100.79%
Angka Kelulusan (AL) SMK			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	98,71%	99.94%	101.25%
2012	98.81%	99.88%	101.08%
2013	99.01%	99.99%	100.99%
2014	99.11%	99.95%	100.85%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	85.00%	85.77%	100.91%
2012	87.50%	87.77%	100.31%
2013	90.00%	90.12%	100.13%
2014	92.50%	93.47%	101.05%
Angka Melek Huruf (AMH)			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	100.00%	100.00%	100.00%
2012	100.00%	100.00%	100.00%
2013	100.00%	100.00%	100.00%
2014	100.00%	100.00%	100.00%

Rincian capaian indikator Sasaran Peningkatan Kualitas Pendidikan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Angka Partisipasi Murni SD/MI

Jumlah penduduk usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun pada tahun 2014 sebanyak 260.193 jiwa sedangkan siswa usia 7 – 12 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 252.434 siswa atau 97,02%. Sehingga dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2104 sebesar 95% maka capaian kerjanya adalah 102,12%. Capaian kinerja indikator angka partisipasi murni SD/MI mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun 2012 sebesar 93,97%, tahun 2013 sebesar 95,34% dan tahun 2014 sebesar 97,02%. Dari data tersebut Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kota Surabaya mengalami sedikit kenaikan dibanding realisasi dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan seiring dengan perpindahan penduduk dari luar Kota yang masuk ke Surabaya. Perbandingan capaian indikator Angka Partisipasi Murni SD/MI selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.7.

Grafik III.7 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI



Adapun upaya dalam rangka mencapai kinerja tersebut dilaksanakan melalui “Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan;
2. Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
4. Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan;
5. Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) yang dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan;
6. Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS;
7. Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS;
8. Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar;
9. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang Pendidikan Dasar;
10. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan;
11. Operasional Bis Sekolah;
12. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan.

b. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs

Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun pada tahun 2014 sebanyak 129.367 jiwa, sedangkan siswa usia 13 -15 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 124.018 siswa atau 95,87% sehingga dari target yang ditetapkan pada tahun 2014 yaitu sebesar 95,00%, maka capaian kinerjanya adalah 100,91%. Peningkatan APM SMP/MTs tahun 2014 dikarenakan konsistennya bantuan biaya pendidikan bagi seluruh sekolah negeri maupun swasta, serta bantuan biaya personal bagi siswa dari keluarga tidak

mampu. Perbandingan capaian indikator APM SMP/MTs selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.8.

Grafik III.8 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs



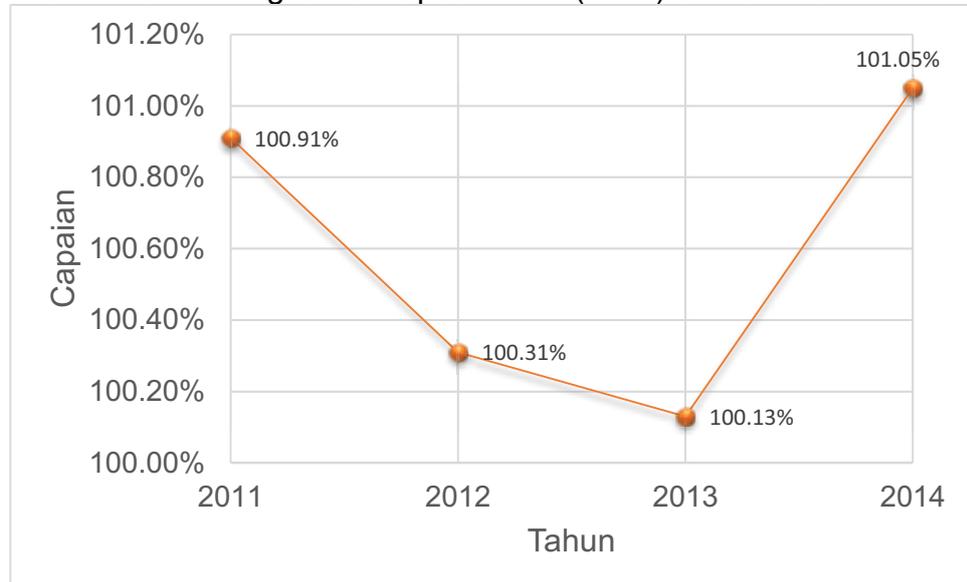
Adapun upaya yang dilaksanakan dalam mencapai kinerja tersebut adalah melalui “Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun” dengan kegiatan sebagaimana diuraikan sebelumnya.

c. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK

Jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2014 sebanyak 126.983 jiwa, sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebanyak 118.692 siswa atau 93,47%. Sehingga dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 92,50% maka capaian kinerjanya adalah 101,05%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini disebabkan konsistennya bantuan biaya operasional dari APBD Kota Surabaya untuk memberikan biaya pendidikan bagi seluruh siswa sekolah negeri maupun swasta serta bantuan biaya personal bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Perbandingan capaian indikator

Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.9.

Grafik III.9 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK



Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator APM SMA/SMK/MA adalah melalui “Program Pendidikan Menengah” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri;
2. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan Menengah;
3. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah;
4. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri;
5. Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN;
6. Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN;
7. Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKMEN) yang dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan;
8. Penerimaan Peserta Didik Baru DIKMEN;
9. Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Menengah;
10. Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah;

11. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang Pendidikan Menengah
12. Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar.

d. Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Pada tahun 2014 jumlah siswa jenjang SD/MI yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 49.103 siswa dari 49.103 siswa kelas 6 yang mengikuti ujian atau 100,00%. Sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan yaitu 100,00%. Angka kelulusan (AL) SD/MI dari tahun 2012 sampai tahun 2014 mencapai 100,00%. Hal ini didukung dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Perbandingan capaian indikator Angka Kelulusan SD/MI selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.10.

Grafik III.10 Angka Kelulusan (AL) SD/MI



e. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Pada tahun 2014 jumlah siswa jenjang SMP/MTs yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 42.668 siswa dari 42.670 siswa kelas 9 yang mengikuti ujian atau 99,99%. Capaian kinerja indikator ini mencapai 100,70% dari target yang ditetapkan yaitu 99,30%. Angka kelulusan (AL) SMP/MTs dari tahun 2012 sampai tahun 2013 mencapai 99,93% selanjutnya mengalami kenaikan di tahun 2014 mencapai 99,99%. Hal ini didukung dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Perbandingan capaian indikator Angka Kelulusan SMP/MTS selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.11

Grafik III.11 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs



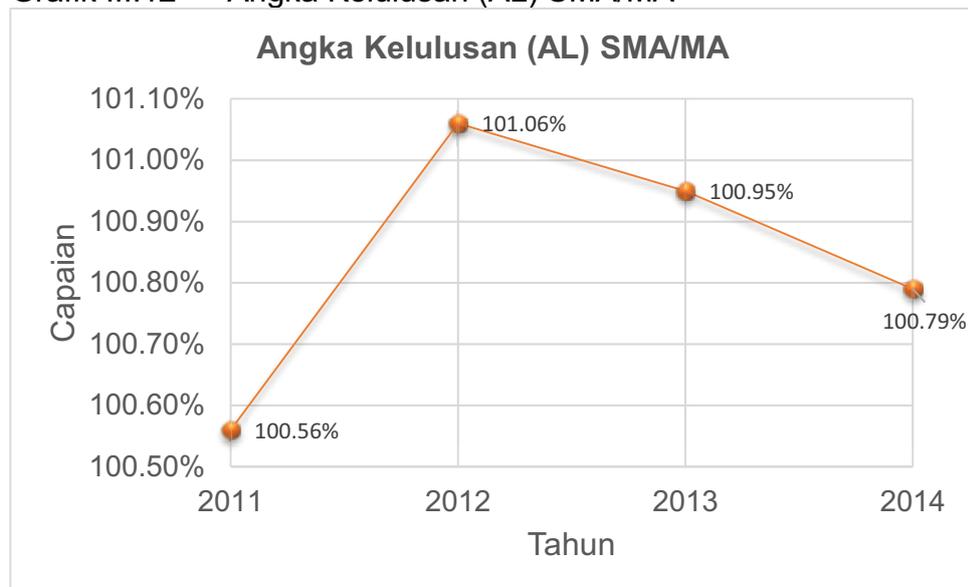
f. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA

Pada tahun 2014 jumlah siswa jenjang SMA/MA yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 18.437 siswa dari 18.450 siswa kelas 12 yang mengikuti ujian atau 99,93%. Capaian kinerja indikator ini mencapai 100,79% dari target yang ditetapkan yaitu 99,15%. Angka kelulusan (AL) SMA/MA dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan

0,01% dari 99,93% menjadi 99,94%. Sedangkan di tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 mengalami penurunan 0,01% dari 99,94% menjadi 99,93%.

Angka kelulusan yang cukup tinggi didukung oleh program intensif dalam rangka mempersiapkan peserta didik tingkat akhir untuk mengikuti program try out baik secara online maupun offline serta dengan dilaksanakannya program Pendidikan Menengah dengan kegiatan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Perbandingan capaian indikator Angka Kelulusan SMA/MA selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.12.

Grafik III.12 Angka Kelulusan (AL) SMA/MA



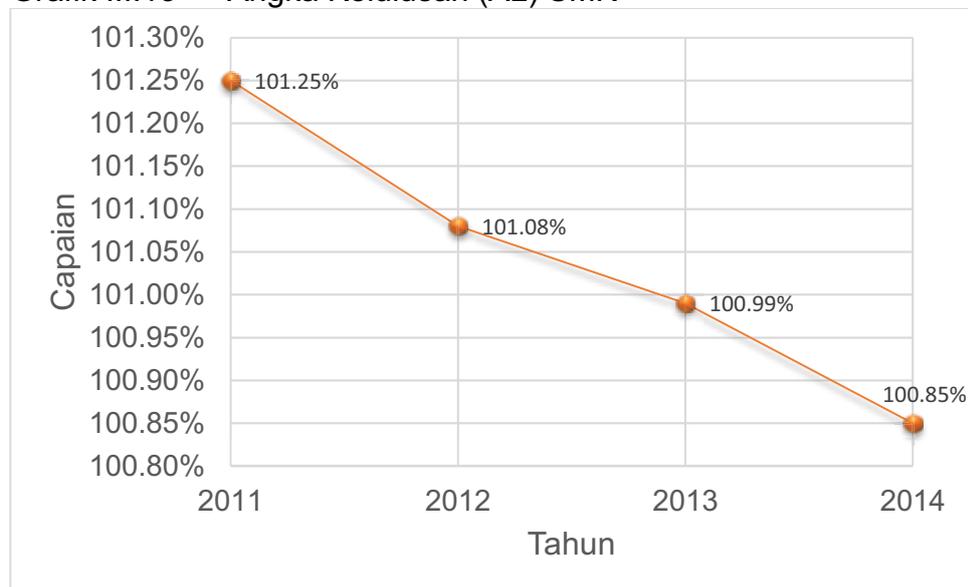
g. Angka Kelulusan (AL) SMK

Pada tahun 2014 jumlah siswa jenjang SMK yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 17.697 siswa dari 17.706 siswa kelas 12 yang mengikuti ujian atau 99,95%. Capaian kinerja indikator ini mencapai 100,85% dari target yang ditetapkan yaitu 99,11%. Angka kelulusan (AL) SMK dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan 0,11% dari 99,88% menjadi 99,99%. Sedangkan di tahun 2014

dibandingkan tahun 2013 mengalami penurunan 0,04% dari 99,99% menjadi 99,95%.

Angka kelulusan yang cukup tinggi didukung oleh program intensif dalam rangka mempersiapkan peserta didik tingkat akhir untuk mengikuti program try out baik secara online maupun offline. Perbandingan capaian indikator Angka Kelulusan SMK selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.13.

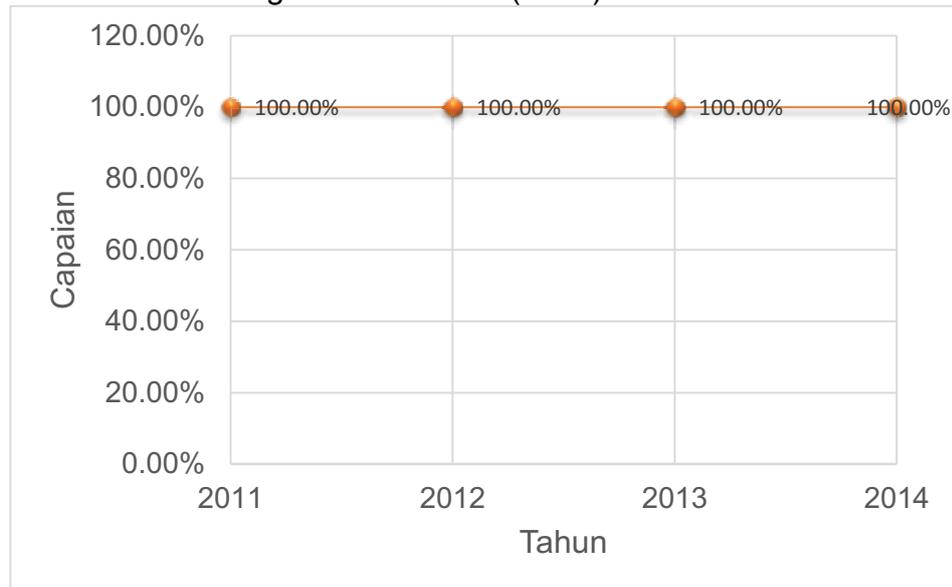
Grafik III.13 Angka Kelulusan (AL) SMK



h. Angka Melek Huruf (AMH)

Tahun 2014 jumlah penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun keatas tercatat sebanyak 2.199.721 jiwa dan seluruhnya telah dapat membaca dan menulis. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Perbandingan capaian indikator Angka Melek Huruf selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.14.

Grafik III.14 Angka Melek Huruf (AMH)



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Program Pendidikan Non Formal” dengan kegiatan:

1. Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS;
2. Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah.

5. SASARAN MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 9 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.5 Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) yang Memiliki Kompetensi Kebidanan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	96.00%	95.10%	99.06%
2012	96.00%	97.61%	101.68%
2013	96.00%	96.03%	100.03%
2014	96.00%	96.45%	100.47%
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	100.00%	100.00%	100.00%
2012	100.00%	100.00%	100.00%
2013	100.00%	100.00%	100.00%
2014	100.00%	100.00%	100.00%
Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit RSUD dr. Mohamad Soewandhi			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011		Kelas B	
2012	Kelas B	Kelas B	100.00%
2013	Kelas B	Kelas B	100.00%
2014	Kelas B	Kelas B	100.00%
Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011		Kelas C	
2012	Kelas C	Kelas C	100.00%
2013	Kelas B	Kelas C	50.00%
2014	Kelas B	Kelas C	75.39%
Jumlah Puskesmas Induk yang Meningkatkan Menjadi Puskesmas Rawat Inap			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	13	15	115.38%
2012	15	16	106.67%
2013	17	19	111.76%
2014	19	20	105.26%

Jumlah Puskesmas Pembantu yang Meningkatkan Menjadi Puskesmas Induk			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	2	5	250.00%
2012	4	9	225.00%
2013	6	9	150.00%
2014	8	9	112.50%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	100.00%	100.00%	100.00%
2012	100.00%	100.00%	100.00%
2013	100.00%	100.00%	100.00%
2014	100.00%	100.00%	100.00%
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani < 24 jam			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	100.00%	100.00%	100.00%
2012	100.00%	100.00%	100.00%
2013	100.00%	100.00%	100.00%
2014	100.00%	100.00%	100.00%
Persentase Peserta KB Aktif			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	79.36%	84.58%	106.58%
2012	78.78%	82.04%	104.14%
2013	79.52%	83.23%	104.67%
2014	80.26%	81.42%	101.45%

Rincian capaian indikator Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Pada tahun 2014, ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah 43.794 orang dari prediksi 45.405 ibu bersalin, sehingga cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 96.45%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 96%, maka capaian kerjanya adalah 100.47%. Perbandingan pencapaian indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.15.

Grafik III.15 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) yang Memiliki Kompetensi Kebidanan



Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah dengan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan misalnya pelatihan PPGDON (Penanganan Pertama Gawat Darurat Obstetri Neonatal), pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal), pelatihan Afliksia, pelatihan NICU (Neonatal Intensive Care Unit) dan lain-lain. Selain itu juga mendapat dukungan kemitraan yang efektif

melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor maupun kemitraan lainnya.

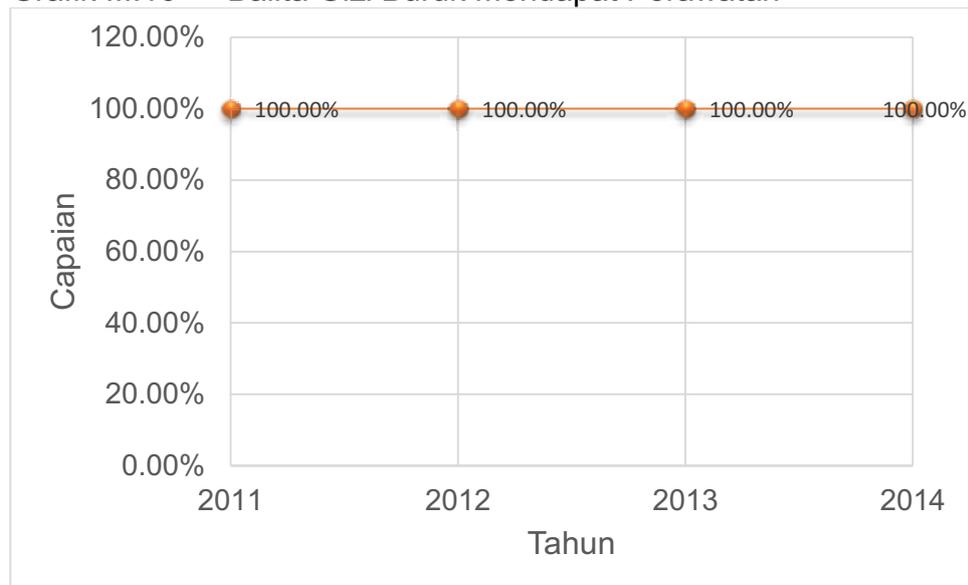
Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Keluarga;
2. Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat.

b. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Pada tahun 2014 di Kota Surabaya terdapat 366 balita gizi buruk yang tercatat. Dari 366 balita gizi buruk tersebut seluruhnya mendapatkan perawatan dan intervensi dari pemerintah Kota Surabaya. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaiannya adalah 100%. Perbandingan pencapaian indikator balita gizi buruk mendapat perawatan selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.16.

Grafik III.16 Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor maupun kemitraan lainnya serta peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk Balita Gizi Buruk;
2. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk Baduta Gakin;
3. Pendampingan Balita Kurang Gizi;
4. Lokakarya Audit Gizi Buruk;
5. Penimbangan Serentak;
6. Teurapetic Feeding Center (TFC) di Puskesmas;
7. Community Feeding Center (CFC);
8. Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk;
9. Pemberian Suplemen Gizi;
10. Kelompok Ibu Pintar Balita Sehat.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

c. Peningkatan Klasifikasi RSUD dr. Mohamad Soewandhi

Pada tahun 2014, klasifikasi RSUD dr. Mohamad Soewandhie menjadi rumah sakit kelas B. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014 yaitu kelas B maka capaiannya adalah 100%. Perbandingan pencapaian indikator peningkatan klasifikasi RSUD dr. Mohamad Soewandhie selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.17.

Grafik III.17 Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit RSUD dr. Mohamad Soewandhi



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit;
2. Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok di RSUD dr. Mohamad Soewandhie;
3. Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit di RSUD dr. Mohamad Soewandhie;
4. Peningkatan Mutu SDM di RSUD dr. Mohamad Soewandhie;
5. Peningkatan Mutu Pelayanan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie;
6. Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.

d. Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada

Pada tahun 2014 klasifikasi RSUD Bhakti Dharma Husada adalah rumah sakit kelas C. Dibandingkan dengan target tahun 2014, yakni

kelas B, capaian berdasarkan kelengkapan persyaratan yang telah dipenuhi untuk menjadi rumah sakit kelas B adalah 75,93%. Perbandingan pencapaian indikator peningkatan klasifikasi RSUD Bhakti Dharma Husada selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.18.

Grafik III.18 Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan, yaitu:

1. Kurangnya ketersediaan dokter spesialis pada pelayanan medik spesialis dasar;
2. Kurangnya ketersediaan dokter spesialis pada pelayanan medik spesialis penunjang;
3. Belum adanya dokter spesialis untuk pelayanan medik subspecialis;
4. Kurangnya ketersediaan dokter spesialis pada pelayanan medik spesialis gigi mulut;
5. Kurangnya ketersediaan Tenaga Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian pada pelayanan penunjang klinik;
6. Perijinan terkait pengolahan limbah dan incenerator, serta perijinan radiologi masih dalam proses.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Pemenuhan SDM untuk dokter spesialis dilakukan melalui kerjasama dengan RSUD dr. Soetomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;
2. Melakukan *recruitment* tenaga dokter spesialis dan tenaga kefarmasian;
3. Penambahan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan, antara lain pelayanan bank darah dan pelayanan unit Hemodialisa.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Promosi Kesehatan di RSUD Bhakti Dharma Husada Rumah Sakit;
2. Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit di RSUD Bhakti Dharma Husada;
3. Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok di RSUD Bhakti Dharma Husada.

e. Jumlah Puskesmas Induk Yang Meningkatkan Menjadi Puskesmas Rawat Inap

Pada tahun 2014, jumlah puskesmas induk yang ada di Kota Surabaya berjumlah 62 puskesmas. Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap di Kota Surabaya tahun 2014 sejumlah 20 puskesmas dengan target 19 puskesmas di tahun 2014. Capaian kinerja untuk indikator jumlah puskesmas induk meningkat menjadi puskesmas rawat inap sebesar 105,26%. Perbandingan pencapaian kinerja peningkatan jumlah puskesmas induk yang menjadi puskesmas rawat inap dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.19.

Grafik III.19 Jumlah Puskesmas Induk yang Meningkatkan Menjadi Puskesmas Rawat Inap



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan anggaran dan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor maupun kemitraan lainnya.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan disarana pelayanan kesehatan.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya” dengan kegiatan sebagai berikut:

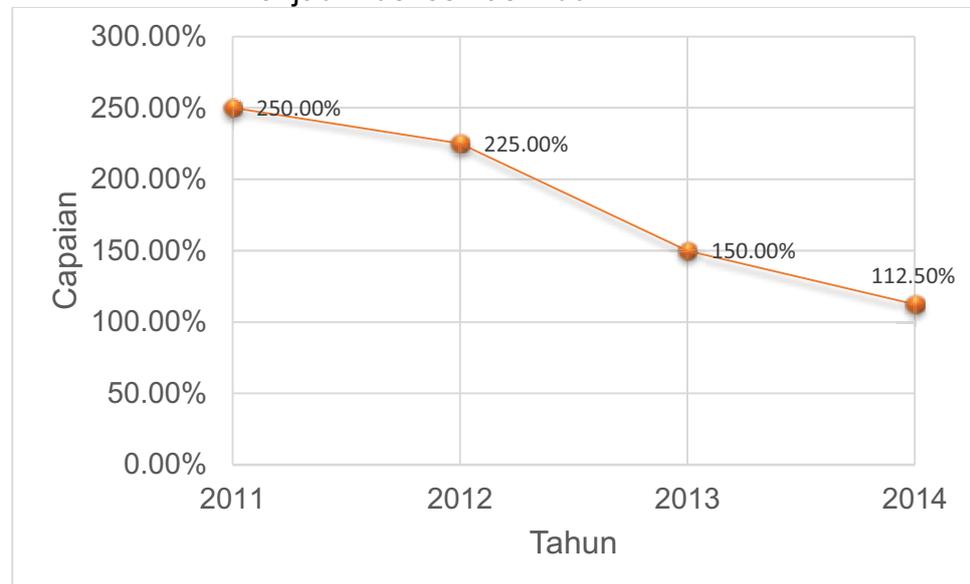
1. Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu;
2. Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
3. Penyusunan Profil Kesehatan;
4. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas;

5. Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok;
6. Operasional Pelayanan Kesehatan.

f. Jumlah Puskesmas Pembantu Yang Meningkat Menjadi Puskesmas Induk

Pada tahun 2014, jumlah Puskesmas pembantu yang ada di Kota Surabaya berjumlah 60 puskesmas. Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk di Kota Surabaya tahun 2014 sebanyak 9 puskesmas dengan target 8 puskesmas pada tahun 2014. Capaian kinerja untuk indikator jumlah puskesmas pembantu meningkat menjadi puskesmas induk sebesar 112.50%. Perbandingan pencapaian indikator jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.20.

Grafik III.20 Jumlah Puskesmas Pembantu yang Meningkat Menjadi Puskesmas Induk



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan anggaran dan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor maupun kemitraan lainnya. Namun demikian, masih terus dilakukan peningkatan-peningkatan:

1. Sarana prasarana difasilitas pelayanan kesehatan;

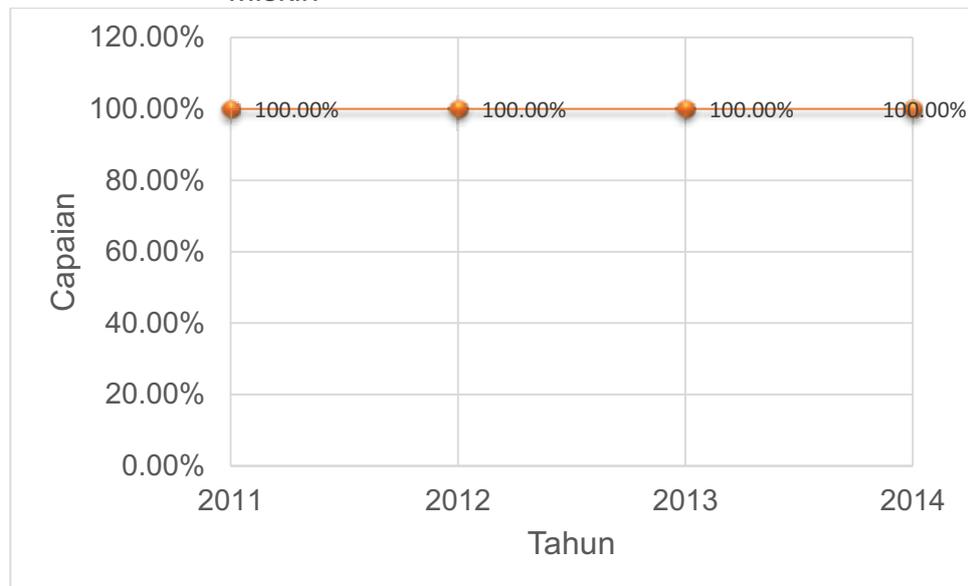
2. Kualitas dan kuantitas SDM kesehatan disarana pelayanan kesehatan.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

g. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pada tahun 2014, cakupan pelayanan kesehatan dasar/rujukan masyarakat miskin telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, dimana seluruh warga miskin yang berobat di sarana kesehatan milik Pemerintah Kota Surabaya dan rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya telah dipenuhi kebutuhan pelayanan kesehatannya. Perbandingan pencapaian indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.21.

Grafik III.21 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan anggaran dan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor maupun kemitraan lainnya.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit, Puskesmas, dan Jaringannya;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama antara Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Kesehatan Jamkesmas Non Kuota dengan dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait kerjasama pelayanan kesehatan Jamkesda antara Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya;
3. Pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Kesehatan Jamkesda dan Jamkesmas Non Kuota;
4. Kegiatan Khitanan Masal;
5. Rapat Koordinasi Program Jaminan Kesehatan;
6. Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan;
7. Bimbingan teknis/fasilitasi Program Jaminan Kesehatan;
8. Penanganan kasus dan keluhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan;
9. Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk masyarakat Kota Surabaya.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
2. Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah;
3. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan;

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus;
5. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;
6. Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Di Rumah Sakit, Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya;
7. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan;
8. Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan;
9. Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan;
10. Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
11. Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
12. Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan);
13. Pelayanan Perawatan dan Gizi Pasien Rumah Sakit.

h. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani < 24 Jam

Pada tahun 2014 dari 154 Kelurahan yang ada di Kota Surabaya, terdapat 69 Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB). Dari kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) tersebut, 100% telah ditangani < 24 jam sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Perbandingan capaian target indikator cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.22.

Grafik III.22 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani < 24 jam



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor maupun kemitraan lainnya, serta dukungan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

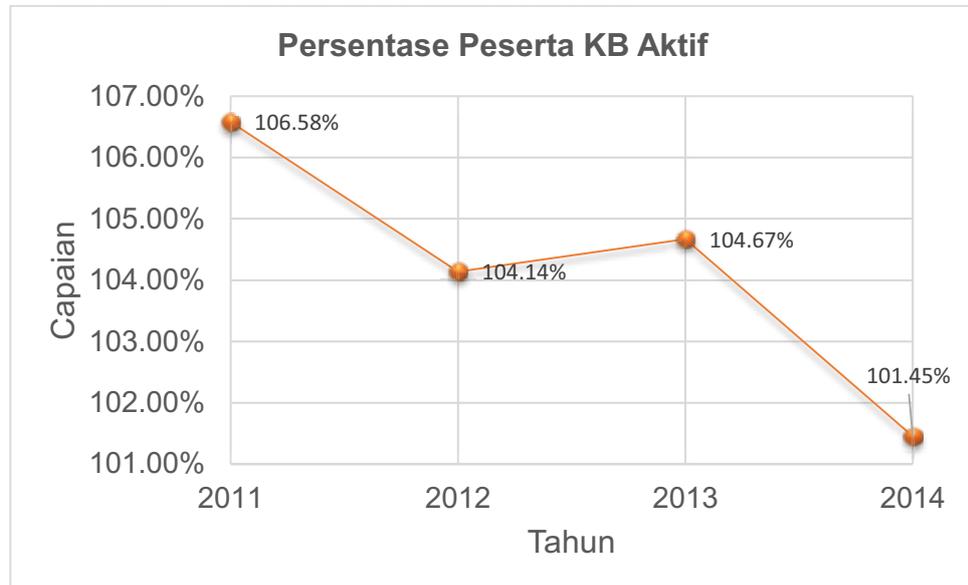
1. Pemantauan dan Pelacakan KLB/Surveilans Epidemiologi;
2. Pemantauan dan Pelacakan Suspek KLB (Kejadian Luar Biasa);
3. Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS);
4. Pelaporan Surveilans Epidemiologi dan Kematian;
5. Peningkatan Imunisasi;
6. Penanggulangan Bencana dan Pasca Bencana.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

i. Persentase peserta KB Aktif

Pada tahun 2014, dari 481.687 Pasangan Usia Subur terdapat 392.206 peserta KB aktif atau 81,42% diantaranya menjadi peserta KB aktif. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80.26%, maka capaian kerjanya adalah 101.45%. Perbandingan pencapaian Indikator persentase peserta KB aktif selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.23.

Grafik III.23 Persentase Peserta KB Aktif



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Keluarga Berencana” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB;
2. Pembinaan Keluarga Berencana;
3. Penyediaan dan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang Disediakan Melalui Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Keluarga Berencana.

6. SASARAN TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG DITANDAI DENGAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 7 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Ditandai dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6 Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Ditandai dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	221	69	168.77%
2012	215	55	174.42%
2013	209	12	194.26%
2014	203	27	186.69%
Persentase Rancangan Produk Hukum yang Dapat Diselesaikan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	100.00%	100.00%	100.00%
2012	100.00%	100.00%	100.00%
2013	100.00%	100.00%	100.00%
2014	100.00%	100.00%	100.00%
Persentase Pemrosesan Produk Inti (Core Busines) yang Memiliki Prosedur Tetap			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	29.00%	31.25%	107.75%
2012	34.00%	37.08%	109.06%
2013	39.00%	42.08%	107.91%
2014	44.00%	55.00%	125.00%

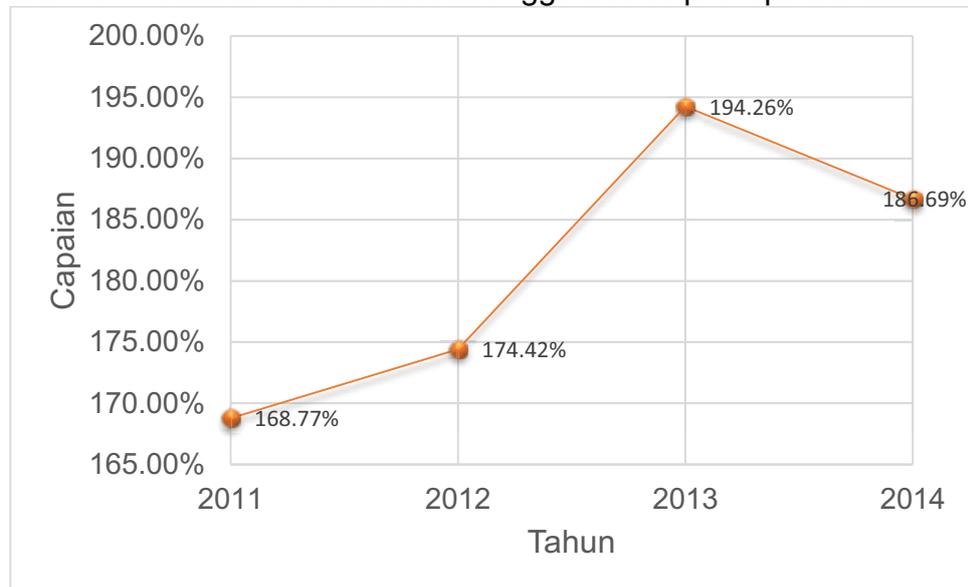
Persentase Jumlah Keluhan yang Selesai Ditindaklanjuti			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	100.00%	100.00%	100.00%
2012	100.00%	100.00%	100.00%
2013	100.00%	100.00%	100.00%
2014	100.00%	100.00%	100.00%
Persentase Penduduk yang Ber-KTP			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	87.00%	89.00%	102.00%
2012	89.00%	91.03%	102.28%
2013	91.00%	91.35%	100.39%
2014	93.00%	93.79%	100.85%
Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	77.00%	94.00%	122.08%
2012	90.00%	97.39%	108.21%
2013	90.00%	99.82%	110.91%
2014	90.00%	99.92%	111.02%
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	100.00%	100.00%	100.00%
2012	100.00%	100.00%	100.00%
2013	100.00%	100.00%	100.00%
2014	100.00%	100.00%	100.00%

Rincian capaian indikator Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Ditandai dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur

Pada tahun 2014, jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur adalah sebanyak 27 kasus. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 203 kasus, maka capaian kinerjanya adalah 186,69%. Perbandingan pencapaian indikator jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.24.

Grafik III.24 Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur



Upaya- upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan secara rutin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil temuan pengawasan pelaksanaan kegiatan SKPD;
3. Melaksanakan program kerja pengawasan tahunan dan melakukan pemeriksaan secara berkala dan komprehensif.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH” dengan kegiatan sebagai berikut:

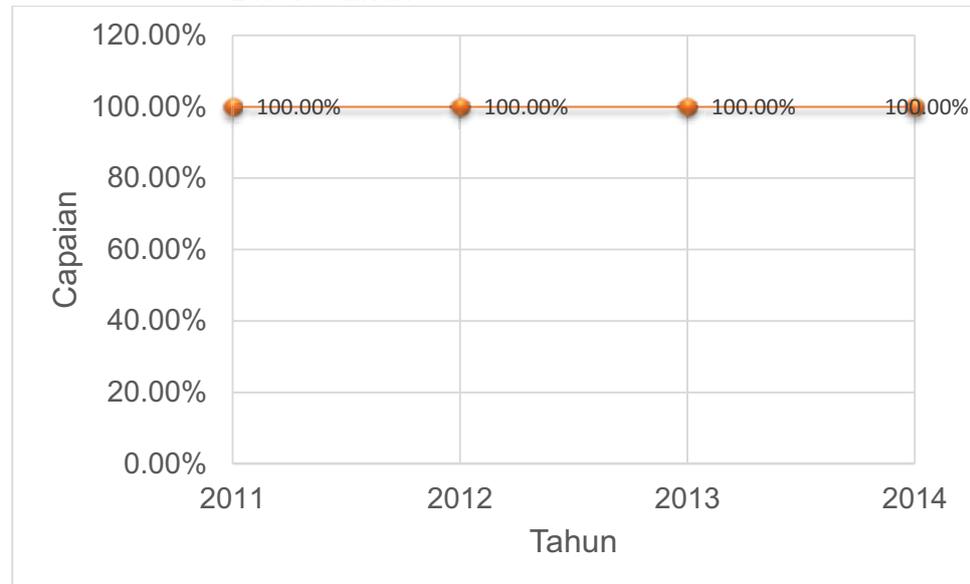
1. Penerapan Disiplin Pegawai;
2. Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan;
3. Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung;
4. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi (KORMONEV di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
5. Inventarisasi dan Evaluasi Temuan Hasil Pemeriksaan;
6. Evaluasi LAKIP SKPD;
7. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota Surabaya;
8. Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektur Pembantu Wilayah I di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
9. Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektur Pembantu Wilayah II di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
10. Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah III di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
11. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
12. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota Surabaya.

b. Persentase Rancangan Produk Hukum Yang Dapat Diselesaikan

Pada tahun 2014, rancangan produk hukum yang diajukan sebanyak 89 rancangan produk hukum, dari jumlah tersebut seluruhnya telah dapat diselesaikan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 89 rancangan maka capaian kerjanya adalah 100.00%. Perbandingan pencapaian target

indikator persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.25.

Grafik III.25 Persentase Rancangan Produk Hukum yang Dapat Diselesaikan



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Penataan Peraturan Perundang-undangan” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan;
2. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
3. Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang- Undangan;
5. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan.

c. Persentase Jumlah Keluhan Yang Selesai Ditindaklanjuti

Pada tahun 2014, pemerintah Kota Surabaya telah menerima 4.298 keluhan dari masyarakat melalui *media center*. Dari keseluruhan keluhan tersebut 100% telah selesai ditindaklanjuti. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah 100%. Perbandingan capaian target indikator persentase keluhan yang selesai ditindaklanjuti selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.26.

Grafik III.26 Persentase Jumlah Keluhan yang Selesai Ditindaklanjuti



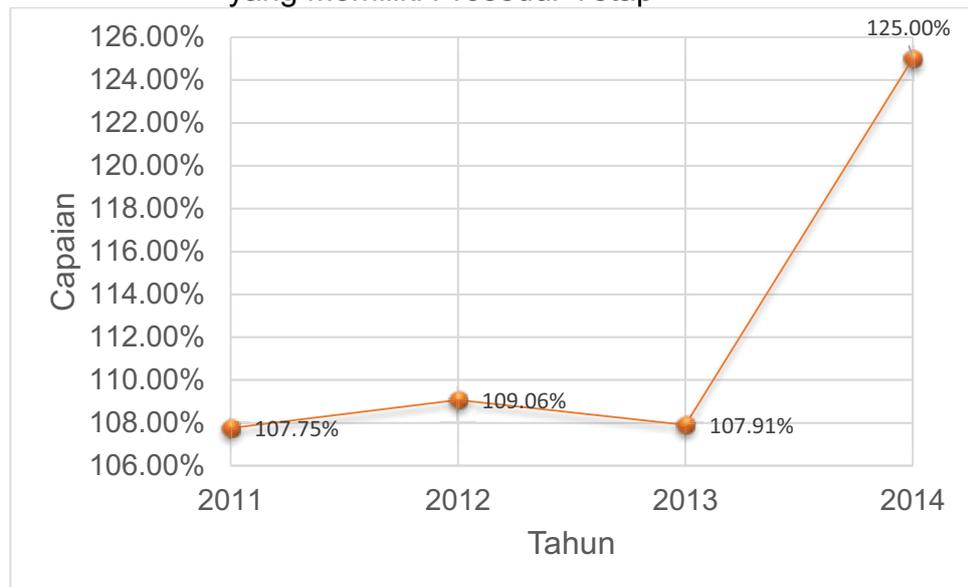
Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pelaksanaan program “Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat” dengan kegiatan Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat.

d. Persentase Pemrosesan Produk Inti (*Core Business*) Yang Memiliki Prosedur

Pada tahun 2014, terdapat pemrosesan produk inti sebanyak 31 produk inti, sehingga sampai dengan tahun 2014 terdapat 132 pemrosesan produk inti atau sebesar 55% dari 240 produk inti.

Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 44%, maka capaian kerjanya adalah 125%. Adapun capaian target indikator persentase pemrosesan produk inti (core business) yang memiliki prosedur tetap selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.27.

Grafik III.27 Persentase Pemrosesan Produk Inti (Core Busines) yang Memiliki Prosedur Tetap



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi;
2. Pelaksanaan Analisa Kelembagaan;
3. Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;
5. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan;
7. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas;
9. Pelayanan Unit Layanan Pengadaan;

10. Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah;
11. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya;
12. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian;
13. Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Operasional Kegiatan Kelurahan.

e. Persentase Penduduk Yang Ber-KTP

Pada tahun 2014, jumlah penduduk di kota Surabaya yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2.026.310 jiwa dari total 2.160.362 jiwa wajib KTP atau 93,79%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 93%, maka capaian kerjanya adalah 100.85%. Perbandingan pencapaian target kinerja persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP di Surabaya dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.28.

Grafik III.28 Persentase Penduduk yang Ber-KTP



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan, yaitu:

1. Adanya warga surabaya yang tidak memiliki tempat tinggal tetap;
2. Masih ada warga Surabaya yang kurang memahami arti penting KTP

Namun demikian terdapat dukungan dari SKPD, Kecamatan dan Kelurahan, Ketua RW dan RT serta Mobil Keliling / SDM. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kepada Ketua LKMK dan Ketua RW
2. Koordinasi dengan Camat dan Lurah
3. Pelayanan di mall setiap hari senin – minggu.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Penataan Administrasi Kependudukan” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan;
2. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil;
3. Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan;
4. Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya;
5. Penyusunan Profil Kependudukan.

f. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

Pada tahun 2014, tercatat ada 33.119 kelahiran dimana 33.091 atau 99.92% diantaranya telah dicatatkan dengan akte kelahiran. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 90%, maka capaian kerjanya adalah 111.02%. Perbandingan pencapaian target indikator cakupan penerbitan akte

kelahiran di Surabaya dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.29.

Grafik III.29 Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu persyaratan yang kurang lengkap. Namun demikian, terdapat dukungan dari SKPD, Kecamatan dan Kelurahan, Ketua RW dan RT serta Mobil Keliling/SDM. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

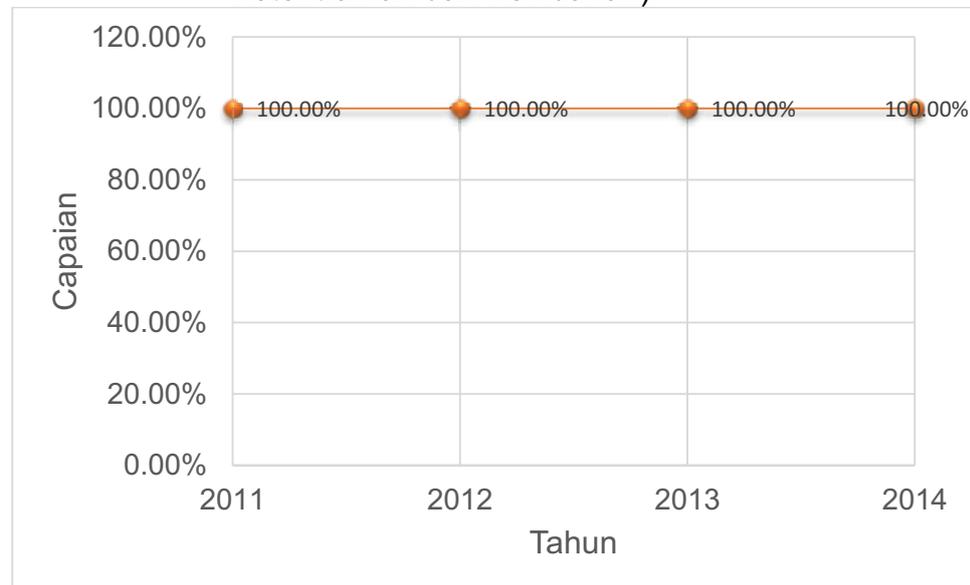
1. Pelayanan Mobil Keliling;
2. Pelayanan di taman;
3. Pelayanan di kantor instansi Pemerintah;
4. Pelayanan di mall pada hari sabtu dan minggu.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program "Penataan Administrasi Kependudukan" dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

g. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)

Pada tahun 2014, terdapat pelanggaran K3 sebanyak 84.382 objek, dari jumlah tersebut 84.382 telah ditindaklanjuti. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.30.

Grafik III.30 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)



Pencapaian target indikator tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) didukung dengan adanya peningkatan kualitas personil, penegakan peraturan daerah yang berlaku, dan dukungan moril dan motivasi dari pimpinan. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan matang dengan melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan dinas terkait serta jajaran samping (TNI/POLRI);

2. Inovasi dengan menerjunkan Tim Negosiator di lapangan sehingga dalam penertiban dapat dilakukan dengan cara Persuasif Humanis.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Bidang penanganan Strategis;
2. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis;
3. Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis;
4. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas;
5. Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas;
6. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan;
7. Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS);
8. Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan;
9. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama;
10. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja;
11. Penertiban Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I;
12. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah;
13. Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II;

14. Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III.

7. SASARAN PENINGKATAN DAYA SAING KOTA UNTUK MENDUKUNG IKLIM INVESTASI

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 3 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Peningkatan Daya Saing Kota untuk Mendukung Iklim Investasi mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.7 Sasaran Peningkatan Daya Saing Kota untuk Mendukung Iklim Investasi

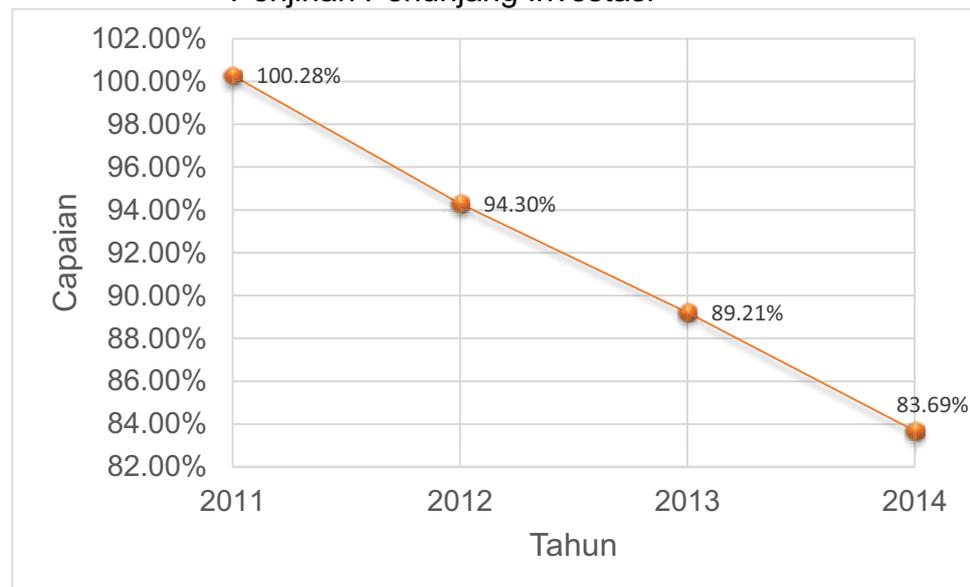
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Penunjang Investasi			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	75.00%	75.21%	100.28%
2012	80.00%	75.44%	94.30%
2013	85.00%	75.83%	89.21%
2014	90.00%	75%	83.69%
Persentase Antara Jumlah Layanan Publik Berbasis TIK Dengan Jumlah Total Layanan Publik (108 Pelayanan Publik)			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	4.63%	4.63%	100.00%
2012	9.26%	12.96%	100.00%
2013	13.89%	17.59%	126.64%
2014	18.52%	22.22%	119.99%
Persentase Antara Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis Web Dengan Jumlah Total Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	-	-	-
2012	5.00%	21.33%	426.60%
2013	6.00%	26.80%	446.64%
2014	7.00%	13.83%	197.57%

Rincian capaian Sasaran Peningkatan Daya Saing Kota untuk Mendukung Iklim Investasi tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Penunjang Investasi

Dari target RPJMD yang telah ditentukan untuk indikator IKM Pelayanan Perijinan Penunjang Investasi untuk tahun 2014 sebesar 90% namun dari survey yang dilaksanakan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan perijinan penunjang investasi diperoleh hasil 75% atau capaian kinerjanya sebesar 83,69%. Perbandingan pencapaian indikator IKM Pelayanan Perijinan Penunjang Investasi selama 4 (empat) tahu terakhir dapat dilihat pada Grafik III.31.

Grafik III.31 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Penunjang Investasi



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yakni adanya peningkatan jenis perijinan yang dilayani di UPTSA serta penyesuaian dalam mekanisme sistem pelayanan perijinan. Namun demikian pencapaian target indikator ini mendapatkan dukungan berupa Layanan Terpadu dengan sistem

online yaitu Surabaya Single Window (SSW). Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha
2. Pengembangan sistem pelayanan investasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung dunia usaha.

Capaian target indikator IKM Pelayanan Perijinan Penunjang Investasi dilaksanakan melalui program “Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi” dengan kegiatan sebagai berikut:

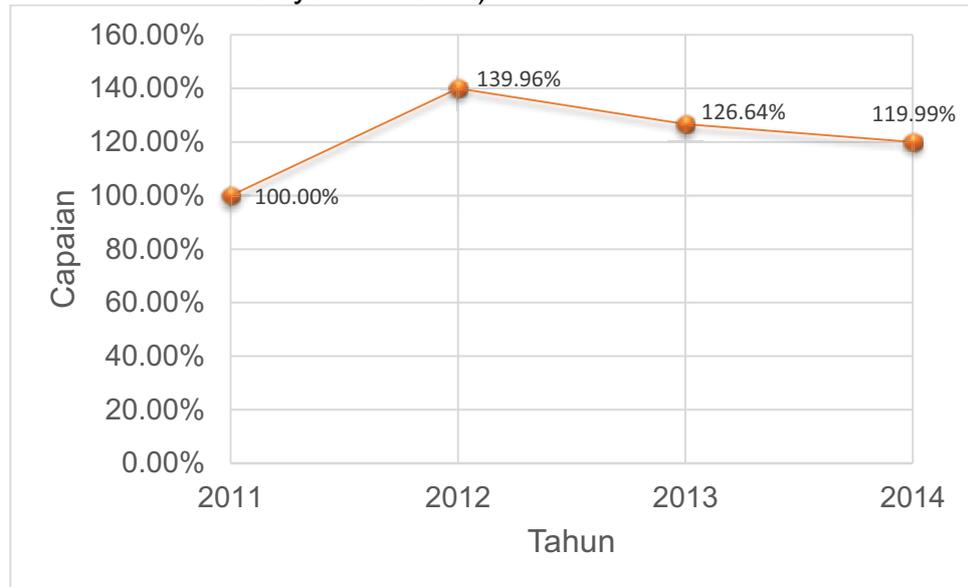
1. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi;
2. Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal;
3. Pelayanan UPTSA;
4. Penyusunan Pemetaan Potensi Investasi;
5. Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN;
6. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang mendukung investasi;
7. Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Investasi;
8. Penyelenggaraan Promosi Investasi.

b. Persentase Antara Jumlah Layanan Publik Berbasis TIK Dengan Jumlah Total Layanan Publik (108 Pelayanan Publik)

Pada tahun 2014 jumlah layanan publik berbasis TIK yang terbangun sebanyak 5 aplikasi, sehingga jumlah total layanan publik berbasis TIK di pemerintah kota Surabaya sampai tahun 2014 sebanyak 24 layanan publik, jika dibandingkan dengan jumlah total layanan publik (108 layanan publik) maka persentasenya adalah 22.22%. Dan Apabila dibandingkan dengan target persentase layanan publik yang berbasis TIK pada tahun 2014 adalah 18.52% (20 sistem) maka capaian kinerjanya adalah 119.99%. Perbandingan pencapaian target indikator persentase antara jumlah

layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.32.

Grafik III.32 Persentase Antara Jumlah Layanan Publik Berbasis TIK Dengan Jumlah Total Layanan Publik (108 Pelayanan Publik)



Dalam pemenuhan target tersebut upaya yang telah dilakukan antara lain melalui pembangunan sistem informasi pelayanan publik dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi ke pusat data. Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi” dengan kegiatan sebagai berikut:

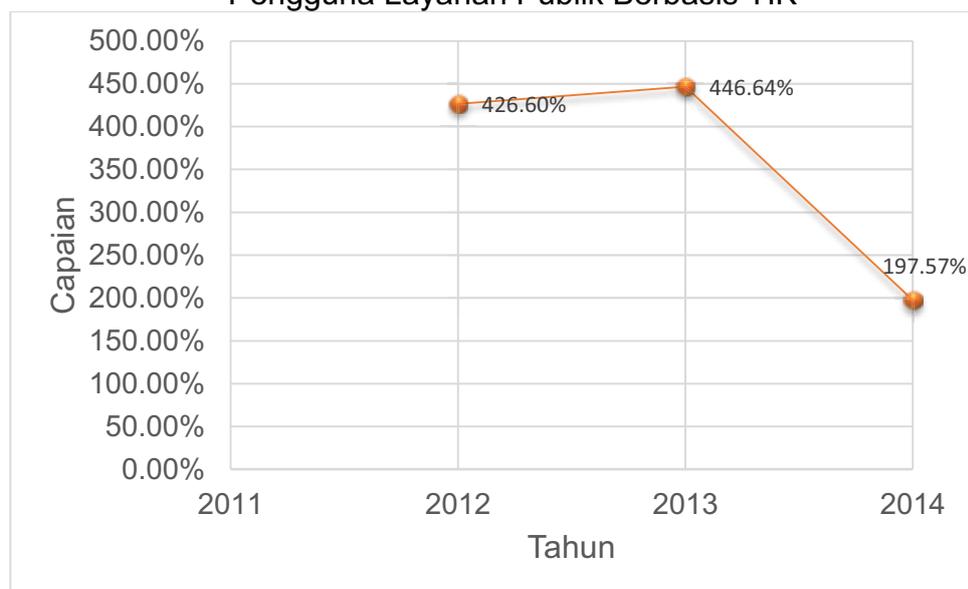
1. Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi;
2. Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi;
3. Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data;
4. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
5. Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi;
6. Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi;

7. Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi;
8. Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi;
9. Peningkatan dan Pendayagunaan Opensource Software;
10. Sosialisasi Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK.

c. Persentase Antara Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis Web Dengan Jumlah Total Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK

Jumlah pengguna layanan publik berbasis web di kota Surabaya pada tahun 2014 sebanyak 3.834 orang, jika dibandingkan dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK sebanyak 27.732 orang maka persentasenya 13.83%. Apabila dibandingkan dengan target pengguna layanan publik berbasis web pada tahun 2014 sebesar 7% maka capaian kerjanya adalah 197.57%. Capaian target indikator persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.33.

Grafik III.33 Persentase Antara Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis Web Dengan Jumlah Total Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK



Target pengguna layanan berbasis web berhasil melampaui target dan tidak menemui hambatan. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain melalui pelaksanaan Sosialisasi ke SKPD terkait, pembangunan dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

8. SASARAN MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 2 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.8 Sasaran Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase Peningkatan PAD			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	101.87%	107.68%	105.70%
2012	9.42%	20.84%	221.23%
2013	13.49%	22.46%	166.48%
2014	22.22%	18.42%	82.90%
Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	-15.46%	-12.31%	120.36%
2012	28.39%	25.75%	90.70%
2013	10.46%	3.78%	36.15%
2014	28.52%	29.75%	104.32%

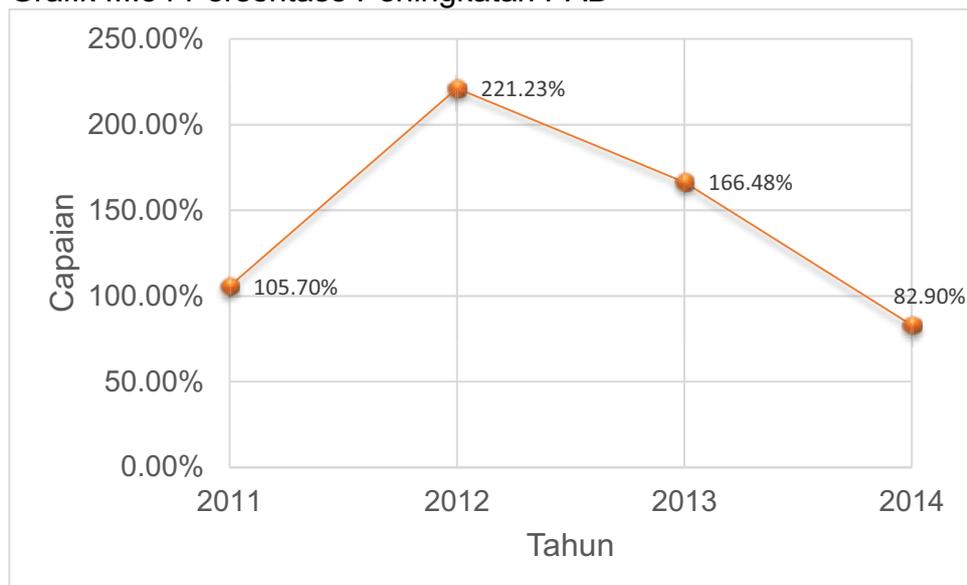
Rincian capaian indikator Sasaran Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Persentase Peningkatan PAD

Target Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sesuai Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 adalah Rp3.247.459.154.137,00 dan terealisasi sebesar Rp3.305.777.728.078,00 atau mencapai 101,80%. Dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 6,25% dan target penetapan kinerja sebesar 11,17%, target pada Perda mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan target ini disesuaikan dengan banyaknya potensi sumber-sumber PAD yang ada di Kota Surabaya.

Angka target 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 590.349.927.542,00 atau 22,22% dari tahun 2013 sebesar Rp2.657.109.226.595,00. Angka realisasi Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp514.197.677.369,00 atau 18,42% dari tahun 2013 sebesar Rp.2.791.580.050.710,00. Maka, capaian kinerjanya adalah 82,90%. Perbandingan pencapaian target PAD selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.34.

Grafik III.34 Persentase Peningkatan PAD



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

1. Masih banyak obyek pajak berupa tanah tanpa bangunan yang pemiliknya tidak jelas;
2. Masih banyak obyek pajak yang mempunyai NOP double atau fasum;
3. Masih terdapat data obyek pajak yang tidak valid karena luas obyek, nama dan alamat obyek pajak /wajib pajak yang tidak jelas;
4. Banyaknya piutang pajak yang belum melakukan pembayaran.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah menghasilkan output berupa 108 dokumen pendataan dan penetapan pajak daerah (Hotel, Restoran, Reklame, Hiburan, Penerangan Jalan, Parkir, Air Tanah, PBB, dan BPHTB);
2. Pengembangan Sistem Pajak Daerah yang meliputi sistem pendaftaran wajib pajak, sistem pelaporan pajak daerah, dan pengembangan sistem dalam rangka sinkronisasi data dengan Bank pemegang Rekening Kas Umum Daerah;
3. Kegiatan pengendalian dan pengawasan pajak daerah dilaksanakan 12 kali dalam setahun.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan;
2. Peningkatan fungsi pembinaan dalam pengembangan BUMD;
3. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Inventarisasi;
4. Evaluasi dan penghapusan aset/barang daerah;

5. Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan;
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung dan Perusahaan;
7. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
8. Pelayanan Pendaftaran Usaha Kepariwisataaan;
9. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan;
10. Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan;
11. Pengembangan Sistem dan Perencanaan pengelolaan keuangan daerah;
12. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak;
13. Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
14. Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD;
15. Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
16. Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
17. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA);
19. Penyusunan Bahan Anggaran Pendapatan dan Kas;
20. Pelaksanaan Penagihan, Pengurangan, Angsuran, Restitusi dan Kompensasi Pajak Daerah;
21. Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah;
22. Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya;
23. Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya;
24. Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);

25. Pelayanan UPTD Metrologi Legal;
26. Pelayanan UPTD Pasar Turi;
27. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah bidang perhubungan;
28. Pengelolaan Parkir.

b. Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya

Pada tahun 2014, penerimaan daerah lainnya Kota Surabaya mencapai Rp. 2.745.117.254.061,00 atau 94,57% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.902.735.058.765,00. Angka realisasi tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 301.403.587.856 atau 29,75% dari tahun 2013 sebesar Rp. 2.443.713.666.025,00 sehingga capaian kerjanya adalah 104,32%. Perbandingan pencapaian target indikator peningkatan penerimaan daerah lainnya selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.35.

Grafik III.35 Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini telah dilakukan upaya yaitu melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait bagi hasil untuk Kab/Kota.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan diatas.

9. SASARAN PENINGKATAN KEKAYAAN DAERAH

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 1 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Peningkatan Kekayaan Daerah mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.9 Sasaran Peningkatan Kekayaan Daerah

Jumlah Aset Pemkot yang Tersertifikat			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	557	539	96.77%
2012	582	552	94.85%
2013	612	566	92.48%
2014	647	580	89.64%

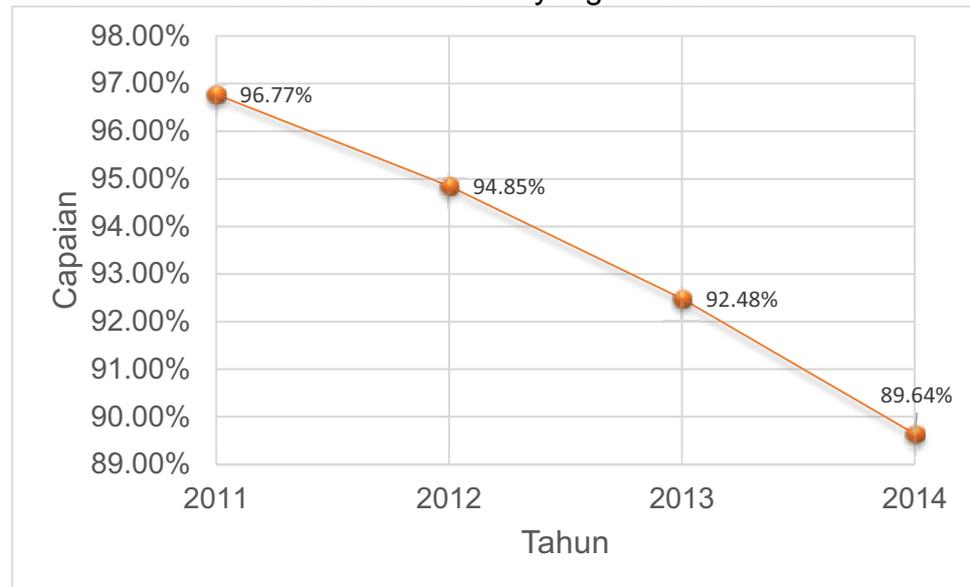
Rincian capaian indikator Sasaran Peningkatan Kekayaan Daerah tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Pemkot Yang Tersertifikat

Pada tahun 2014, jumlah aset pemerintah Kota Surabaya yang telah bersertifikat sebanyak 580 bidang atau 46.36% dari total aset pemerintah Kota Surabaya sebesar 1.251 bidang. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 647

bidang, maka capaian kerjanya adalah 89.64%. Perkembangan capaian target indikator jumlah aset Pemerintah Kota yang telah bersertifikat selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.36.

Grafik III.36 Jumlah Aset Pemkot yang Tersertifikat



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

1. Tidak adanya kelengkapan data / berkas pendukung (bukti kepemilikan) dalam proses sertifikasi;
2. Tidak adanya petunjuk batas yang pasti.

Namun demikian, terdapat dukungan dimana untuk pengajuan sertifikasi diperlukan data pendukung yakni bukti kepemilikan, Pertek/Penlok, Pengukuran oleh BPN, SP2D dan LHI untuk sekolah-sekolah yang merupakan pelimpahan dari pusat, Simbada, dan SP Walikota.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan BPN, Kelurahan, Bagian Perlengkapan dan SKPD terkait untuk status tanah.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah;
2. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah;
3. Pengamanan dan Monitoring Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Surabaya.

10. SASARAN MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 2 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.10 Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja

Persentase Penempatan Pencari Kerja Pada Pasar Kerja			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	2.00%	3.90%	195.00%
2012	4.00%	3.92%	97.89%
2013	5.00%	5.20%	104.00%
2014	5.00%	5.01%	100.20%
Persentase Penyelesaian Sengketa Pekerja-Pengusaha			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	72.00%	72.77%	101.07%
2012	73.00%	75.26%	103.10%
2013	74.00%	75.76%	102.38%
2014	75.00%	80.87%	107.83%

Rincian capaian indikator Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Persentase Penempatan Pencari Kerja Pada Pasar Kerja

Pada awal tahun 2014 dari 71.997 orang pencari kerja, sebanyak 3.744 orang atau 5,01% telah berhasil ditempatkan pada pasar kerja. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5%, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 100,20%. Perkembangan capaian target indikator persentase penempatan pencari kerja pada pasar kerja selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.37.

Grafik III.37 Persentase Penempatan Pencari Kerja Pada Pasar Kerja



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Peningkatan Kesempatan Kerja” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
2. Penyiapan tenaga kerja siap pakai;
3. Pengembangan kelembagaan produktifitas dan kewirausahaan;
4. Pelatihan usaha mandiri berbasis masyarakat;
5. Identifikasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan;
6. Pengembangan produktifitas kerja;

7. Pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja swasta dan perusahaan pengguna tenaga kerja asing.

b. Persentase Penyelesaian Sengketa Pekerja-Pengusaha

Pada tahun 2014 terdapat 366 kasus sengketa pekerja pengusaha, dimana 296 kasus telah diselesaikan atau 80,87%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75%, maka capaian kerjanya adalah 107,83%. Perbandingan pencapaian target indikator persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.38.

Grafik III.38 Persentase Penyelesaian Sengketa Pekerja-Pengusaha



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan, yaitu:

1. Rasio antara ketersediaan petugas pengantar kerja dengan pencari kerja tidak memadai yaitu perbandingan 1 petugas melayani \pm 1513 pencari kerja;
2. Pelatihan yang telah dilaksanakan kurang dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dikarenakan pelatihan tersedia

merupakan bentuk pelatihan dasar. Meskipun demikian, terdapat dukungan berupa komunikasi dan kerjasama yang baik dengan HRD perusahaan pengguna tenaga kerja, koordinasi yang baik dengan kecamatan, kelurahan, LKMK, RT/RW Se Kota Surabaya dalam rangka distribusi informasi kesempatan kerja dan pelatihan, perusahaan pengguna tenaga kerja sebagai elemen dalam pasar kerja serta Instansi terkait dengan informasi ketenagakerjaan.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Petugas dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan instansi/pihak terkait Pasar Kerja;
3. Membuat kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas keterampilan pencari kerja;
4. Memberikan bantuan sarpras kepada pencari kerja dengan tujuan mampu berwirausaha;
5. Mengadakan evaluasi kebutuhan pasar kerja.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
2. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan social ketenagakerjaan;
3. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;
4. Pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

11. SASARAN MENINGKATNYA DAYA SAING EKONOMI LOKAL BERBASIS KOMUNITAS

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 6 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal Berbasis Komunitas mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.11 Sasaran Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal Berbasis Komunitas

Jumlah Kelompok Skala Mikro Kecil yang Memiliki Daya Saing			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	29	34	117.24%
2012	39	39	100.00%
2013	49	49	100.00%
2014	59	60	101.69%
Peningkatan Jumlah Koperasi Berkualitas			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	172	172	100.00%
2012	172	172	100.00%
2013	172	192	111.63%
2014	172	306	177.91%
Peningkatan Jumlah Kelembagaan Baru Koperasi yang Terbentuk			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	10	30	300.00%
2012	30	80	266.67%
2013	30	30	100.00%
2014	30	54	180.00%

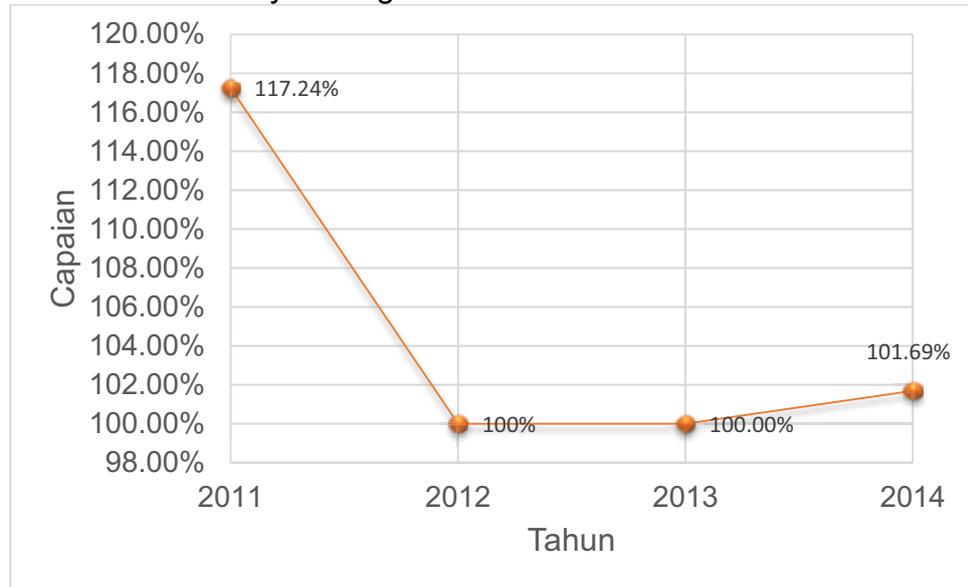
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	162869	279230	171.44%
2012	179835	323037	179.63%
2013	185353	350017	188.84%
2014	190872	742084	388.79%
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	7656584	9194116	120.08%
2012	7869775	9561881	121.50%
2013	8082966	11122194	137.60%
2014	8296157	15929745	192.01%
Jumlah Sentra PKL yang Memiliki Daya Saing Usaha			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	15	15	100.00%
2012	26	19	73.08%
2013	31	31	100.00%
2014	36	26	72.22%

Rincian capaian indikator Sasaran Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal Berbasis Komunitas tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Kelompok Skala Mikro Kecil Yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2014, jumlah kelompok skala mikro-kecil yang memiliki daya saing sebanyak 60 kelompok. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 59 kelompok, maka capaian kerjanya adalah 101,69%. Perkembangan capaian target indikator jumlah kelompok skala mikro-kecil yang memiliki daya saing 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.39.

Grafik III.39 Jumlah Kelompok Skala Mikro Kecil yang Memiliki Daya Saing



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan, yaitu:

1. Keterbatasan modal;
2. Pembelian bahan baku harus secara tunai;
3. Pemasaran terbatas pada daerah-daerah tertentu;
4. Sulit memperoleh pembeli konsumen baru;
5. Margin keuntungan yang semakin rendah;
6. Pembeli sebagai penentu harga;
7. Lambatnya pembayaran hasil penjualan produk;
8. Tidak dimilikinya desainer sendiri;
9. Harga bahan baku yang terus meningkat;
10. Ketergantungan pada pembeli;
11. Produktivitas mesin peralatan rendah;
12. Menurunnya omzet penjualan;
13. Peniruan desain produk merek oleh perusahaan lain;
14. Segmen pasar kalangan menengah ke bawah;
15. Sulitnya melakukan diversifikasi bahan baku;
16. Tata letak pabrik yang kurang efisien;

17. Pelaksanaan pembangunan sentra pada kegiatan penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan asongan masih belum dapat terlaksana akibat adanya kendala lahan (masih ditempati warga);
18. Belum terlaksananya pembinaan pedagang pada kegiatan pengawasan mutu dagangan PKL di sentra wisata karena masih terdapat pembangunan sentra, sehingga aktivitas di sentra belum ada (masih tahap sosialisasi pedagang yang akan menempati sentra);
19. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah belum optimal;
20. Masih adanya warga yang enggan menghadiri sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi, peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber-RAT, dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi aktif belum RAT karena masih bekerja atau mempunyai kesibukan lain pada waktu yang bersamaan.
21. Kegiatan revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber-RAT tidak tercapai karena koperasi yang bersangkutan memilih untuk aktif kembali dan meminta penyuluhan maupun sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Namun demikian terdapat dukungan berupa ketersediaan biaya, tenaga pendamping dan adanya semangat masyarakat untuk berkoperasi.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi pengembangan sentra-sentra industri potensial.
2. Fasilitasi pengembangan UKM;
3. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industry;
4. Penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri;
5. Para UKM dapat memanfaatkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) agar dapat membentuk koperasi yang berbadan usaha

- dan koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak perbankan untuk pemberian kredit pada anggota;
6. Membangun kepercayaan dan bernegosiasi dengan supplier yang dapat menguntungkan kedua belah pihak;
 7. Melakukan fasilitasi pemasaran produk dengan memperluas wilayah pemasaran dengan cara berkerjasama dengan agen-agen penjualan diluar daerah dengan tidak meninggalkan kualitas produk yang harus dipenuhi;
 8. Memfasilitasi UKM dengan melakukan promosi bersama-sama, dengan cara mendirikan pusat penjualan UKM, serta merekomendasikan konsumen untuk menggunakan produk-produk UKM;
 9. Memfasilitasi UKM untuk beralih ke segmen pasar yang lebih atas agar tidak terlalu sensitif dengan harga dan menjaga kualitas produk agar tetap meyakinkan;
 10. Memfasilitasi UKM untuk beralih ke segmen pasar yang tidak banyak digarap oleh orang (ceruk pasar) agar dapat menjadi penentu harga;
 11. Memberikan pelatihan pada UKM tentang strategi penjualan misalnya dengan memberikan diskon untuk pembayaran dengan tunai atau pembayaran dalam tempo yang lebih cepat;
 12. Memberikan fasilitasi pelatihan bagi staf perusahaan yang memiliki bakat dan keterampilan khusus;
 13. Membantu UKM dengan melakukan diversifikasi bahan baku dan subsidi harga dengan bahan baku jika produknya digunakan masyarakat banyak;
 14. Memberikan fasilitas pemasaran produk untuk wilayah-wilayah yang lain;
 15. Memberikan fasilitasi alat bagi UKM;
 16. Memfasilitasi UKM dengan konsumen-konsumen baru, serta memperluas wilayah pemasaran, memperluas segmentasi pasar, memperbaiki kualitas dan desain produk;

17. Memfasilitasi produk-produk UKM dengan merk/desain produk;
18. Memperluas pemasaran produk ke segmen pasar kalangan menengah dan atas dengan tetap memperhatikan spesifikasi produk agar memenuhi standar yang telah ditetapkan;
19. Memfasilitasi UKM dengan memperkenalkan bahan-bahan baru yang telah diujicobakan oleh balai penelitian terkait;
20. Memberikan sosialisasi pada para UKM tentang penataan ulang tata letak pabrik/tempat usaha (produksi) dengan tetap memperhatikan faktor-faktor keamanan, keselamatan kerja (K3) dan efisiensi ruang.

Capaian indikator jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing dilaksanakan melalui program “Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah” dengan kegiatan sebagai berikut:

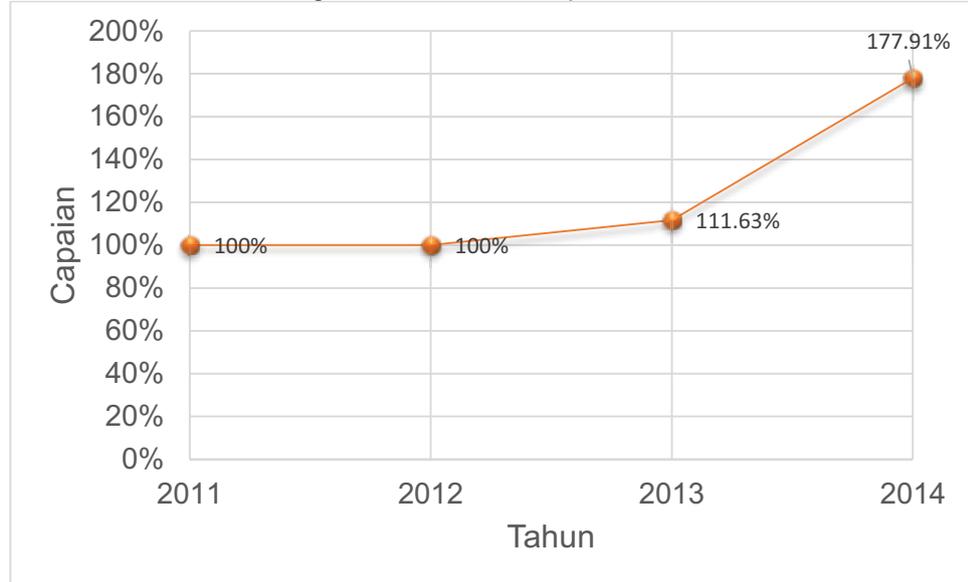
1. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah;
2. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah;
3. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM;
4. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga;
5. Fasilitasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
6. Fasilitasi Pengembangan bagi 380 UKM;
7. Pemberian dan Penerbitan Perijinan Perdagangan dan Industri;
8. Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan;
9. Penerbitan Surat Keterangan dan Pemberian Rekomendasi Perdagangan;
10. Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri.

b. Peningkatan Jumlah Koperasi Berkualitas

Pada tahun 2014 dari total 1.295 koperasi aktif di Surabaya, sebanyak 306 unit diantaranya adalah koperasi berkualitas. Didibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 172 unit maka capaian kinerjanya adalah 177,91%. Perbandingan

pencapaian target indikator peningkatan jumlah koperasi berkualitas 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.40.

Grafik III.40 Peningkatan Jumlah Koperasi Berkualitas



Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator peningkatan jumlah koperasi berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan yang lebih memantapkan ataupun mengoptimalkan sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM;
2. Memberikan sosialisasi kepada personil dinas dan masyarakat tentang koperasi dan UMKM;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian indikator jumlah koperasi berkualitas dilaksanakan melalui program “Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian;
2. Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru;
3. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif;

4. Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber-RAT;
5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif belum RAT;
6. Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber-RAT;
7. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.

c. Peningkatan Jumlah Kelembagaan Baru Koperasi Yang Terbentuk

Pada tahun 2014, jumlah koperasi di Surabaya adalah sebanyak 1.637 unit atau meningkat sebanyak 54 unit dari 1.583 unit pada tahun 2013. Dari jumlah tersebut, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: murni inisiasi masyarakat (sebanyak 23 unit) dan hasil intervensi secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota (sebanyak 31 unit). Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 30 unit, maka capaian kerjanya adalah 180.00%. Perbandingan pencapaian target indikator peningkatan jumlah kelembagaan koperasi yang terbentuk selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.41.

Grafik III.41 Peningkatan Jumlah Kelembagaan Baru Koperasi yang Terbentuk



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan, yaitu:

1. Untuk pelaksanaan pembangunan sentra pada kegiatan penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan asongan, masih ada lahan atau lokasi yang masih belum bisa untuk diadakan pembangunan karena terkendala lahan (masih ditempati warga);
2. Untuk pembinaan pedagang pada kegiatan pengawasan mutu dagangan PKL di sentra wisata kuliner tidak tercapai karena masih terdapat pembangunan sentra, sehingga aktivitas di sentra belum ada (masih tahap sosialisasi pedagang yang akan menempati sentra);
3. Kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah tidak mencapai target disebabkan ada beberapa event yang tidak ada pelaksanaannya pada 2014 dan event lain bersamaan;
4. Kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi, peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber-RAT, dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi aktif belum RAT tidak tercapai karena beberapa warga tidak menghadiri undangan yang diadakan disebabkan masih bekerja dan ada yang mempunyai kesibukan lain pada waktu yang bersamaan;
5. Kegiatan revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber-RAT tidak tercapai karena koperasi yang bersangkutan memilih untuk aktif kembali dan meminta penyuluhan maupun sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM (deskripsi kegiatan revitalisasi adalah membina koperasi yang tidak aktif dan tidak ber-RAT).

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan yang lebih memantapkan ataupun mengoptimalkan sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM.

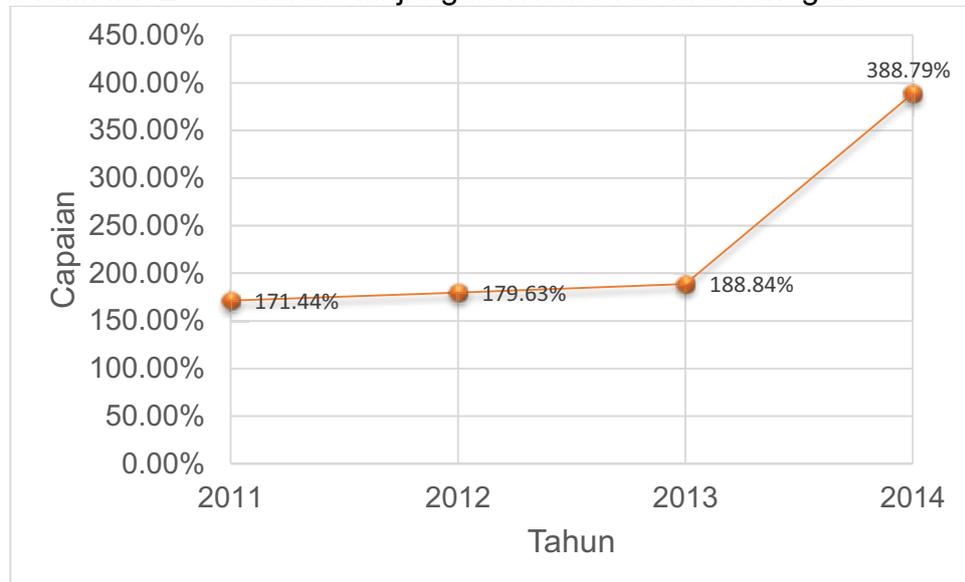
2. Memberikan sosialisasi kepada personil dinas dan masyarakat tentang koperasi dan UMKM.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan kegiatan.

Capaian indikator ini didukung dengan pelaksanaan program “Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

d. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Pada tahun 2014, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia adalah sebanyak 742.084 orang. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 190.872 wisatawan, maka capaian kinerjanya adalah 388,79%. Perbandingan pencapaian target indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.42.

Grafik III.42 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu

1. Belum optimalnya kondisi pelayanan maupun sarana prasarana yang terdapat pada destinasi wisata di Kota Surabaya;
2. Belum optimalnya pemasaran produk seni budaya lokal dan pariwisata yang terdapat di Kota Surabaya.

Namun demikian terdapat dukungan dari instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan Asosiasi berbagai Usaha Pariwisata yang ada di Surabaya.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diadakannya Forum Komunikasi pengelola obyek wisata secara berkala.
2. Diadakannya Surabaya Tourism Destination Award untuk menggugah pengelola obyek wisata agar makin meningkatkan kualitas pelayanan maupun sarana prasarana yang terdapat di masing-masing obyek.
3. Dijalinnya kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, instansi terkait dan stake holder pariwisata untuk lebih meningkatkan promosi produk seni budaya lokal dan pariwisata Kota Surabaya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pencapaian indikator peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dilaksanakan melalui program “Pengembangan Pemasaran Pariwisata” dengan kegiatan sebagai berikut:

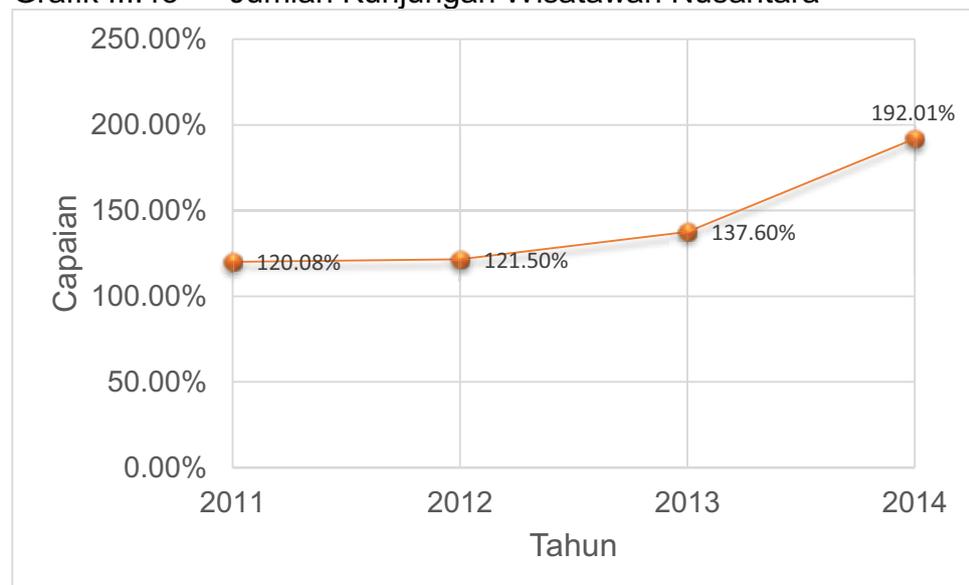
1. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata;
2. Penyelenggaraan Festival Kuliner;
3. Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata;
4. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri;
5. Pelayanan Perijinan Kepariwisata;
6. Penyusunan Direktori Pariwisata Kota Surabaya;

7. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata Ampel;
8. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata Balai Pemuda dan GNI;
9. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata Kenjeran dan Kalimas;
10. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata THR;
11. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata Tugu Pahlawan dan Museum 10 Nopember;
12. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pariwisata.

e. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Pada tahun 2014 jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Surabaya sebanyak 15.929.745 orang. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 8.296.157 wisatawan, maka capaian kinerjanya adalah 192.01%. Perbandingan pencapaian target indikator jumlah kunjungan wisatawan nusantara selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.43.

Grafik III.43 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

1. Belum optimalnya kondisi pelayanan maupun sarana prasarana yang terdapat pada destinasi wisata di Kota Surabaya;
2. Belum optimalnya pemasaran produk seni budaya lokal dan pariwisata yang terdapat di Kota Surabaya.

Namun demikian terdapat dukungan dari instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan Asosiasi berbagai Usaha Pariwisata yang ada di Surabaya.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diadakannya Forum Komunikasi pengelola obyek wisata secara berkala.
2. Diadakannya Surabaya Tourism Destination Award untuk menggugah pengelola obyek wisata agar makin meningkatkan kualitas pelayanan maupun sarana prasarana yang terdapat di masing-masing obyek.
3. Dijalinnya kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, instansi terkait dan stake holder pariwisata untuk lebih meningkatkan promosi produk seni budaya lokal dan pariwisata Kota Surabaya, baik di dalam maupun di luar negeri.

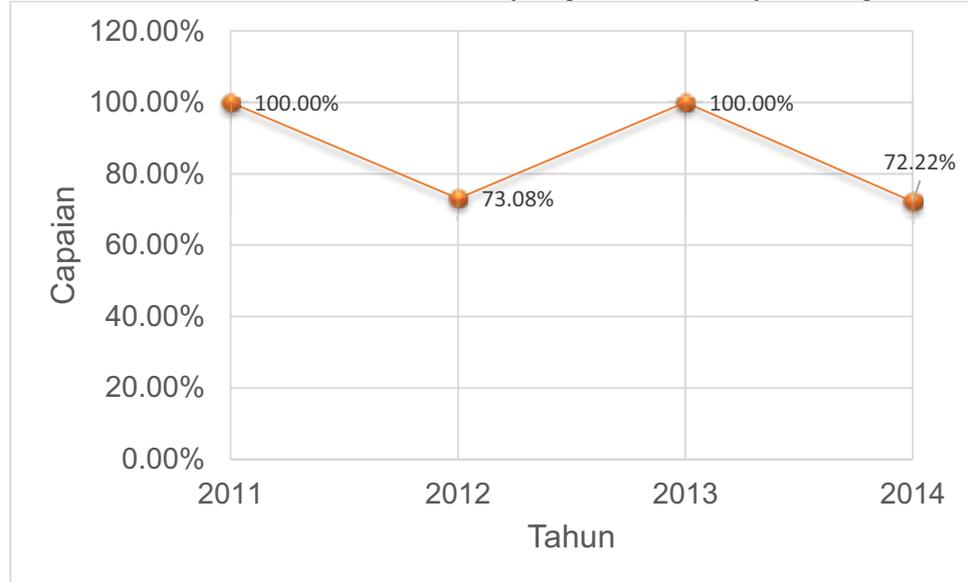
Pencapaian indikator peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dilaksanakan melalui “Pengembangan Pemasaran Pariwisata” sebagaimana telah diuraikan di indikator sebelumnya.

f. Jumlah Sentra PKL Yang Memiliki Daya Saing Usaha

Pada tahun 2014, dari 37 sentra PKL yang terbangun, sebanyak 26 sentra telah memiliki daya saing usaha. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 36 sentra, maka capaian kerjanya adalah 72,22%. Perkembangan capaian target

indikator jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.44.

Grafik III.44 Jumlah Sentra PKL yang Memiliki Daya Saing Usaha



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan, yaitu:

1. Untuk pelaksanaan pembangunan sentra pada kegiatan penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan asongan, masih ada lahan atau lokasi yang masih belum bisa untuk diadakan pembangunan karena terkendala lahan (masih ditempati warga).
2. Untuk pembinaan pedagang pada kegiatan pengawasan mutu dagangan PKL di sentra wisata kuliner tidak tercapai karena masih terdapat pembangunan sentra, sehingga aktivitas di sentra belum ada (masih tahap sosialisasi pedagang yang akan menempati sentra).
3. Kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah tidak mencapai target disebabkan ada beberapa event yang tidak ada pelaksanaannya pada 2014 dan event lain bersamaan.

4. Kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi, peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber-RAT, dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi aktif belum RAT tidak tercapai karena beberapa warga tidak menghadiri undangan yang diadakan disebabkan masih bekerja dan ada yang mempunyai kesibukan lain pada waktu yang bersamaan.
5. Kegiatan revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber-RAT tidak tercapai karena koperasi yang bersangkutan memilih untuk aktif kembali dan meminta penyuluhan maupun sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM (deskripsi kegiatan revitalisasi adalah membina koperasi yang tidak aktif dan tidak ber-RAT).

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan yang lebih memantapkan ataupun mengoptimalkan sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM.
2. Memberikan sosialisasi kepada personil dinas dan masyarakat tentang koperasi dan UMKM.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian indikator jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha dilaksanakan melalui program “Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan;
2. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan;
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sentra PKL;
4. Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan.

12. SASARAN TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG TERPADU

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 1 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Terpadu mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.12 Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Terpadu

Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	100.00%	75.00%	75.00%
2012	100.00%	100.00%	100.00%
2013	100.00%	100.00%	100.00%
2014	100.00%	100.00%	100.00%

Rincian capaian indikator Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Terpadu tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pada tahun 2014, dari 4 dokumen perencanaan yang disusun seluruhnya telah diselesaikan tepat waktu (waktu keterlambatan dibawah 15). Adapun standar yang digunakan dalam penghitungan indikator ini adalah menggunakan tenggat waktu. Beberapa hal yang dijadikan patokan dalam penghitungan capaian pada indikator ini adalah:

- a. Tenggat waktu yang dijadikan penghitungan adalah tenggat waktu yang tertera dalam aturan-aturan sebagai berikut:
 1. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015 **paling lambat minggu pada keempat bulan Mei 2014** sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
2. Penyampaian dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD **paling lambat pada pertengahan bulan Juni 2014** sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 3. Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 **paling lambat pada minggu keempat bulan Juli 2014** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 4. Penyampaian dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD **paling lambat pada minggu pertama Agustus 2014** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- b. Satuan penghitungan target dan realisasi yang digunakan adalah satuan minggu dalam setahun.
 - c. Asumsi yang digunakan untuk mengelompokkan adalah dengan menggunakan persentase realisasi dokumen tepat waktu adalah $\geq 85\%$ atau waktu keterlambatan dibawah 15% (1 tahun = 52 minggu).

Berdasarkan asumsi tersebut diatas, maka bisa dihitung realisasi dokumen perencanaan yang tepat waktu dari jumlah seluruh dokumen perencanaan yang disusun. Dari 4 dokumen perencanaan yang disusun semuanya sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan yaitu Penetapan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan RKPD Tahun 2014, Penyampaian dokumen Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2015 serta Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD. Sehingga jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kerjanya adalah 100%. Perkembangan capaian target indikator persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.45.

Grafik III.45 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan



Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Sinkronisasi yang intensif antara penyusunan ke perubahan tahun 2014 yaitu : Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014 dan KUA PPAS Perubahan tahun 2014 sebagai dasar penyusunan

- dokumen perubahan APBD 2014. Hal yang sama dilakukan untuk dokumen RKPD 2015 dan KUA PPAS 2015;
2. Manajemen waktu yang baik;
 3. Koordinasi secara internal antar bidang dalam Bappeko serta koordinasi eksternal dengan SKPD terkait dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan;
 4. Pelaksanaan kegiatan oleh Bappeko yang menghasilkan output sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 5. Sinkronisasi yang intensif antara penyusunan dokumen perencanaan perubahan tahun 2014 yaitu dokumen Perubahan RKPD tahun 2014 dan KUPA-PPAS Perubahan tahun 2014 sebagai dasar penyusunan dokumen Perubahan APBD 2014. Hal yang sama dilakukan untuk dokumen RKPD 2015 dan KUA-PPAS 2015;
 6. Manajemen waktu yang baik menjadi salah satu kunci tercapainya penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu;
 7. Koordinasi secara internal antar bidang dalam Bappeko serta koordinasi eksternal dengan SKPD terkait dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan;
 8. Upaya ini juga didukung pelaksanaan kegiatan oleh Bappeko yang menghasilkan output sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi khusus;
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota;
3. Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan;

4. Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;
5. Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan;
6. Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Penyelenggaraan dan Fasilitasi Musrenbang RKPD;
8. Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
9. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya;
10. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
11. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD;
13. Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan;
14. Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan;
15. Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan;
16. Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial;
17. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
18. Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya;
19. Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD;
20. Penyusunan Dokumen Rencanan Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya;
21. Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD;
22. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan;
23. Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan;
24. Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
25. Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan;

26. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perekonomian Kota Surabaya;
27. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

13. SASARAN PENINGKATAN TARAF HIDUP DAN KESEJAHTERAAN

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 3 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.13 Sasaran Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan

Jumlah Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	1487	3347	225.08%
2012	1487	1500	100.87%
2013	1487	1490	100.20%
2014	1487	1655	111.30%
Pola Pangan Harapan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	86.71	87.60	101.03%
2012	88.78	88.91	100.15%
2013	90.85	90.88	100.03%
2014	92.92	92.93	100.01%
Terbentuknya Sentra Produk Pertanian			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	-	-	-
2012	22	22	100.00%
2013	26	26	100.00%
2014	30	30	100.00%

Rincian capaian indikator Sasaran Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Keluarga Miskin Yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif

Pada tahun 2014, jumlah keluarga miskin yang telah mendapatkan pemberdayaan ekonomi sebanyak 9.816 orang, sebanyak 1.655 orang telah melakukan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Jenis usaha ekonomi produktif yang telah dilakukan terdiri dari bidang usaha *handycraft*, menjahit, makanan dan aneka produk rumah tangga. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 1.487 orang, maka capaian kinerjanya adalah 111,30%. Perbandingan pencapaian target indikator jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.46.

Grafik III.46 Jumlah Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu pemasangan produk KSM yang masih kurang aktif.

Namun demikian terdapat dukungan dari kader Pemberdayaan Masyarakat dan KSM yang berperan aktif dalam usaha ekonomi produktif.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi yang dilakukan secara terus menerus kepada KSM yang sudah dibentuk melalui Stand Mall dan Even Pameran
2. Pelatihan Manajemen dan Desain Produk (Kemasan) kepada KSM.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Penanggulangan Kemiskinan” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Bulan Bhakti Gotong Royong;
2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
3. Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) di 31 Kecamatan
4. Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro;
5. Pemberdayaan Ekonomi;
6. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan;
7. Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan;
8. Dinamisasi Data Keluarga Miskin;
9. Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan;
10. Monitoring dan Pendataan Kemiskinan.

b. Pola Pangan Harapan

Pada tahun 2014, capaian Pola Pangan Harapan Kota Surabaya adalah sebesar 92.93%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2014 sebesar 92.92%, maka capaian kinerjanya adalah 100.01%. Perkembangan capaian target indikator Pola Pangan Harapan selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.47.

Grafik III.47 Pola Pangan Harapan



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

1. Keberlanjutan setelah panen tergantung dari minat kelompok
2. Data penerima bantuan seringkali berubah sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya;
3. Menyempitnya lahan pertanian yang sudah banyak alih fungsi.

Namun demikian, terdapat dukungan yang disebabkan oleh Surabaya sebagai pusat konsumen dan perdagangan komoditas pangan menjadikan mudah untuk mendapatkan pelbagai jenis bahan pangan dan minat masyarakat terhadap budaya pangan lokal.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada kelompok penerima bantuan untuk menaga keberlangsungan bantuan;
2. Koordinasi dan verifikasi data dengan penerima bantuan sehingga data yang diterima bias lebih akurat;

3. Memaksimalkan lahan perkotaan yang telah ada dengan semaksimal mungkin sehingga dapat meningkatkan pemenuhan gizi keluarga sekaligus mengentas kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

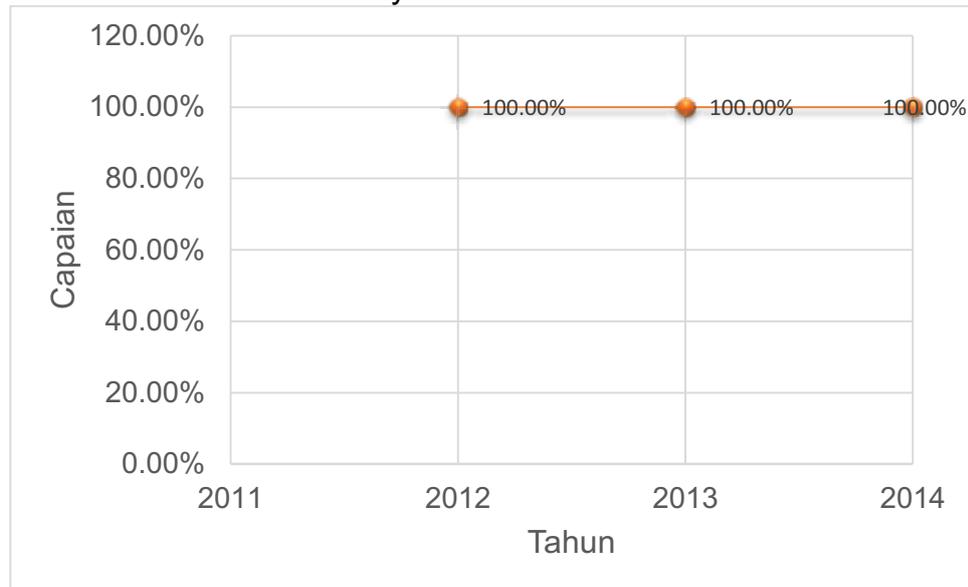
Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan;
2. Pengembangan Perikanan;
3. Pengembangan perbenihan/perbibitan;
4. Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan;
5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
6. Penyuluhan sumber pangan alternative;
7. Monitoring Ketersediaan dan Keamanan Pangan’
8. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak;
9. Promosi Hasil Pengelolaan Pangan Lokal.

c. Terbentuknya Sentra Produk Pertanian

Pada tahun 2014, jumlah sentra produk pertanian di Kota Surabaya sebanyak 30 Sentra. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 30 sentra, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Perbandingan pencapaian target indikator terbentuknya sentra produk pertanian selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.48.

Grafik III.48 Terbentuknya Sentra Produk Pertanian



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

1. Masyarakat penerima bantuan ternak masih menganggap bahwa peternakan masih dijadikan pekerjaan sampingan;
2. Kemampuan produksi pertanian Kota Surabaya semakin berkurang disebabkan luas lahan pertanian (sawah), selain tidak terlalu luas, juga makin lama lahan yang ada makin menyusut, karena banyak yang berubah fungsi, misalnya menjadi lahan perumahan atau untuk industri.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penerima bantuan diseleksi yang benar-benar berminat pada sektor peternakan;
2. Memaksimalkan potensi bidang pertanian di Kota Surabaya kearah pemanfaatan pekarangan dengan komoditas hortikultura (tanaman sayuran semusim, buah atau tanaman hias).

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Peningkatan Kesejahteraan Petani” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Agribisnis Peternakan;
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Peternakan;
3. Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
4. Peningkatan Sumber Daya Pertanian;
5. Pengembangan Agribisnis Pertanian;
6. Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan.

14. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS DAN KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA KOTA

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 16 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Kota mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.14 Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Kota

Lama Jam Sibuk			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	6 jam 37 menit	6 jam 36 menit	100.25%
2012	6 jam 37 menit	6 jam 34 menit	100.25%
2013	6 jam 37 menit	6 jam 30 menit	101.76%
2014	6 jam 37 menit	6 jam 30 menit	101.76%
Luas Wilayah Genangan (Ha)			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	2387	2213	107.29%
2012	2291	1613.779	129.56%
2013	2199	1371.712	137.62%
2014	2111	1303.13	138.27%

Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	60	54	110.00%
2012	60	58	103.33%
2013	60	57.636	103.94%
2014	60	54.75	108.75%
Rata-rata Tinggi Genangan yang Terjadi (cm)			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	20	18.64	106.80%
2012	20	19.66	101.70%
2013	20	17.707	111.47%
2014	20	17	115.90%
Persentase Cakupan Layanan Air Bersih			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	74.57%	83.49%	111.96%
2012	83.45%	86.88%	104.11%
2013	85.28%	90.02%	105.56%
2014	88.06%	92.64%	105.20%
Jumlah MBR yang Telah Mendapatkan Manfaat Rumah Layak Huni (KK)			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	480	384	80.00%
2012	2785	2985	107.18%
2013	3073	3111	101.24%
2014	3361	3242	96.46%
Luas Kawasan Kumuh yang Mendapat Peningkatan Layanan Prasarana Permukiman (Ha)			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	220	164.50	74.77%
2012	316	325.52	103.01%
2013	412	405.11	98.33%
2014	508	510.91	100.57%

Rasio Angka Ketersediaan Makam Selama Lima Tahun ke Depan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	0.21	0.21	100.00%
2012	0.26	0.16	138.46%
2013	0.33	0.18	144.47%
2014	0.47	0.21	155.32%
Pencapaian Waktu Tanggap Kurang <15 Menit			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	73.00%	83.33%	114.15%
2012	76.00%	80.33%	105.70%
2013	79.00%	96.00%	121.52%
2014	82.00%	89.93%	109.67%
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	79.00%	82.26%	104.13%
2012	83.00%	89.64%	108.00%
2013	87.00%	89.64%	103.03%
2014	91.00%	92.56%	101.71%
Rasio Panjang Jalan yang Sudah Mendapatkan Penerangan Terhadap Seluruh Panjang Jalan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	82.99%	74.49%	89.76%
2012	76.55%	80.46%	105.11%
2013	79.95%	86.56%	108.27%
2014	83.36%	94.54%	113.41%
Kecepatan Rata-rata Kendaraan (km/jam) Pada Jalan Arteri Primer			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	23.73	26.22	110.49%
2012	23.73	26.99	113.74%
2013	23.73	27.84	117.32%
2014	23.73	31.23	131.61%

Kecepatan Rata-rata Kendaraan (km/jam) Pada Jalan Arteri Sekunder			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	21.47	30.56	142.34%
2012	21.47	30.49	142.01%
2013	21.47	28.53	132.88%
2014	21.47	28.75	133.91%
Headway Angkutan Umum (menit) untuk Mikrolet			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	14.72	17.21	83.08%
2012	14.72	24.18	35.73%
2013	14.72	24.84	31.25%
2014	14.72	25.91	23.98%
Headway Angkutan Umum (menit) untuk Biskota			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	32.41	35.12	91.64%
2012	32.41	41.59	71.68%
2013	32.41	42.73	68.16%
2014	20.00	43.12	-15.60%
Persentase Luas RTH yang Berfungsi Optimal Terhadap Keseluruhan Luas RTH yang Ada			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	20.60%	22.11%	107.33%
2012	30.40%	27.35%	89.97%
2013	40.26%	28.25%	70.17%
2014	47.37%	32.76%	69.17%

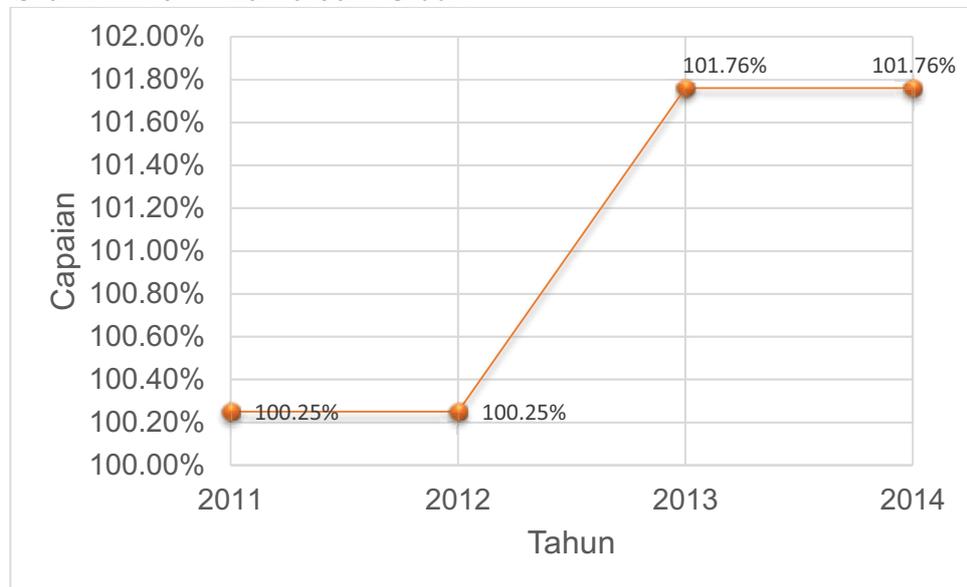
Rincian capaian indikator sasaran strategis meningkatnya kualitas hidup warga kota tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Lama Jam Sibuk

Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata jam sibuk di kota Surabaya selama tahun 2014 adalah 6 jam 30 menit. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6 jam

37 menit, maka capaian kerjanya adalah 101,76%. Perkembangan capaian target indikator kinerja lama jam sibuk dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.49.

Grafik III.49 Lama Jam Sibuk



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan, yaitu:

1. Peningkatan jumlah volume kendaraan;
2. Hampir semua perkantoran/pabrik masuk kerja dan pulang kerja pada waktu yang sama..

Namun demikian terdapat dukungan dengan adanya jalan-jalan baru yang lebar di beberapa wilayah dan rambu lalu lintas serta lampu merah di persimpangan jalan yang berfungsi dengan baik.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi hambatan samping di sisi kiri/kanan jalan;
2. Mengoptimalkan pembangunan Jalan Lingkar Luar dan Frontage road untuk memecah konsentrasi kemacetan;
3. Satgas pemeliharaan jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak.
4. Terdapat jalan baru yang lebar di beberapa wilayah;

5. Adanya rambu lalu lintas, dan lampu merah dipersimpangan jalan yang berfungsi dengan baik;

Capaian indikator lama jam sibuk dilaksanakan melalui program “Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan” dengan kegiatan sebagai berikut:

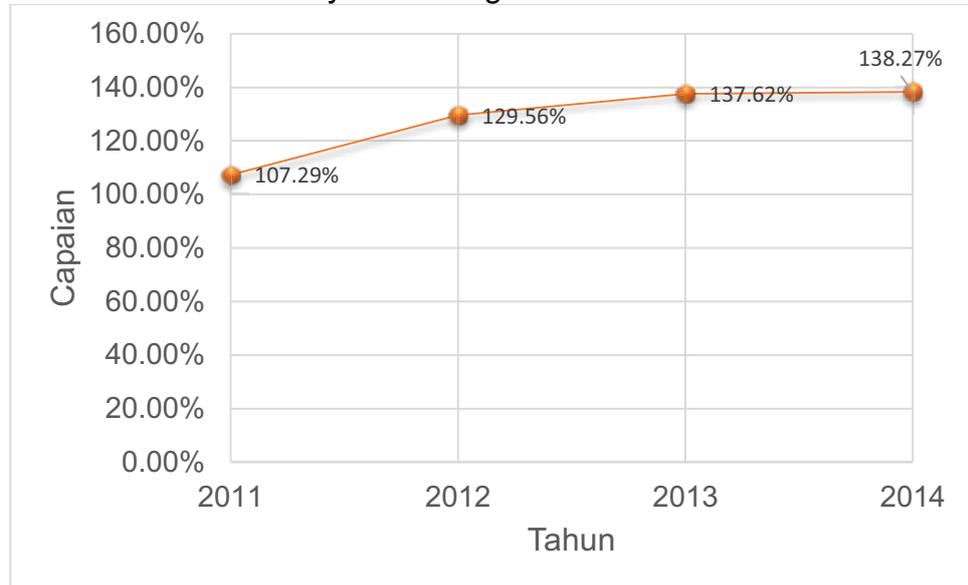
1. Pembangunan/Peningkatan Jalan;
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan;
4. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan;
5. Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan;
6. Pengadaan Tanah;
7. Pembangunan Kelengkapan Jalan;
8. Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut;
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan;
10. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
11. Koordinasi Jaringan Utilitas;
12. Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya;
13. Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears);
14. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun jamak/multiyears);
15. Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (tahun jamak/multiyear).

b. Luas Wilayah Genangan

Pada tahun 2014, luas wilayah genangan di Kota Surabaya adalah 1.303,13 Ha. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 2.111 Ha, maka capaian kerjanya mencapai 138,27%. Perkembangan capaian target indikator luas wilayah

genangan di Kota Surabaya selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.50.

Grafik III.50 Luas Wilayah Genangan



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu :

1. Bekas Tanah Kas Desa (BKTD) yang direncanakan untuk boezem terlanjur dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan;
2. Kebiasaan membuang sampah di saluran, menyebabkan tingginya sedimentasi;
3. Daerah sempadan saluran banyak dibangun rumah tinggal;
4. Pengerukan secara manual terhambat oleh plat inrit di depan rumah yang terlalu panjang.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah rumah pompa baru dan meningkatkan kapasitas pompa lama;
2. Memperbaiki konektifitas dan infrastruktur sistem drainase tersier, sekunder, dan primer;
3. Lahan terbuka hijau.

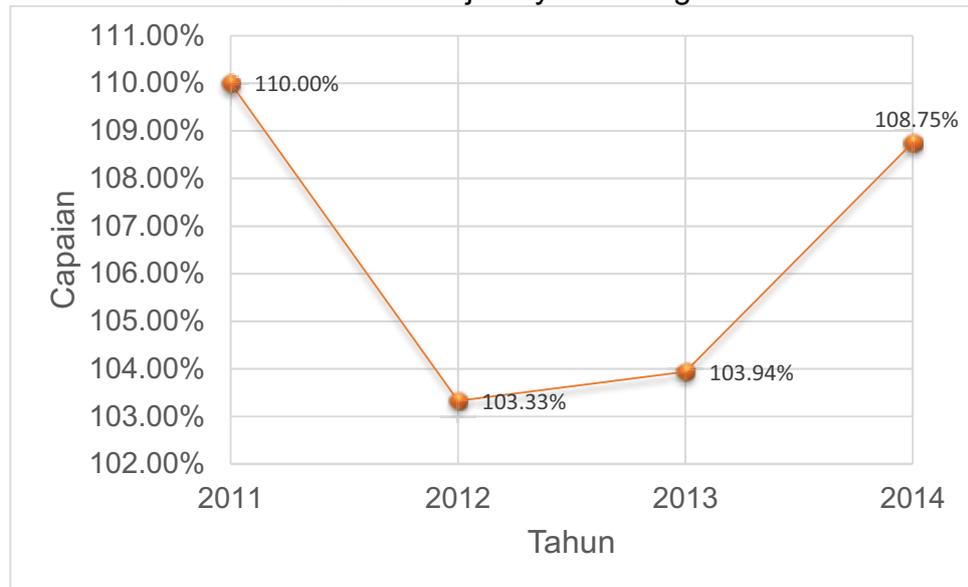
Pencapaian indikator luas wilayah genangan dilaksanakan melalui “Pengendalian Banjir” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai;
2. Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai;
3. Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan;
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong;
5. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan;
6. Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan;
7. Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan;
8. Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir;
9. Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears);
10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (tahun jamak/multiyears).

c. Rata-Rata Lama Terjadinya Genangan

Rata-rata lama terjadinya genangan di kota Surabaya pada tahun 2014 mencapai 54,75 menit atau 0,91 jam, sehingga capaian kinerjanya mencapai 108,75% dari target yang telah ditetapkan selama 60 menit atau 1 jam. Perkembangan capaian target indikator rata-rata lama terjadinya genangan (dalam menit) selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.51.

Grafik III.51 Rata-rata Lama Terjadinya Genangan



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan, yaitu:

1. Bekas Tanah Kas Desa (BKTD) yang direncanakan untuk boezem terlanjur dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan;
2. Kebiasaan membuang sampah di saluran, menyebabkan tingginya sedimentasi;
3. Daerah sempadan saluran banyak dibangun rumah tinggal;
4. Pengerukan secara manual terhambat oleh plat inrit di depan rumah yang terlalu panjang.

Namun demikian terdapat dukungan berupa perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang terpadu dan berkelanjutan, komitmen Kepala Daerah dan masyarakat untuk menuntaskan banjir di kota Surabaya dan keberadaan lahan terbuka hijau.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sistem drainase yang terpadu dan berkelanjutan;

2. Komitmen kepala daerah dan masyarakat untuk menuntaskan banjir di Kota Surabaya;
3. Normalisasi saluran primer, sekunder, tersier, saluran tepi jalan;
4. Normalisasi roil-riol peninggalan Belanda.

Pencapaian indikator luas wilayah genangan dilaksanakan melalui program “Pengendalian Banjir” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

d. Rata-Rata Tinggi Genangan Yang Terjadi

Pada tahun 2014, rata-rata tinggi genangan yang terjadi di wilayah kota Surabaya adalah 16,82 cm, sehingga capaian kinerjanya mencapai 115,90% dari target yang telah ditetapkan sebesar 20 cm. Perkembangan capaian target indikator rata-rata tinggi genangan di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.52.

Grafik III.52 Rata-rata Tinggi Genangan yang Terjadi



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan, yaitu:

1. Bekas Tanah Kas Desa (BKTD) yang direncanakan untuk boezem terlanjur dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan;

2. Kebiasaan membuang sampah di saluran, menyebabkan tingginya sedimentasi;
3. Daerah sempadan saluran banyak dibangun rumah tinggal;
4. Pengerukan secara manual terhambat oleh plat inrit di depan rumah yang terlalu panjang.

Namun demikian terdapat dukungan berupa perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang terpadu dan berkelanjutan, komitmen Kepala Daerah dan masyarakat untuk menuntaskan banjir di Kota Surabaya dan keberadaan lahan terbuka hijau.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

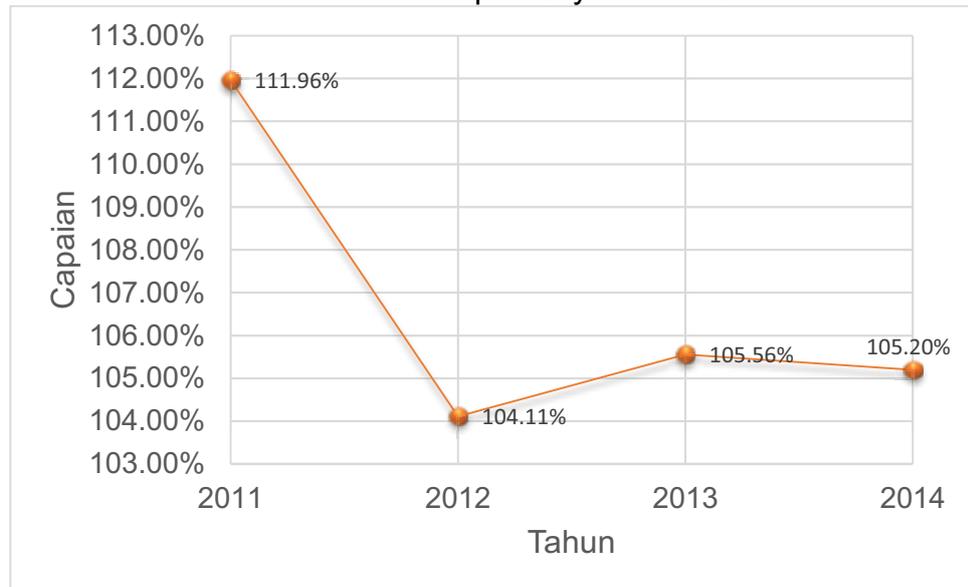
1. Membangun penambahan boezem/waduk di daerah hulu dan hilir;
2. Penambahan Mechanical Screen dan Pintu Air;
3. Mengembalikan kapasitas dan elevasi saluran melalui pekerjaan pengerukan;
4. Pembangunan saluran baru.

Pencapaian indikator rata-rata tinggi genangan yang terjadi dilaksanakan melalui program “Pengendalian Banjir” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

e. Persentase Cakupan Layanan Air Bersih

Berdasarkan data dari PDAM Surya Sembada, pada tahun 2014 nilai cakupan layanan air bersih di Surabaya adalah sebesar 92,64%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 88,06%, maka capaian kinerjanya adalah 105,20%. Perkembangan capaian target indikator persentase cakupan layanan air bersih di Surabaya selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.53.

Grafik III.53 Persentase Cakupan Layanan Air Bersih



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan, yaitu:

1. Banyaknya pipa lama yang harus diganti.
2. Tingkat pencurian air.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menambah tekanan air bersih.
2. Pembangunan jaringan baru.

Adapun program dari indikator persentase cakupan layanan air bersih adalah “Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum);
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih.

f. Jumlah MBR Yang Telah Mendapatkan Manfaat Rumah Layak Huni (KK)

Pada Tahun 2014, MBR yang mendapatkan manfaat rumah layak huni adalah sebesar 3.242 KK atau meningkat sebanyak 131 KK dari 3.111 KK pada tahun 2013, sehingga capaian kinerjanya mencapai 96,46% dari target yang telah ditetapkan sebesar 3.361 KK. Perkembangan capaian target indikator jumlah MBR yang mendapatkan manfaat rumah layak huni di Surabaya selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.54.

Grafik III.54 Jumlah MBR yang Telah Mendapatkan Manfaat Rumah Layak Huni (KK)



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

1. Banyak penghuni Rusun/Rusunawa yang menunggak;
2. Sewa retribusi sesuai Perwali No. 59 Tahun 2010 dan Perda No. 13 Tahun 2010.

Namun demikian terdapat dukungan berupa Perda yang terdiri dari Perda No.2 Tahun 2010 Tanggal 08 November 2010, Perda No. 15 Tahun 2012 Tanggal 18 Juni 2012, Perda No. 13 Tahun 2010 Tanggal 01 Desember 2010, Perda No. 02 Tahun 2013

Tanggal 26, Perwali No. 59 Tahun 2010 Tanggal 08 November 2010, Perwali No. 14 Tahun 2013 Tanggal 11 Januari 2013, dan Perwali No. 30 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Telah dibuat tagihan untuk penghuni yang menunggak;
2. Telah disosialisasikan terkait perda dan perwali yang berlaku.

Pencapaian indikator jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK) adalah melalui program “Perumahan Dan Permukiman” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman;
2. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana makam;
3. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman;
4. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Surabaya.

g. Luas Kawasan Kumuh Yang Mendapat Peningkatan Layanan Prasarana Permukiman (Ha)

Pada tahun 2014 penambahan luas kawasan tidak layak huni yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah seluas 105.8 Ha sehingga secara keseluruhan capaian peningkatan kualitas lingkungan permukiman adalah seluas 510.91 Ha dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 508 Ha. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 100.57%. Perbandingan pencapaian target indikator luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan

layanan prasarana permukiman di Surabaya selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.55.

Grafik III.55 Luas Kawasan Kumuh yang Mendapat Peningkatan Layanan Prasarana Permukiman (Ha)



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini telah dilakukan upaya Koordinasi yang baik dengan instansi vertikal (Kementerian PU dan Pemprov Jatim). Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

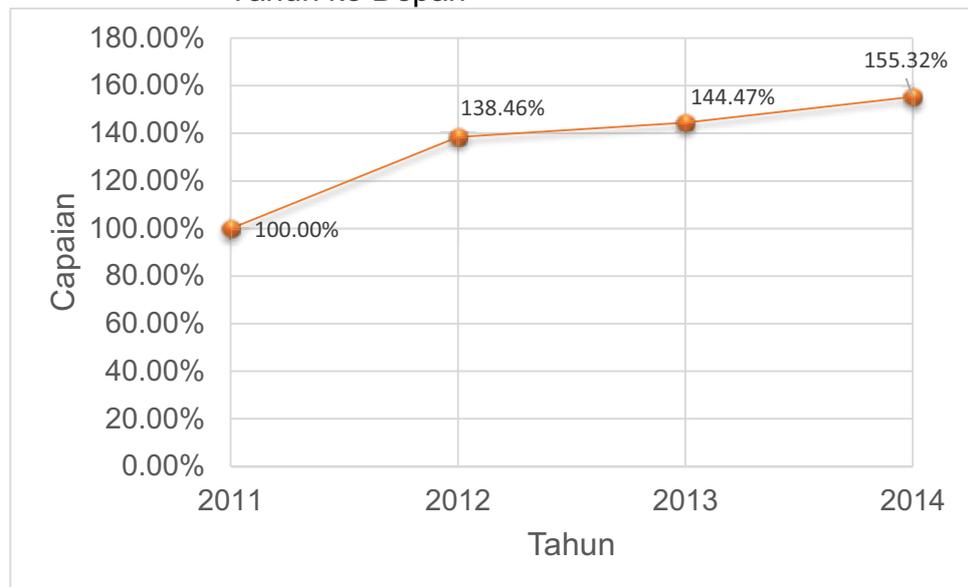
1. Kesulitan untuk memasukkan bahan material pada lokasi gang yang sempit
2. Kurangnya supplier paving pada pelaksanaan pekerjaan dengan waktu yang bersamaan, karena material tersebut membutuhkan waktu/umur pengeringan.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Perumahan Dan Permukiman” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

h. Rasio Angka Ketersediaan Makam Selama Lima Tahun ke Depan

Pada tahun 2014, luas lahan makam yang tersedia dan belum dimanfaatkan adalah sebesar 20,93 Ha, sedangkan luasan lahan makam yang dimanfaatkan pada tahun 2014 adalah sebesar 4,47 Ha, sehingga rasio kebutuhan lahan makamnya adalah sebesar 0,21 dari target rasio yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,47. Dengan demikian capaian kerjanya mencapai 155.32%. Perkembangan capaian target indikator rasio kebutuhan makam terhadap angka ketersediaan makam di Surabaya selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.56.

Grafik III.56 Rasio Angka Ketersediaan Makam Selama Lima Tahun ke Depan



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Perumahan Dan Permukiman” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

i. Pencapaian Waktu Tanggap Kurang < 15 Menit

Sepanjang tahun 2014 di Kota Surabaya tercatat telah terjadi 596 kejadian kebakaran yang telah ditangani. Dari seluruh kejadian tersebut 536 atau 89.93% diantaranya dapat ditangani kurang dari

15 menit. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 82%, maka capaian kinerjanya adalah 109.67%. Perkembangan capaian target indikator pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit di Surabaya selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.57.

Grafik III.57 Pencapaian Waktu Tanggap Kurang <15 Menit



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

1. Kepadatan lalu lintas menuju tempat kejadian kebakaran (TKK) dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dilalui oleh mobil pemadam kebakaran dan petugas pemadam kebakaran serta dukungan warga masyarakat;
2. Belum terlaksananya pembangunan pos-pos pemadam kebakaran yang tersebar di wilayah Kota Surabaya;
3. Kurangnya sarana pemadam kebakaran dan kelengkapan keselamatan kerja bagi Pasukan Pemadam Kebakaran.

Namun demikian terdapat dukungan sumber daya manusia yang mengerti tugas dan fungsinya dan kerjasama dengan polisi lalu lintas dan pentingnya partisipasi warga masyarakat serta APBD

Kota Surabaya serta tersedianya pos pembantu di setiap wilayah Kota Surabaya

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan meningkatkan kinerja sasaran dan prasarana penanggulangan kebakaran dengan didukung peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan pos-pos pemadam kebakaran yang tersebar di wilayah Kota Surabaya
3. Pengadaan sarana pemadam kebakaran dan kelengkapan keselamatan kerja bagi Pasukan Pemadam Kebakaran.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran;
2. Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
3. Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran;
4. Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
5. Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran;
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
8. Pengadaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran (tahun jamak/multiyears).

j. Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Pada tahun 2014, wilayah Kota Surabaya yang telah terjangkau oleh manajemen kebakaran adalah 282,83 km² dari 305,564 km² luas wilayah Kota Surabaya tanpa termasuk wilayah mangrove, sehingga jangkauannya adalah 92,56%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 91%, maka capaian kinerjanya adalah 101,71%. Perbandingan pencapaian target indikator cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran di Surabaya sampai dengan Tahun 2014 dapat dilihat pada Grafik III.58.

Grafik III.58 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran



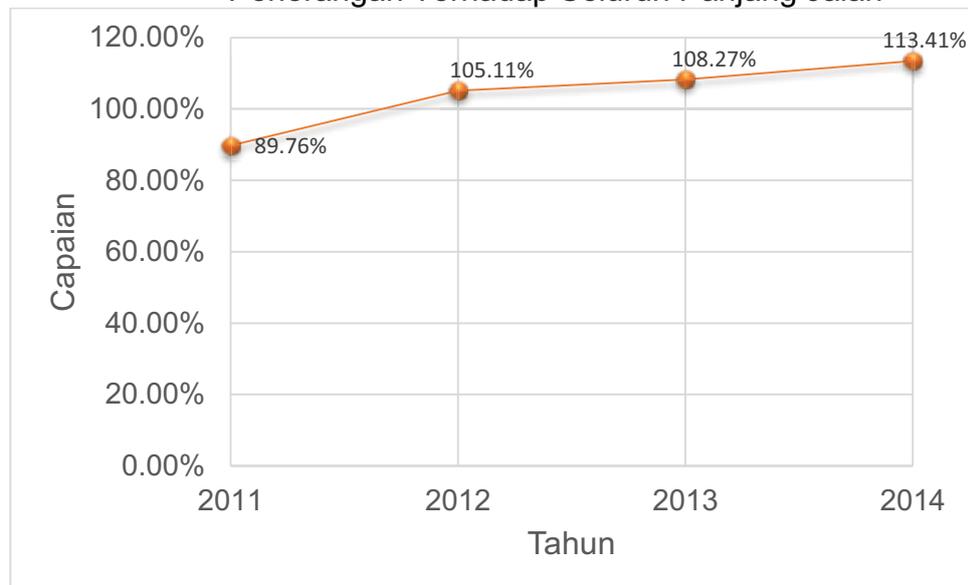
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu Informasi mengenai wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana yang kurang tepat sasaran. Namun demikian terdapat dukungan dari media cetak dan elektronik dan partisipasi masyarakat. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah penyebarluasan informasi mengenai wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

k. Rasio Panjang Jalan Yang Sudah Mendapatkan Penerangan Terhadap Seluruh Panjang Jalan

Pada tahun 2014 ditetapkan target sebesar 83,36%. Capaian di tahun 2014 yaitu panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan jalan adalah 2.249.520 meter dimana panjang jalan kota Surabaya termasuk jalan lingkungan adalah 2.379.530,9 meter atau 94.54% sudah mendapat penerangan jalan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kerjanya adalah 113,42 %. Perbandingan capaian indikator rasio panjang jalan yang sudah mendapat penerangan terhadap seluruh panjang jalan di Surabaya selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.59.

Grafik III.59 Rasio Panjang Jalan yang Sudah Mendapatkan Penerangan Terhadap Seluruh Panjang Jalan



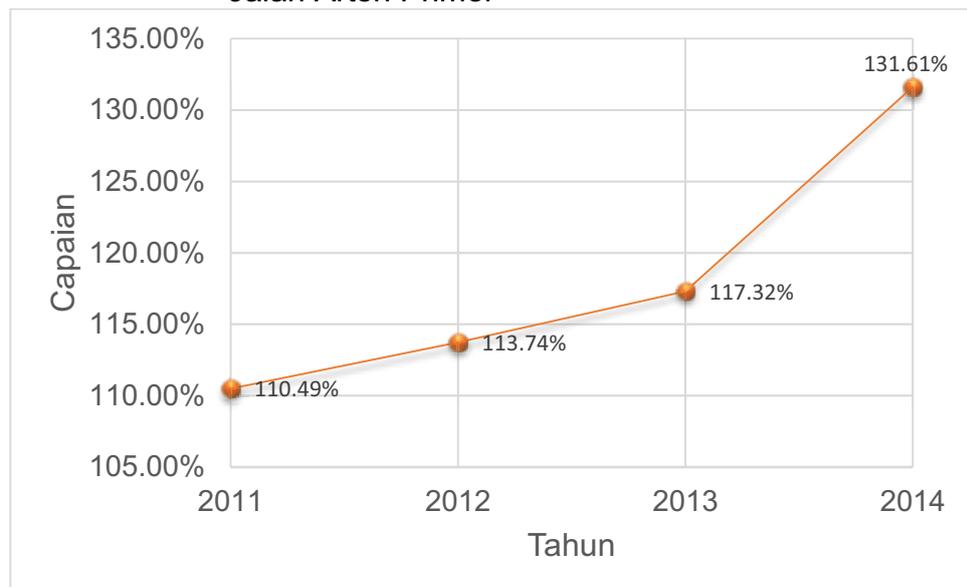
Capaian indikator kinerja ini didukung melalui pelaksanaan program “Utilitas Perkotaan” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemasangan penerangan jalan umum;
2. Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum.

I. Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/Jam) pada Jalan Arteri Primer

Pada tahun 2014, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di ruas jalan arteri primer adalah sebesar 31,23 km/jam. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 23,73 km/jam, maka capaian kinerjanya adalah 131,61%. Perkembangan capaian target indikator kecepatan rata-rata kendaraan di jalan arteri primer Surabaya selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.60.

Grafik III.60 Kecepatan Rata-rata Kendaraan (km/jam) Pada Jalan Arteri Primer



Berdasarkan analisa capaian kinerja indikator kinerja kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer, hasil kategori capaiannya sangat baik dikarenakan setiap terjadi permasalahan lalu lintas di setiap persimpangan dan ruas jalan Kota Surabaya selalu ditindak lanjuti dengan diterapkannya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan lalu lintas yang ada. Capaian kinerja

indikator ini juga dapat meningkatkan upaya penurunan tingkat kecelakaan dan tingkat pelanggaran di jalan raya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di ruas jalan arteri primer adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan baru dan manajemen rekayasa sebagai solusi permasalahan lalu lintas yang ada, baik berupa solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
2. Survey kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di ruas jalan arteri primer dilakukan dalam beberapa tahap dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

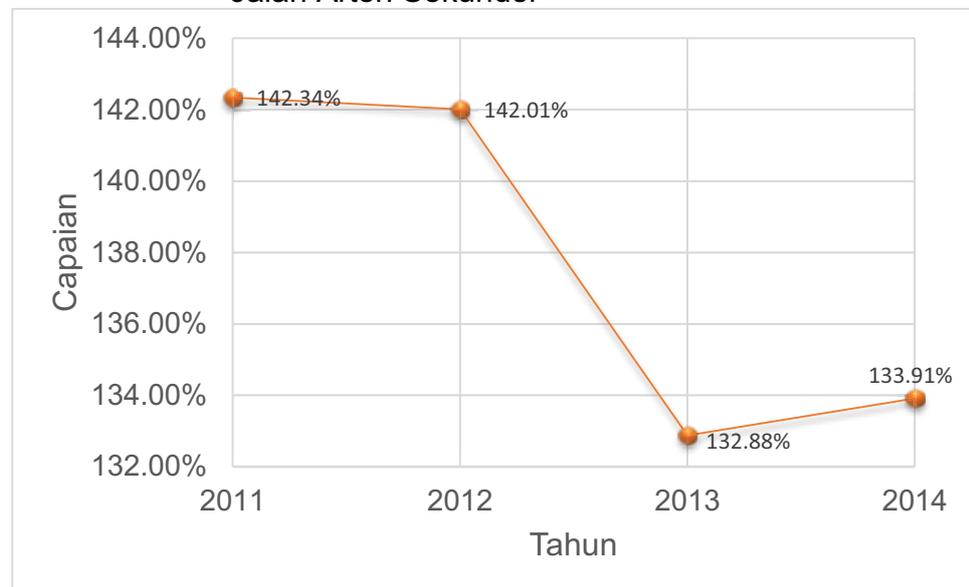
Capaian indikator kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer dilaksanakan melalui program “Pengembangan Sistem Transportasi” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan;
2. Pengadaan / pemeliharaan APILL;
3. Penyelenggaraan manajemen lalu lintas;
4. Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum;
5. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan;
6. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ;
8. Pengelolaan terminal angkutan umum;
9. Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas;
10. Pengembangan sarana prasarana perhubungan;
11. Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK;
12. Penyelenggaraan pelayanan perijinan angkutan umum;
13. Pembangunan sarana prasarana perhubungan (tahun jamak/multiyears).

m. Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/Jam) pada Jalan Arteri Sekunder

Pada tahun 2014, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di ruas jalan arteri sekunder sebesar 28,75 km/jam. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 21,47 km/jam, maka capaian kinerjanya adalah 133,91%. Perkembangan capaian target indikator kecepatan rata-rata kendaraan di ruas jalan arteri sekunder Surabaya selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.61.

Grafik III.61 Kecepatan Rata-rata Kendaraan (km/jam) Pada Jalan Arteri Sekunder



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu kegiatan ekonomi yang semakin merata antara di CBD maupun di luar CBD membuat jumlah perjalanan yang semakin beragam melewati setiap ruas jalan sehingga kegiatan tidak hanya berpusat pada CBD.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di ruas jalan arteri sekunder adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan pusat kegiatan baru di setiap wilayah guna mengurangi kegiatan yang berpusat di CBD;

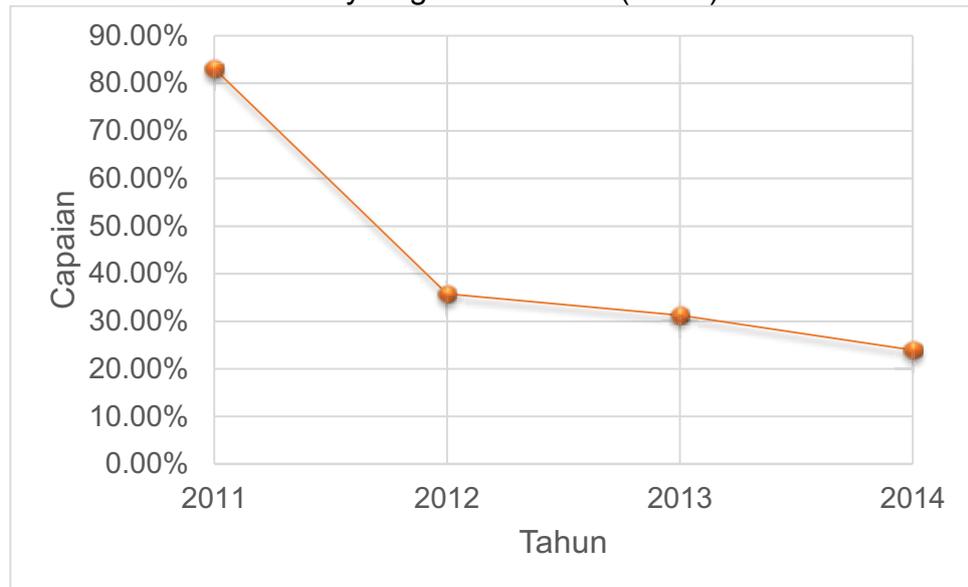
2. Survey kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di ruas jalan arteri sekunder dilakukan dalam beberapa tahap dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Capaian indikator kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder dilaksanakan melalui program “Pengembangan Sistem Transportasi” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

n. Headway Angkutan Umum (Menit) untuk Mikrolet

Sampai dengan tahun 2014, jumlah trayek angkutan umum di Surabaya adalah sebanyak 79 trayek yang terdiri dari 58 trayek angkutan kota dan 21 trayek bus kota. Dengan armada yang telah ada, headway angkutan umum rata-rata adalah 25,91 menit untuk mikrolet/angkutan kota. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 14,72 menit, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 23,98 % untuk mikrolet/angkutan kota. Masih rendahnya capaian kinerja tersebut dikarenakan kualitas layanan angkutan umum yang mengalami penurunan sehingga keberadaan angkutan umum tidak mempunyai daya tarik lagi bagi masyarakat untuk beralih moda yang semula menggunakan kendaraan pribadi ke mode angkutan umum. Penurunan kualitas layanan angkutan umum tersebut merupakan salah satu penyebab menurunnya kinerja angkutan umum sehingga headway tidak dapat tercapai sesuai target yang diinginkan. Perkembangan capaian target indikator headway angkutan umum di Surabaya selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.62.

Grafik III.62 Headway Angkutan Umum (menit) untuk Mikrolet



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

1. Masih banyak operator atau pemilik angkot yang hanya memikirkan sistem setoran, sehingga banyak sopir yang ngetem di sembarang tempat yang menyebabkan headway dan waktu perjalanan tidak konsisten;
3. Masih banyak operator atau pemilik bus/angkot yang mengoperasikan kendaraannya tidak sesuai dengan time table;
4. Kurangnya sosialisasi terhadap pengemudi dan pemilik angkutan umum untuk selalu memperhatikan kinerja angkutan umum.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator headway angkutan umum mikrolet adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan angkutan umum yang diarahkan untuk mengimplementasikan angkutan masal cepat yang terintegrasi;

2. Merubah sistem operasional mikrolet dengan pengaturan jadwal perjalanan dan memperhatikan jumlah kebutuhan armada yang disesuaikan dengan permintaan demand angkutan umum.

Capaian indikator kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder dilaksanakan melalui program “Pengembangan Sistem Transportasi” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

o. Headway Angkutan Umum (Menit) untuk Biskota

Pada tahun 2014, headway angkutan umum rata-rata adalah 43,12 menit untuk bus kota. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 20 menit, maka capaiannya adalah -15.60%. Perkembangan capaian target indikator headway angkutan umum untuk biskota di Surabaya selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.63.

Grafik III.63 Headway Angkutan Umum (menit) untuk Biskota



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

1. Masih banyaknya bus kota yang mengoperasikan kendaraannya tidak sesuai dengan time table yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan headway (waktu keberangkatan) tidak konsisten;
2. Berkurangnya jumlah armada dan jumlah penumpang.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja headway angkutan umum biskota adalah sebagai berikut:

1. Pengoperasian kendaraan dilakukan sesuai dengan standart operasional prosedur;
2. Kebijakan pengembangan angkutan umum yang diarahkan untuk mengimplementasikan angkutan massal cepat yang terintegrasi;

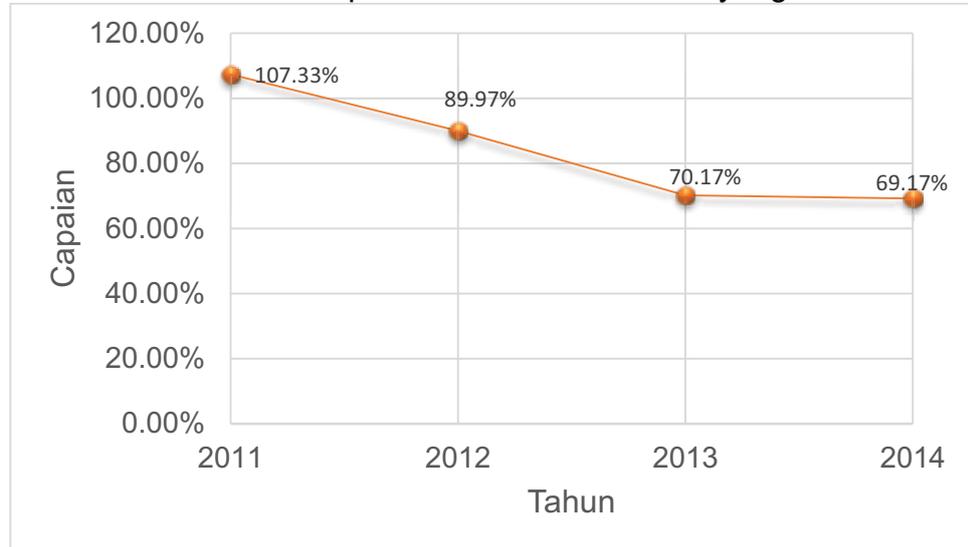
Capaian indikator kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder dilaksanakan melalui program “Pengembangan Sistem Transportasi” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

p. Persentase Luas RTH Yang Berfungsi Optimal Terhadap Keseluruhan Luas RTH Yang Ada

Pada tahun 2014, RTH yang dioptimalkan mencapai 301,49 Ha atau 4,52 % dari luas RTH 6.670,42 Ha, sehingga sampai dengan tahun 2014 akumulasi RTH yang dioptimalkan mencapai 2.185,53 Ha atau 32,76% dari luas total RTH. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 47,37%, maka capaian kerjanya adalah 69,17%. Belum optimalnya capaian pada Tahun 2014 karena pengaruh kondisi iklim kawasan pesisir yang kurang mendukung penanaman mangrove. Perbandingan capaian indikator persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan

luas RTH yang ada selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.64.

Grafik III.64 Persentase Luas RTH yang Berfungsi Optimal Terhadap Keseluruhan Luas RTH yang Ada



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

1. Kepemilikan lahan oleh warga dan perusahaan pengembang perumahan;
2. Kurangnya pengetahuan warga tentang mangrove;
3. Pasang surut ombak mempengaruhi pertumbuhan bibit mangrove yang sudah ditanam;
4. Sampah dari laut menyebabkan kematian pada bibit mangrove.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi terhadap lahan yang masih ada;
2. Sosialisasi terkait dengan pentingnya mangrove untuk melindungi kawasan pantai dari gempuran ombak;
3. Kerjasama dengan petani di wilayah pamurbaya untuk bersih-

bersih pantai;

4. Memelihara dan mengganti kembali tanaman yang mati.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penataan Ruang Terbuka Hijau;
2. Pengembangan Dekorasi Kota;
3. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau;
4. Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi;
5. Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau sebanyak 1 Lokasi
6. Pengelolaan kawasan lindung pesisir pantai Surabaya;
7. Pembangunan Hutan dan pemeliharaan Hutan Kota.

15. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 14 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.15 Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Cakupan Layanan Kebersihan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	165/175=0,94	174/175=0.99	105.77%
2012	167/175	176/175	105.86%
2013	171/175	179/175	104.68%
2014	173/175	184/175	106.06%

Kualitas Air Limbah Industri BOD

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	62.00%	62.99%	101.60%
2012	64.00%	65.09%	101.70%
2013	68.00%	69.80%	102.65%
2014	72.00%	73.26%	101.75%

Kualitas Air Limbah Industri COD

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	58.00%	60.93%	105.05%
2012	60.00%	65.47%	109.12%
2013	62.00%	65.79%	106.11%
2014	66.00%	67.67%	102.53%

Kualitas Air Limbah Industri TSS

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	52.00%	52.04%	100.08%
2012	56.00%	56.41%	100.73%
2013	60.00%	61.39%	102.32%
2014	66.00%	67.40%	102.12%

Kualitas Air Limbah Domestik BOD

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	30.00%	30.28%	100.93%
2012	36.00%	36.77%	102.14%
2013	42.00%	43.29%	103.07%
2014	46.00%	49.50%	107.61%

Kualitas Air Limbah Domestik TSS

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	34.00%	34.02%	100.06%
2012	38.00%	38.79%	102.08%
2013	42.00%	44.15%	105.12%
2014	48.00%	48.51%	101.06%

Kualitas Air Limbah RS BOD

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	38.00%	39.18%	103.11%
2012	46.00%	48.02%	104.39%
2013	53.00%	54.77%	103.34%
2014	63.00%	64.58%	102.51%

Kualitas Air Limbah RS COD

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	44.00%	44.04%	100.09%
2012	50.00%	50.23%	100.46%
2013	56.00%	57.27%	102.27%
2014	62.00%	63.87%	103.02%

Kualitas Air Limbah RS TSS

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	34.00%	34.58%	101.71%
2012	40.00%	40.62%	101.55%
2013	50.00%	51.61%	103.22%
2014	60.00%	61.18%	101.97%

Kualitas Air Limbah Hotel BOD

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	28.00%	28.30%	101.07%
2012	34.00%	34.74%	102.18%
2013	40.00%	42.76%	106.90%
2014	48.00%	49.83%	103.81%

Kualitas Air Limbah Hotel COD

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	24.00%	25.94%	108.08%
2012	28.00%	30.30%	108.21%
2013	34.00%	35.13%	103.32%
2014	36.00%	36.57%	101.58%

Kualitas Air Limbah Hotel TSS			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	26.00%	26.33%	101.27%
2012	30.00%	33.13%	110.43%
2013	36.00%	38.00%	105.56%
2014	42.00%	43.72%	104.10%

Kualitas Udara Emisi di Kawasan Industri SO₂			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	65.00%	65.25%	100.38%
2012	70.00%	70.53%	100.76%
2013	75.00%	76.11%	101.48%
2014	80.00%	81.37%	101.71%

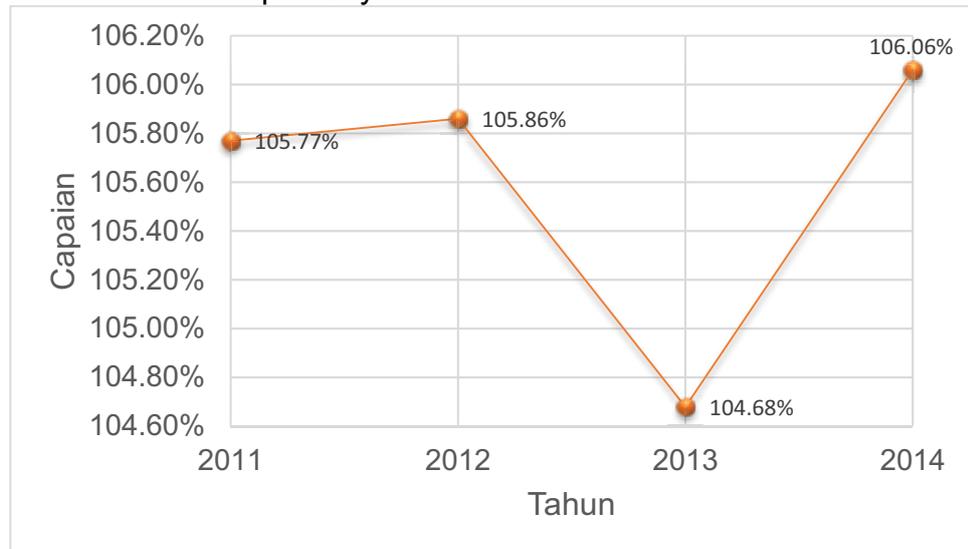
Kualitas Udara Emisi di Kawasan Industri NO₂			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	45.00%	46.06%	102.36%
2012	50.00%	51.95%	103.90%
2013	60.00%	61.63%	102.72%
2014	70.00%	70.85%	101.21%

Rincian capaian indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Cakupan Layanan Kebersihan

Pada tahun 2014, di Surabaya telah terdapat 184 TPS, sehingga capaian cakupan layanan kebersihan adalah 1,05. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 173 TPS atau 0,99, maka capaian kerjanya adalah 106,06%. Adapun perkembangan capaian target indikator jumlah TPS di Surabaya selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.65.

Grafik III.65 Cakupan Layanan Kebersihan



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini dilaksanakan program indikator keberhasilan yaitu “Pengelolaan Kebersihan Kota” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan;
2. Peningkatan operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan;
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
4. Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan sampah;
5. Operasional Pengangkutan Sampah;
6. Perencanaan teknis Kebersihan dan Pertamanan;
7. Operasional dan pemeliharaan IPLT Keputih;
8. Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan;
9. Operasional Pengolahan Sampah;
10. Posko Peningkatan Pelayanan Kebersihan;
11. Operasional Penyapuan Jalan;
12. Operasional Pembersihan Sampah di Saluran;

13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan.

b. Kualitas Air Limbah Industri dengan Menurunkan Beban Pencemaran BOD

Pada tahun 2014, realisasi penurunan beban pencemaran BOD adalah 73,26%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 72% maka capaiannya adalah 101,75%. Perbandingan pencapaian target indikator kualitas air limbah industri dengan penurunan beban pencemaran BOD selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.66.

Grafik III.66 Kualitas Air Limbah Industri BOD



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

1. Sarana dan prasarana relatif kurang mencukupi;
2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan (kurangnya pengetahuan /partisipasi /kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang terkait dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup juga dalam hal perijinan);
3. Data base lingkungan hidup belum memadai;

4. Kurangnya tanaman penghijauan;
5. Adanya ketergantungan dengan laboratorium lain;
6. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan yang dilakukan belum optimal;
7. Penyebaran informasi lingkungan hidup belum optimal;
8. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM / aparat BLH;
9. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Namun demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan koordinasi dengan instansi pusat.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL) dan penegakan hukum
2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian kualitas air & udara.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura;
2. Pemantauan kualitas air laut di kawasan pesisir dan laut;
3. Pelaksanaan Car Free Day;
4. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan;
5. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
6. Pengelolaan (Pemantauan) Kualitas Air ;
7. Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup;
8. Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien;
9. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;
10. Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup;
11. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air;
12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup);
13. Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan;
14. Pengembangan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI);
15. Peningkatan Pelayanan Perijinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.

c. Kualitas Air Limbah Industri dengan Menurunkan Beban Pencemaran COD

Pada tahun 2014, realisasi penurunan beban pencemaran COD adalah 67.67%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2014 yakni 66% maka capaiannya adalah 102.53%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah industri dengan penurunan beban pencemaran COD selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.67.

Grafik III.67 Kualitas Air Limbah Industri COD



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

d. Kualitas Air Limbah Industri dengan Menurunkan Beban Pencemaran TSS

Pada tahun 2014, realisasi penurunan beban pencemaran TSS adalah 67.40%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 66% maka capaiannya adalah 102.12%. Perbandingan pencapaian target indikator kualitas air limbah industri dengan penurunan beban pencemaran TSS selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.68.

Grafik III.68 Kualitas Air Limbah Industri TSS

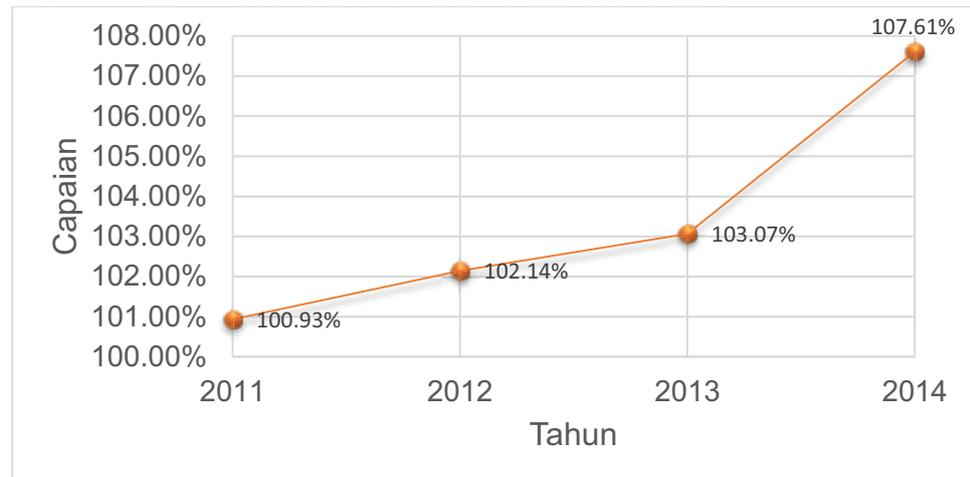


Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

e. Kualitas Air Limbah Domestik dengan Menurunkan Beban Pencemaran BOD

Pada tahun 2014, realisasi penurunan beban pencemaran BOD adalah 49.50%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2014 yakni 46% maka capaiannya adalah 107.61%. Perbandingan pencapaian target indikator kualitas air limbah domestik dengan penurunan beban pencemaran BOD selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.69.

Grafik III.69 Kualitas Air Limbah Domestik BOD



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

f. Kualitas Air Limbah Domestik dengan Menurunkan Beban Pencemaran TSS

Pada tahun 2014, realisasi penurunan beban pencemaran TSS adalah 48.51%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2014 yakni 48% maka capaiannya adalah 101.06%. Perbandingan pencapaian target kinerja indikator kualitas air limbah domestik dengan penurunan beban pencemaran TSS selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.70.

Grafik III.70 Kualitas Air Limbah Domestik TSS

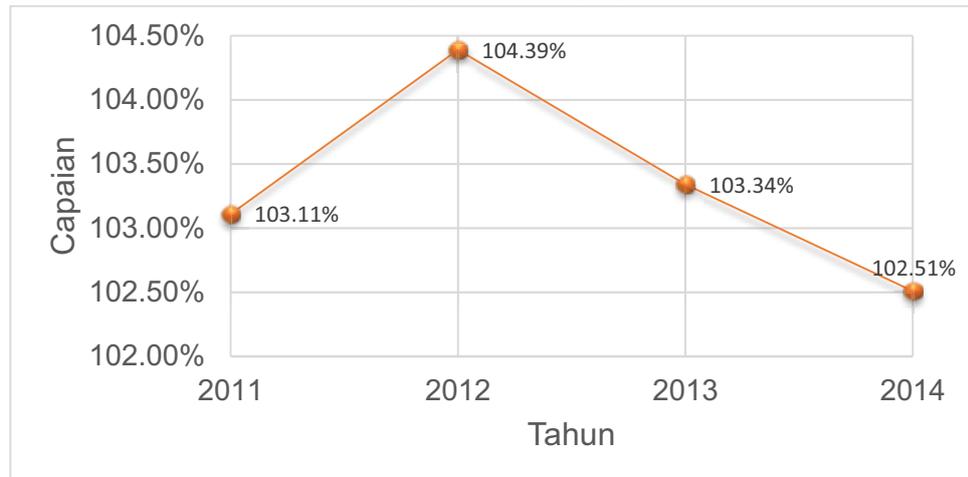


Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

g. Kualitas Air Limbah RS dengan Menurunkan Beban Pencemaran BOD

Pada tahun 2014, realisasi penurunan beban pencemaran BOD adalah 64.58%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2014 yakni 63% maka capaiannya adalah 102.51%. Perbandingan pencapaian target indikator kualitas air limbah RS dengan penurunan beban pencemaran BOD selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.71.

Grafik III.71 Kualitas Air Limbah RS BOD



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

h. Kualitas Air Limbah RS dengan Menurunkan Beban Pencemaran COD

Pada tahun 2014, realisasi penurunan beban pencemaran COD adalah 63.87%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2014 yakni 62% maka capaiannya adalah 103.02%. Perbandingan pencapaian target indikator kualitas air limbah RS dengan penurunan beban pencemaran COD selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.72.

Grafik III.72 Kualitas Air Limbah RS COD

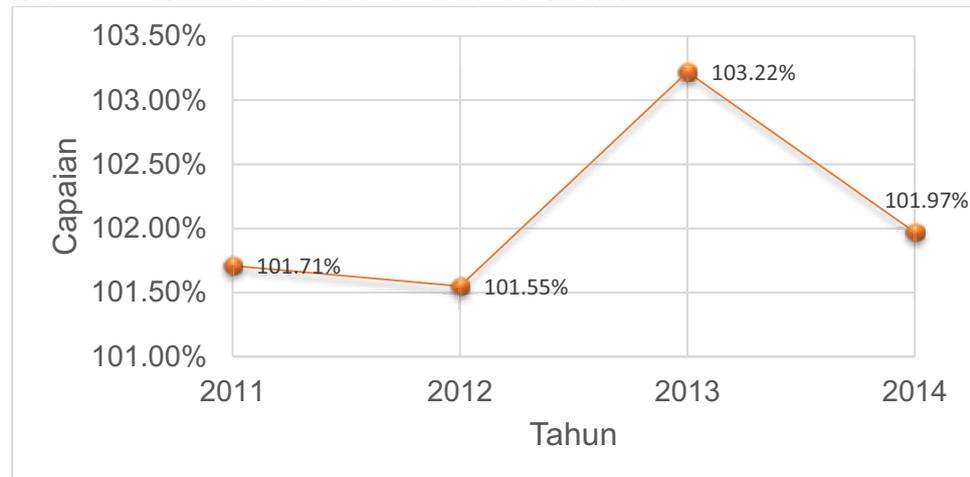


Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

i. Kualitas Air Limbah RS dengan Menurunkan Beban Pencemaran TSS

Pada tahun 2014, realisasi penurunan beban pencemaran TSS adalah 61.18%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2014 yakni 60% maka capaiannya adalah 101.91%. Perbandingan pencapaian target indikator kualitas air limbah RS dengan penurunan beban pencemaran TSS selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.73.

Grafik III.73 Kualitas Air Limbah RS TSS



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

j. Kualitas Air Limbah Hotel dengan Menurunkan Beban Pencemaran BOD

Pada tahun 2014, realisasi penurunan beban pencemaran BOD adalah 49.83%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2014 yakni 48% maka capaiannya adalah 103.81%. Perbandingan pencapaian target indikator kualitas air limbah hotel dengan penurunan beban pencemaran BOD selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.74.

Grafik III.74 Kualitas Air Limbah Hotel BOD

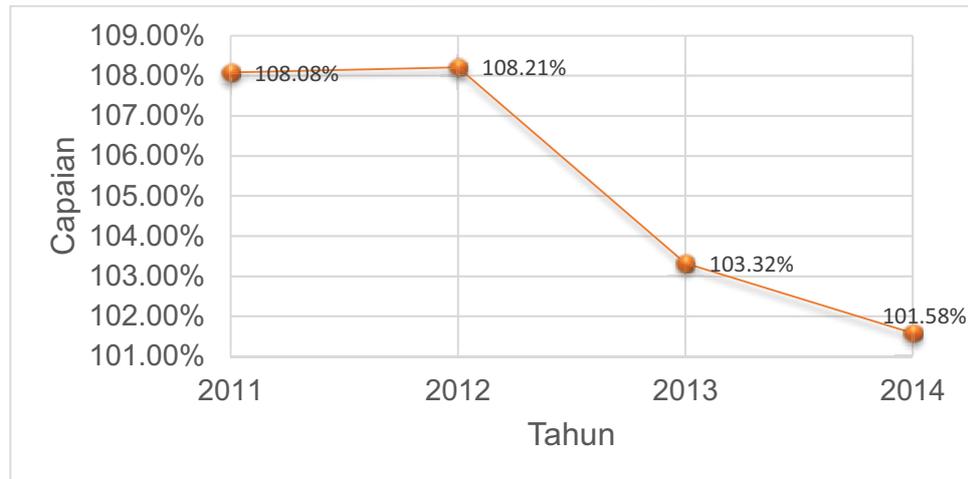


Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

k. Kualitas Air Limbah Hotel dengan Menurunkan Beban Pencemaran COD

Pada tahun 2014, realisasi penurunan beban pencemaran COD adalah 36.57%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2014 yakni 36% maka capaiannya adalah 101.58%. Perbandingan pencapaian target indikator kualitas air limbah hotel dengan penurunan beban pencemaran BOD selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.75.

Grafik III.75 Kualitas Air Limbah Hotel COD

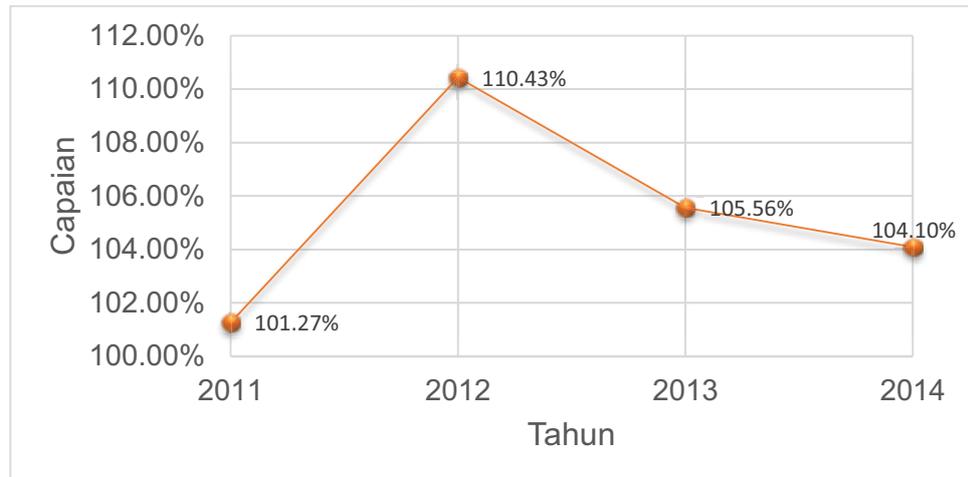


Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

I. Kualitas Air Limbah Hotel dengan Menurunkan Beban Pencemaran TSS

Pada tahun 2014, realisasi penurunan beban pencemaran TSS adalah 43.72%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2014 yakni 42% maka capaiannya adalah 104.10%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah hotel dengan penurunan beban pencemaran TSS selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.76.

Grafik III.76 Kualitas Air Limbah Hotel TSS



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

m. Kualitas Udara Emisi di Kawasan Industri dengan Menurunkan Beban Pencemaran SO₂

Pada tahun 2014, realisasi penurunan beban pencemaran SO₂ adalah 81.37%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2014 yakni 80% maka capaiannya adalah 101,71%. Perbandingan pencapaian target indikator kualitas udara dengan penurunan beban pencemaran SO₂ selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.77.

Grafik III.77 Kualitas Udara Emisi di Kawasan Industri SO₂

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

n. Kualitas Udara Emisi di Kawasan Industri dengan Menurunkan Beban Pencemaran NO₂

Pada tahun 2014, realisasi penurunan beban pencemaran NO₂ adalah 70.85%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2014 yakni 70% maka capaiannya adalah 101.21%. Perbandingan pencapaian target indikator kualitas udara dengan penurunan beban pencemaran NO₂ selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.78.

Grafik III.78 Kualitas Udara Emisi di Kawasan Industri NO₂



Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

16. SASARAN TERWUJUDNYA RENCANA DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG TERINTEGRASI DENGAN RENCANA TATA RUANG KOTA

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 1 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Terwujudnya Rencana dan Kebijakan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Kota mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.16 Sasaran Terwujudnya Rencana dan Kebijakan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Kota

Proporsi Luas Area yang Telah Terlayani Oleh Rencana Tata Ruang			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	15.00%	18.26%	121.73%
2012	35.64%	18.26%	51.23%
2013	53.90%	53.84%	99.89%
2014	81.12%	89%	109.62%

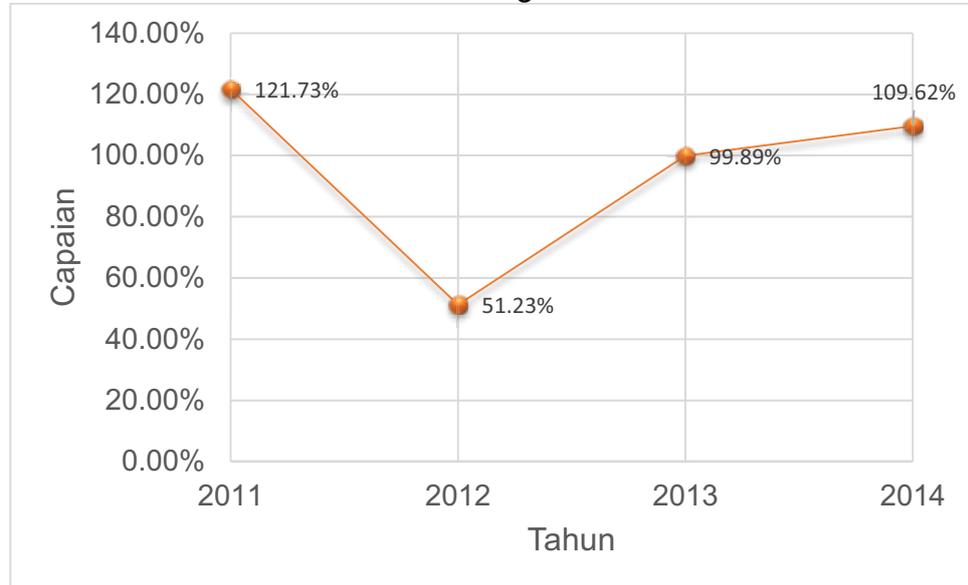
Rincian capaian indikator Sasaran Terwujudnya Rencana dan Kebijakan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Kota tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Proporsi Luas Area Yang Telah Terlayani Oleh Rencana Tata Ruang

Pada tahun 2014, program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang sebesar 81.12%. Dari target yang telah ditetapkan tersebut, proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang sampai dengan tahun 2014 adalah 89%, sehingga capaian kinerjanya adalah 109,62% dari target yang telah ditetapkan sebesar 81.12%. Perbandingan pencapaian indikator proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang di

Surabaya selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.79.

Grafik III.79 Proporsi Luas Area yang Telah Terlayani Oleh Rencana Tata Ruang



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

1. Perkembangan di lapangan sangat sehingga menyulitkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan;
2. Kurangnya sinkronisasi rencana sektoral antar instansi terkait;
3. Terbitnya peta dasar (base map) baru pada tahun 2012, yang menyulitkan sinkronisasi peta dasar (yang lama tahun 2002) dengan peta dasar yang baru.

Namun demikian terdapat dukungan berupa pendanaan yang cukup, komitmen yang baik dari pelaksana, dan kerjasama antar pelaksana.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan review rencana rinci terhadap rencana yang sudah ada sejak tahun 1990.

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Penataan Ruang” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota;
2. Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota;
3. Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang;
4. Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya;
5. Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan;
6. Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota;
7. Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman;
8. Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK);
9. Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS;
10. Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan;
11. Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/ Bangunan Aset Pemkot;
12. Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya;
13. Pendataan dan Pemanfaatan terhadap BTKD;
14. Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota Surabaya;
15. Survey dan Pemetaan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya.

17. SASARAN TERWUJUDNYA REVITALISASI DAN KONSERVASI CAGAR BUDAYA

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 2 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Terwujudnya Revitalisasi Dan Konservasi Cagar Budaya mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.17 Sasaran Terwujudnya Revitalisasi Dan Konservasi Cagar Budaya

Jumlah Kelompok Seni yang Layak Ditampilkan Dalam Even/Festival Seni Budaya			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	125	135	108.00%
2012	150	168	112.00%
2013	175	175	100.00%
2014	200	211	105.50%
Terbentuknya Destinasi Wisata			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2011	7	7	100.00%
2012	13	13	100.00%
2013	16	16	100.00%
2014	19	19	100.00%

Rincian capaian indikator Sasaran Terwujudnya Revitalisasi Dan Konservasi Cagar Budaya tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Kelompok Seni Yang Layak Ditampilkan dalam Even/Festival Seni Budaya

Pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 200 kelompok seni layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya. Dari 226 kelompok seni di Surabaya yang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kesenian), 211 kelompok seni layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerjanya adalah 105,50%. Perkembangan capaian target indikator jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.80.

Grafik III.80 Jumlah Kelompok Seni yang Layak Ditampilkan Dalam Even/Festival Seni Budaya



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

1. Belum optimalnya kondisi pelayanan maupun sarana prasarana yang terdapat pada destinasi wisata di kota surabaya;
2. Belum optimalnya pemasaran produk seni budaya lokal dan pariwisata yang terdapat di kota surabaya.

Namun demikian terdapat dukungan dari adanya kelompok seni di Surabaya. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah pembinaan dan pelatihan terhadap kelompok seni sehingga layak untuk tampil pada event seni budaya.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diadakannya Forum Komunikasi pengelola obyek wisata secara berkala;
2. Diadakannya Surabaya Tourism Destination Award untuk menggugah pengelola obyek wisata agar makin meningkatkan

kualitas pelayanan maupun sarana prasarana yang terdapat di masing-masing obyek;

3. Dijalinnya kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, instansi terkait dan stake holder pariwisata untuk lebih meningkatkan promosi produk seni budaya lokal dan pariwisata Kota Surabaya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Capaian indikator jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya dilaksanakan melalui “Pengelolaan Keragaman Budaya” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah;
2. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah;

b. Terbentuknya Destinasi Wisata

Sampai dengan tahun 2014, obyek wisata Kota Surabaya yang ditingkatkan kualitasnya menjadi destinasi wisata sebanyak 19 lokasi. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 19 lokasi, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Perkembangan capaian target indikator pengembangan destinasi wisata selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.81.

Grafik III.81 Terbentuknya Destinasi Wisata



Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu:

1. Belum optimalnya kondisi pelayanan maupun sarana prasarana yang terdapat pada destinasi wisata di Kota Surabaya;
2. Belum optimalnya pemasaran produk seni budaya lokal dan pariwisata yang terdapat di Kota Surabaya.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Diadakannya Forum Komunikasi pengelola obyek wisata secara berkala;
2. Diadakannya Surabaya Tourism Destination Award untuk menggugah pengelola obyek wisata agar makin meningkatkan kualitas pelayanan maupun sarana prasarana yang terdapat di masing-masing obyek;
3. Dijalinnya kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, instansi terkait dan stake holder pariwisata untuk lebih meningkatkan promosi produk seni budaya lokal dan pariwisata Kota Surabaya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Capaian indikator terbentuknya destinasi wisata dilaksanakan melalui program “Pengembangan Destinasi Pariwisata” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Cagar Budaya;
2. Pengembangan daerah tujuan wisata.

B. REALISASI ANGGARAN

Dari beberapa sasaran dan indikator kinerja yang disampaikan sebelumnya maka total seluruh sasaran anggaran yang teralokasikan adalah sebesar Rp. 3.874.467.524.694,- sedangkan realisasi penyerapan anggaran dari yang telah teralokasikan adalah sebesar Rp. 2.977.951.173.343,-

Realisasi penyerapan anggaran terbesar yaitu sebesar 93,79% adalah sasaran *Meningkatnya Kualitas Lingkungan*. Sedangkan realisasi penyerapan terendah yaitu sebesar 42,33% adalah sasaran *Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal Berbasis Komunitas*. Adapun rata-rata penyerapan anggaran yang telah teralokasikan pada setiap sasaran adalah sebesar 80,00%.

Alokasi dan realisasi anggaran per sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.18 Persentase Realisasi Per Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Warga Kota	71,332,345,068	57,061,565,492	79.99%
2	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,337,393,297	5,055,481,121	79.77%
3	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial	124,494,442,976	106,232,115,478	85.33%
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan	740,495,948,607	616,088,619,635	83.20%
5	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	544,579,413,024	451,951,893,587	82.99%
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Ditandai Dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik	187,386,907,624	154,390,908,671	82.39%
7	Peningkatan Daya Saing Kota Untuk Mendukung Investasi Iklim	27,086,251,579	25,101,090,978	92.67%
8	Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah	53,611,441,602	44,568,667,934	83.13%

NO	SASARAN STRATEGIS	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
9	Peningkatan Kekayaan Daerah	6,537,667,476	5,105,434,247	78.09%
10	Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	19,764,747,913	14,527,390,117	73.50%
11	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal Berbasis Komunitas	123,841,177,617	52,427,447,758	42.33%
12	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Terpadu	14,670,857,303	11,764,644,838	80.19%
13	Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan	25,739,294,849	22,003,281,841	85.49%
14	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Kota	1,670,786,743,442	1,170,918,628,548	70.08%
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	242,362,444,767	227,311,351,125	93.79%
16	Terwujudnya Rencana dan Kebijakan Pembangunan yang Terintegrasi Dengan Rencana Tata Ruang Kota	15,440,447,550	13,442,651,973	87.06%
17	Terwujudnya Revitalisasi dan Konservasi Budaya dan Cagar	8,474,253,249	6,796,385,174	80.20%
Total		3,874,467,524,694	2,977,951,173,343	76.86%
Rata-rata				80.00%

Sumber: Data Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan, per 3 Maret 2014 (diolah)

BAB IV



Penutup

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2014 disimpulkan bahwa capaian sasaran dan indikator kinerja serta capaian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Capaian Sasaran

Dari 17 sasaran yang telah ditetapkan, 13 sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 115.54%, dengan nilai tertinggi adalah 215,43% yaitu sasaran “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial”, sedangkan nilai terendah 89,64% yaitu sasaran “Peningkatan Kekayaan Daerah”.

Capaian Indikator Kinerja

Dari 81 indikator kinerja yang telah ditetapkan, 88,89% berhasil mencapai sesuai dan melampaui target dan 11,11% belum mencapai target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 112,65%, dengan nilai tertinggi adalah 388,79% yaitu indikator kinerja “Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara”, sedangkan nilai terendah -15.60% yaitu indikator kinerja “Headway Angkutan Umum (menit) untuk Biskota”.

Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp2.977.951.173.343,- atau 76.86% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 3.874.467.524.694,-. Dari 17 sasaran strategis capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya Kualitas

Lingkungan” yaitu 93,79% dan terendah adalah “Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal Berbasis Komunitas” yaitu 42,33%.

B. SARAN

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka perlu dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan kota Surabaya sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya
2. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah kota Surabaya yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah kota Surabaya.
4. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah kota Surabaya dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar supaya pegawai pemerintah kota Surabaya dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.



LAMPIRAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014



DAFTAR PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2014

1. **Award Gizi**

Penghargaan Award Gizi Kategori Peduli Penanggulangan Gizi Buruk yang diberikan oleh Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Jawa Timur diperoleh Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 25 Januari 2014

2. **Penghargaan Perhumas dari Perhumas Indonesia**

Penghargaan ini diperoleh Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 2 Februari 2014. Anugerah PERHUMAS INDONESIA adalah Penghargaan Tertinggi PERHUMAS INDONESIA kepada perorangan dan lembaga yang dinilai berprestasi, berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, profesi, praktek, dan organisasi dalam bidang Humas di Indonesia

3. **Predikat Walikota terbaik dunia**

Predikat Walikota terbaik dunia bulan february versi citymayors.com. Walikota Surabaya (Tri Rismaharini) dipilih karena dinilai berhasil membawa perubahan signifikan terhadap perkembangan Kota Surabaya

4. **Penghargaan MDG's di Bidang Sosial**

Pada tanggal 15 Maret 2014 Pemerintah Kota Surabaya Raih 2 Penghargaan MDG's di Bidang Sosial:

Pemerintah Kota Surabaya berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam Millenium Development Goals (MDGs) Award. Yakni:

- a. Kategori pendidikan dengan bidang pengembangan layanan perpustakaan umum dan;
- b. kategori kesehatan ibu dan anak melalui pembentukan kelompok KB pria vasektom

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Utusan Khusus Presiden RI untuk MDG's, Prof DR Nila F Moeloek di Jakarta.

5. **SINDO Weekly Government Award**

SINDO Weekly Government Award 2014 yang diserahkan langsung oleh CEO MNC Group Hary Tanoesoedibyo di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2014.

Sebanyak 23 daerah mendapat SINDO Weekly Government Award 2014. Mereka dinilai berhasil memajukan berbagai sektor kehidupan. CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengapresiasi daerah-daerah yang meraih penghargaan.

Surabaya memperoleh piala kategori 'Perempuan dan Anak'. Tri Rismaharini dianggap mampu memberdayakan perempuan dan anak di kota yang dipimpinnya.

"Kita tangani sudah dua tahun jalan. Program penanganan itu, sejak 2010 akhir. Mereka kita kasih akses ekonomi. Misal mereka mau usaha di bidang jahit, kita kasih modal. Bukan hanya PSK saja. Kita bantu termasuk akses pemasarannya, termasuk di Mall.

Risma juga menjalankan program pendidikan gratis dari SD sampai SMA. Bukan hanya anak tak mampu, bahkan anak jalanan juga diberi kesempatan menimba ilmu sampai luar negeri.

"Kita berangkatkan delapan anak ke Brasil untuk belajar sepakbola. Itu semua dari anak jalanan,"

6. Penghargaan dari Europe Business Assembly (EBA)



Pemerintah Kota Surabaya meraih penghargaan dari Europe Business Assembly (EBA) pada tanggal 16 April 2014

EBA adalah perusahaan independen berbasis di London - Inggris yang memberi perhatian terhadap pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai organisasi non pemerintah, EBA mempromosikan transformasi ekonomi praktis, pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.

Selain menerima penghargaan, wali kota juga diberi kehormatan untuk menyampaikan paparan dalam forum yang dihelat EBA itu

7. Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) Terbaik di Jawa Timur

Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) Terbaik di Jawa Timur diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo tanggal 23 April pada tahun 2014.

Penghargaan diberikan karena Ibu Risma dinilai berhasil melakukan upaya pembudayaan K3 di perusahaan yang ada di wilayah yang dipimpinnya dan terus berusaha meningkatkan motivasi dan komitmen seluruh pimpinan perusahaan di Jatim untuk menuju "Indonesia berbudaya K3 tahun 2015".

8. Predikat Kota Terkaya se-Indonesia

Surabaya Raih Predikat Kota Terkaya se-Indonesia pada tanggal 21 April tahun 2014..

Predikat tersebut disematkan oleh majalah Warta Ekonomi edisi 7, April 2014. Surabaya berada pada urutan pertama dari 50 kota dan kabupaten se-Indonesia. Pemilihan 50 kota terkaya tersebut didasarkan atas pendapatan perkapita di atas Rp 2 Triliun. Dalam daftar hasil riset tersebut, peringkat 10 teratas didominasi kabupaten/kota di luar Jawa. Majalah tersebut berasumsi kebijakan pemerintah yang mendorong pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa.

Riset Warta Ekonomi menyebutkan, Surabaya mendapat angka 3.000 dari indeks Daya Tarik Investasi (20%), 4.000 untuk indeks Pendukung Infrastruktur (10%), 4.500 indeks Kualitas Masyarakat (10%), dan 5.000 indeks Ekonomi daerah (60%).

Pemeringkatan tersebut menggunakan metode skoring skala 1 sampai 5 dan pembobotan masing-masing variabel. Semua variabel memperoleh pembobotan proporsional. Data yang digunakan adalah basis data kompilasi dari BPS dan Kementerian Keuangan periode 2011 hingga 2013.

9. Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik

Surabaya raih dua penghargaan inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada tanggal 30 April 2014.

Penghargaan untuk dua inovasi Pemkot Surabaya, SSW dan GRMS, melengkapi penghargaan yang diterima Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Salah satu kriteria penilaian terhadap kompetisi inovasi pelayanan publik ini antara lain dilihat dari dampak atau impact terhadap masyarakat, keberlanjutan, serta harus bisa direplikasi oleh pihak lain, dan sudah diterapkan minimal setahun.

Surabaya resmi memiliki layanan terpadu dengan nama Surabaya Single Window (SSW). Layanan ini akan memudahkan warga kota maupun warga asing yang ingin berinvestasi di Surabaya. Karena layanan ini dikerjakan dengan sistem online. Utamanya, untuk layanan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) atau zoning dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).

Layanan ini akan menjadi layanan satu jendela. Karena, pengurusan izin secara online di DCKTR itu terintegrasi dengan System Informasi Management (SIM) online di beberapa SKPD atau unit kerja yang dikoordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Dengan cara ini pemohon dapat mengisi aplikasi isian perijinan dari rumah. Kemudian dia tinggal datang ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) untuk verifikasi ke Customer Service di loket DCKTR.

Tujuannya untuk memperpendek waktu dan pengecekan data serta persyaratan bisa lebih cermat dilakukan. Melalui SSW, seluruh izin dapat langsung diproses secara bersamaan.

10. Wanita Penuh Inspirasi Penerus Jejak Kartini Versi Forbes Edisi April

Wanita Penuh Inspirasi Penerus Jejak Kartini Versi Forbes

Tri Rismaharini :

Sosok wanita berusia 52 tahun ini begitu melejit namanya sebagai pemimpin daerah Walikota Surabaya. Beberapa kebijakannya cukup populer tidak hanya bagi masyarakat Indonesia namun juga masyarakat Indonesia secara umum. Beberapa kebijakannya semakin memajukan Surabaya, kebijakan tersebut antara lain menciptakan 11 taman terbuka dengan fasilitas bermain yang cukup lengkap, memecat 40 pejabat korup dan menaikkan anggaran pendidikan sebesar 36 % menjadi Rp 5,6 triliun. Tidak hanya sampai disitu kebijakan lain dari Risma yang cukup kontroversial adalah menutup tempat pelacuran Dolly dan melaporkan para pengelola kebun binatang Surabaya

yang menyebabkan kematian sejumlah binatang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

11. Penghargaan Adipura Kencana



Penghargaan Adipura Kencana diperoleh Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 6 Juni 2014

Wakil Presiden Boediono memberikan penghargaan kepada para tokoh perintis lingkungan hidup pada Hari Lingkungan Hidup pada Kamis 5 Juni 2014. Ada puluhan pemerintah daerah, individu, dan kelompok yang diberi penghargaan oleh Boediono. Salah satu di antaranya adalah Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Kota Surabaya mendapat penghargaan Adipura Kencana kategori metropolitan karena dianggap melampaui batas pencapaian dari segi pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan tanah, perubahan iklim, sosial, ekonomi serta keanekaragaman hayati.

Ditemui usai mendapat penghargaan, Risma mengaku bahwa kemenangan ini adalah milik warga Surabaya yang ikut bekerja dalam perbaiki lingkungan. "Ya sebenarnya partisipasi masyarakat di Surabaya itu, kenapa sungainya bersih, kemudian lingkungan di kampung-kampung bersih, itu karena masyarakat juga ikut bekerja, menjaga, minimal mereka menjaga. Ya tapi relatif mereka juga bekerja," kata Risma.

Menurut Risma, kota Surabaya bersih karena banyaknya bank sampah yang dia buat. "Bank sampah mungkin terbanyak di Indonesia, dikelola oleh warga. Sekitar 250an seluruh kota Surabaya," kata dia.

Menurut Risma, kota Surabaya sudah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan dalam kategori metropolitan.

12. Penghargaan Satya Wira Karya

Penghargaan Satya Wira Karya diperoleh Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 14 Juni 2014.

Walikota Surabaya dinilai telah berhasil mendukung program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Penyematan tanda kehormatan dilakukan Wakil Presiden RI Boediono atas nama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 21 (14/6) di Lapangan Kodam V Brawijaya, Surabaya.

Wakil Presiden RI Boediono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para penerima penghargaan, diharapkan akan terus berkomitmen dalam kepeduliannya mengatasi persoalan kependudukan melalui program KB.

Jadi tanda kehormatan ini diberikan karena dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Setelah mereka berhasil menekan angka kelahiran, sehingga tercipta keluarga terprogram dan berdampak pada keluarga sejahtera. Karena hal itu sesuai dengan Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun 2014, yang mengambil tema 'Melalui Hari Keluarga Kita Tingkatkan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Indonesia Sejahtera,' serta mempunyai Motto 'Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Keluarga Masa Depan'.

13. Indonesia Green Awards

Indonesia Green Awards 2014 katagori Green City diperoleh Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 18 Juni 2014

Penghargaan ini diselenggarakan oleh The La TOFI of CSR dan didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

14. Penghargaan predikat Kepatuhan Undang-Undang Pelayanan Publik

Lembaga negara pengawas pelayanan publik (Ombudsman RI) memberikan predikat kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik pada tanggal 19 Juli 2014. Berdasar surat Ombudsman RI nomor 710/ORI-Srt/VII/2014 disebutkan, ada 14 SKPD di Kota Surabaya yang masuk dalam zona hijau, yakni, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Dinas PU Bina Marga, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), administrasi kependudukan pada Dispendukcapil, pelayanan rumah sakit RSUD dr Soewandhie, perizinan dinas kesehatan, dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK). Di samping itu, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT), PDAM Surya Sembada, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Dinas sosial, Bakesbanglinmas, dan Dinas Pendidikan.

Dimana SKPD-SKPD Pemkot Surabaya dinilai memiliki standar kepatuhan tinggi terhadap UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagaimana tertuang dalam pasal 15 dan bab V UU tersebut, bahwa sebuah unit layanan harus menyampaikan informasi, di antaranya mengenai kejelasan waktu, prosedur, persyaratan dan biaya layanan.

15. Penghargaan Mayor Recognition's Awards (MRA)

Penghargaan Mayor Recognition's Awards (MRA) dari The Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settlements (EAROPH). Penghargaan tersebut diserahkan di Hotel Borobudur, Jakarta pada Senin (11/8) bersamaan dengan pelaksanaan kongres internasional EAROPH ke-24.

EAROPH merupakan organisasi non-pemerintah yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Organisasi tersebut pertama kali berdiri pada 1956 di New Delhi, India dengan platform multilayer, di antaranya masalah ekonomi, urbanisasi, permukiman penduduk, dan lain sebagainya.

16. Penghargaan Soegeng Sarjadi

penghargaan Soegeng Sarjadi kategori pemerintahan daerah terbaik diperoleh Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2014.

17. Peringkat Pertama 100 Besar Kota Bisnis di Indonesia versi Majalah Swa
Pada tanggal 23 September 2014 Pemerintah Kota Surabaya mendapat Peringkat Pertama 100 Besar Kota Bisnis di Indonesia versi Majalah Swa tahun 2014.

sebagai kota pertama di Indonesia yang menduduki Peringkat Pertama 100 Besar Kota Bisnis di Indonesia versi majalah Swa tahun 2014. Sedangkan pada top 10 indeks kepuasan, Surabaya menduduki peringkat kelima di antara 412 Kabupaten dan 93 kota yang ada di Indonesia. Variabel yang menentukan indeks kepuasan adalah prasarana dan infrastruktur, perijinan dan kebijakan daerah, perpajakan/retribusi dan dukungan/pembinaan.

18. Penghargaan Kota Peduli Cagar Budaya

Pada tanggal 5 September 2014 Pemerintah Kota Surabaya meraih Penghargaan Kota Peduli Cagar Budaya 2014 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya memang sudah berkomitmen menjaga kelestarian cagar budaya, salah satu cara yang digunakan Pemkot, yakni dengan memberi bantuan, kompensasi, kemudahan perizinan serta insentif terhadap bangunan yang berstatus cagar budaya.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) 59 Tahun 2007 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya, pada pasal 18 disebutkan, bantuan dapat diberikan dalam bentuk pemeliharaan, perawatan atau konsultasi berkala. Sedangkan kompensasi diberikan dapat berupa keringanan pajak atau retribusi.

Tidak hanya itu, dalam Perwali tersebut juga diatur tentang mekanisme "reward" and "punishment". Bagi pemilik bangunan cagar budaya yang telah konsisten merawat dengan baik akan diberi piagam penghargaan dari Wali Kota Surabaya. Sebaliknya, sanksi sudah menanti bagi pemilik bangunan cagar budaya yang dengan seenaknya memugar, membongkar atau merobohkan di luar prosedur.

19. Penghargaan Untuk Sistem Surabaya Single Window (SSW) dari Future Government Asia-Pasifik, Kategori Future City



Penghargaan ini diperoleh Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 9 Oktober 2014

Penggunaan aplikasi khusus dalam sistem pemerintahan membuahkan penghargaan bagi Pemkot Surabaya. Mereka bakal menerima penghargaan untuk sistem Surabaya Single Window (SSW) dari Future Government Asia-Pasifik. Penghargaan yang akan diterima itu berkategori future city.

Ada enam menu utama yang tersaji pada laman tersebut. Mulai perizinan, bimbingan teknis, hingga verifikasi berkas.

Paket perizinan itu, antara lain, paket investasi yang terdiri atas surat keterangan rencana kota (SKRK), surat rekom, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin gangguan. Itu paket I. Ada juga paket II yang hanya terdiri atas SKRK, surat rekom, dan IMB. Tanpa izin gangguan atau HO.

Sistem paket tersebut sangat memudahkan pemohon izin dalam mengetahui alur perizinan yang dibutuhkan. Dokumen persyaratan untuk mengajukan izin secara otomatis juga di-*share* ke dinas-dinas pemberi izin. Misalnya, SKRK dari dinas cipta karya dan tata ruang, surat rekom analisis dampak lingkungan (amdal lalin) dari dinas perhubungan, dan HO (izin gangguan) dari badan lingkungan hidup.

sistem itu sangat efektif untuk memutus mata rantai birokrasi yang panjang. Sebab, urusan administrasi dikerjakan secara paralel di masing-masing bidang. Kondisi seperti itu berdampak langsung pada pengurusan izin yang lebih cepat. "Kalau dulu bisa sampai enam bulan, sekarang bisa kurang dari setengahnya,"

Lantaran bersifat *online*, tidak ada lagi petugas yang beralasan sedang ke luar kota sehingga tak bisa menggarap perizinan. Sebab, mereka bisa mengakses sistem itu lewat laptop atau *smartphone* yang dilengkapi akses internet. "Meskipun di luar negeri, mereka tetap bisa memproses.

Kemudahan tersebut membuat SSW menerima penghargaan dari Future Government Asia-Pasifik. Sebuah lembaga nirlaba yang memantau perkembangan tata pemerintahan di Asia-Pasifik. Aplikasi yang mulai difungsikan pada Mei 2013 itu berhasil mengalahkan empat terobosan lain dari Malaysia dan Singapura.

20. **Penghargaan Peduli Lingkungan**
Penghargaan Peduli Lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup yang diserahkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2014.
21. **Penghargaan Tokoh Publik**
Penghargaan tokoh publik bagi Walikota Surabaya dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) 2014 karena dinilai merupakan figur inovatif dan memiliki karakter otentik. Penghargaan ini diperoleh pada tanggal 17 Oktober 2014.
22. **Penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Budaya Literasi**
Penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Budaya Literasi bagi Walikota Surabaya dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) diterima pada tanggal 11 Nopember 2014.
23. **Penghargaan Social Media Award 13**
Penghargaan social media award 2014 untuk katagori walikota, yang diterima tanggal 13 November.
24. **Penghargaan Pertama Anugerah Media Humas**



Penghargaan Pertama Anugerah Media Humas katagori Media Internal Majalah Gapura. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemikominfo) pada tanggal 26 Nopember 2014

25. **Penghargaan Kedua Anugerah Media Humas**
Penghargaan Kedua Anugerah Media Humas katagori Website. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemikominfo) pada tanggal 26 Nopember 2014
26. **Penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika**
Penghargaan ksatria bakti husada katika diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani pada puncak Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 27 Nopember 2014

- 27. Penghargaan Bidang Kesehatan**
Penghargaan Bidang Kesehatan 2014 dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 27 Nopember 2014
- 28. Penghargaan Peningkatan Kulaitas Pelayanan Publik**
Penghargaan peningkatan kulaitas pelayanan publik di bidang kesehatan dari Gubernur Jawa Timur pada tanggal 25 Nopember 2014
- 29. Penghargaan Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)**
Penghargaan JPIP di bidang kesehatan dari Jawa Pos Group pada tanggal 26 Nopember 2014
- 30. Penghargaan Kota Inklusif**
Penghargaan kota Inklusif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 3 Desember 2014
- 31. Penghargaan Sindo**
Penghargaan Sindo diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri
- 32. Penghargaan Hukum dan HAM**
Penghargaan Hukum dan HAM dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 33. Penghargaan Pekerjaan Umum**
Penghargaan Pekerjaan Umum dari Kementerian Dalam Negeri
- 34. Penghargaan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional (HDI)**
Penghargaan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2014 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 3 Desember 2014
- 35. Penghargaan Parahita Eka Paraya**
Penghargaan Parahita Eka Paraya 2014 dari Menteri Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tanggal 18 Desember 2014
- 36. Pengharagaan Adiwiyata Nasional**
Pengharagaan Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 22 Desember 2014

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
KOTA SURABAYA



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI RISMAHARINI
Jabatan : WALIKOTA SURABAYA

Pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, Februari 2014

WALIKOTA



TRI RISMAHARINI

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
KOTA SURABAYA
TAHUN 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya kualitas hidup warga kota	1. Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri	75
	2. Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi	1578
	3. meningkatnya Prasarana olahraga yang dikembangkan	202
	4. meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan	43
2. Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani	100%
	2. Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga
3. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial	1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)
	2. Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	60% (791)
4. Peningkatan kualitas pendidikan	1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
	2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,30%
	3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,00%
	4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,20%
	5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,00%
	6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,00%
	7. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%
	8. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%
	9. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99,50%
	10. Angka Kelulusan (AL) SMA /MA	98,15%
	11. Angka Kelulusan (AL) SMK	99,11%
	12. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92,50%
	13. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105,00%
	14. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA	95,00%
	15. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0,00%
	16. Angka Putus Sekolah (APS)SMK	0,00%
	17. Persentase lulusan SMK yang ditonjara di dunia kerja/wirausaha	85,00%
	18. Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi	96,08%
	19. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	97%
	20. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	97%
	21. Angka Melek Huruf (AMH)	100%
	22. Jumlah Kunjungan Perpustakaan	1.936.800 orang
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Cakupan portolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan	98%
	2. Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG	90%
	3. Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1	90%
	4. Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3	90%
	5. Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4	90%
	6. Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak	90%
	7. Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%
	8. Cakupan kunjungan ibu hamil K4	98%
	9. Cakupan kunjungan bayi	90%
	10. Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi	Kelas B
	11. Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dhama Husada	Kelas B
	12. Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap	19
	13. jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk	8
	14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%
	15. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100%
	16. Persentase peserta KB aktif	80,26%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik	1. Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjut	6
	2. Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna	91%
	3. % keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	86%
	4. Jumlah publik hearing yang dilaksanakan	5
	5. Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur	203
	6. Persentase Penegusan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%
	7. Persentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja	94,44%
	8. Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan	100%
	9. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	96,71%
	10. Persentase penataan jabatan struktural	90,64%
	11. Persentase pemrosesan produk inti (<i>core Business</i>) yang memiliki prosedur tetap	44%
	12. Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%
	13. Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjut	100%
	14. Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku)	83%
	15. Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website www.surabaya.go.id	62.689 kunjungan
	16. Persentase penduduk yang berkTP	93%
	17. Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,0%
	18. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%
7. Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi	1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi	90%
	2. Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)	18,52% = 20 sistem
	3. Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK	7%
8. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah	1. Persentase Peningkatan PAD	11,17%
	2. Persentase Peningkatan penerimaan daerah lainnya	9,99%
	3. Persentase Laporan yang selesai tepat waktu	80%
9. Peningkatan kekayaan daerah	1. Jumlah aset pemkot yang tersertifikat	647
10. Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1. % Penempatan pencari kerja pada pasar kerja	5%
	2. Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha	75%
11. Meningkatkan daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas	1. Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing	59 Kelompok
	2. Peningkatan jumlah koperasi berkualitas	172 unit
	3. Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil dirivitalisasi	100 unit
	4. Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk	30 unit
	5. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	190.872 wisatawan
	6. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	8.296.157 wisatawan
	7. Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	87%
	8. Peningkatan jumlah sentra baru PKL	5 sentra
	9. Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha	36 sentra
12. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu	1. % Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%
13. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan	1. Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang
	2. Pola Pangan harapan	92,92
	3. Terbentuknya sentra produk pertanian	30 sentra
	4. Jumlah kelurahan pada kawasan pesisir yang diberdayakan	17 kelurahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
14. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota	1. Lama jam sibuk	6 jam 37 menit
	2. Luas wilayah genangan	2111 ha
	3. rata-rata Lama terjadinya genangan	80 menit
	4. rata-rata Tinggi genangan yang terjadi	20 cm
	5. % Cakupan Layanan Air Bersih	88,08%
	6. % kebocoran air bersih	31,95%
	7. Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)	3361
	8. Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)	508
	9. Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan	0,47
	10. Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk	101
	11. Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit	82%
	12. Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	91%
	13. Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan	83,36%
	14. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer	23,73
	15. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder	21,47
	16. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet	14,72
	17. Headway angkutan umum (menit) untuk biskota	20
	18. Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	47,37%
15. Meningkatnya kualitas lingkungan	1. Cakupan layanan Kebersihan	173/175
	2. Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87
	3. Rata - rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23
	4. Kualitas air limbah industri BOD	72%
	5. Kualitas air limbah industri COD	66%
	6. Kualitas air limbah industri TSS	66%
	7. Kualitas air limbah domestik	
	8. Kualitas air limbah domestik BOD	48%
	9. Kualitas air limbah domestik TSS	48%
	10. Kualitas air limbah RS BOD	63%
	11. Kualitas air limbah RS COD	62%
	12. Kualitas air limbah RS TSS	60%
	13. Kualitas air limbah hotel BOD	48%
	14. Kualitas air limbah hotel COD	36%
	15. Kualitas air limbah hotel TSS	42%
	16. Kualitas udara emisi di kawasan industri SO2	80%
	17. Kualitas udara emisi di kawasan industri NO2	70%
16. Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota	1. Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang	81,12%
17. Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya	1. Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya	200 Kelompok seni
	2. Terbentuknya destinasi wisata	19 lokasi

Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 4.427.803.009.362

Surabaya, Februari 2014
WALIKOTA



TRI RISMAHARINI



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/236/436.1.2/2014**

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surabaya dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/181/436.1.2/2013;
 - b. bahwa guna meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya, maka Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/181/436.1.2/2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja;
 - b. memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan untuk :
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/181/436.1.2/2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 April 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SEKRETARIAT DAERAH
MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.
Pemohon
NIP. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/236/436.1.2/2014
TANGGAL : 28 April 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

1. Nama Organisasi : Pemerintah Kota Surabaya
2. Visi : Menuju Surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan lingkungan.
3. Misi :
 - a. Membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, ketrampilan serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.
 - b. Menghadirkan suasana kota yang manusiawi melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga.
 - c. Mewujudkan peri kehidupan warga yang bermartabat melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga kota surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional.
 - d. Menjadikan Kota Surabaya semakin layak huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang berwawasan lingkungan.
4. Tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
 - c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
 - e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
 - f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Fungsi :
 - a. Membuat regulasi.
 - b. Penyelenggara pemerintahan.
 - c. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
 - d. Mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
Meningkatkan kualitas hidup warga kota dengan cara memfasilitasi serta mendorong pengembangan daya saing secara menyeluruh dan berkesinambungan;	Meningkatnya kualitas hidup warga kota	Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi	<i>Jumlah pemuda/kelompok pemuda yang mampu mengembangkan usaha mandiri</i> <i>Jumlah atlit/organisasi olahraga yang berprestasi</i>
Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang dilandasi asas kesetaraan, khususnya dengan memberikan kesempatan yang setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya;	Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	$\frac{\text{jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani}}{\text{jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan}} \times 100\%$ $(\text{jumlah lembaga berbasis gender dan anak yang peduli terhadap perempuan dan anak yang dibina tahun } t) - (\text{jumlah lembaga berbasis gender dan anak yang peduli terhadap perempuan dan anak yang dibina tahun } t - 1)$
	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PMKS tahun dasar}} \times 100\%$

3

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
		Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	$\frac{\text{jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS}}{\text{jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun dasar}} \times 100\%$
		Angka Partisipasi Murni : - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	$\frac{\text{jumlah siswa usia 7 - 12 tahun di jenjang SD/MI}}{\text{jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah siswa usia 13 - 15 tahun di jenjang SMP/MTS}}{\text{jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah siswa usia 16 - 18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK}}{\text{jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun}} \times 100\%$
Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai tolok ukur kinerja utama dalam menuju kehidupan kota yang lebih mandiri dan berbudaya;	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Angka Kelulusan (AL) : - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK	$\frac{\text{jumlah siswa SD/MI yang lulus}}{\text{jumlah keseluruhan siswa SD/MI kelas 6}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah siswa SMP/MTs yang lulus}}{\text{jumlah keseluruhan siswa SMP/MTs kelas 3}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah siswa SMA/MA yang lulus}}{\text{jumlah keseluruhan siswa SMA/MA kelas 3}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah siswa SMK yang lulus}}{\text{jumlah keseluruhan siswa SMK kelas 3}} \times 100\%$

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
		Angka Melek Huruf (AMH)	$\frac{\text{jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis}}{\text{jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100\%$
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinkes) yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan}}{\text{jumlah seluruh sasaran persalinan}} \times 100\%$
Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani dan rohani segenap warga kota dengan mengimplementasikan gagasan pengembangan kota yang sehat, bersih, dan hijau.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Balita gizi buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{jumlah balita gizi buruk yang dirawat}}{\text{disarana pelayanan kesehatan sesuai standart}} \times 100\%$
		Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi	Klasifikasi Rumah Sakit (t)
		Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	Klasifikasi Rumah Sakit(t)
		Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap	$\text{jumlah Puskesmas Induk yang meningkat menjadi Puskesmas Rawat Inap}(t) + (t - 1)$

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
Menegaskan komitmen bahwa untuk menghadirkan suasana kota yang lebih manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima sesuai norma-norma kemanusiaan yang berlaku secara universal;	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Yang Ditandai Dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik	jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas Pembantu yang meningkat menjadi Puskesmas Induk } (t) + (t - 1)}{\text{Jumlah Puskesmas Pembantu yang meningkat menjadi Puskesmas Induk } (t - 1)} \times 100\%$
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah keluarga miskin dan masyarakat rentan yang memiliki JPMM atau tercatat di BPS atau Surat Keterangan Miskin (SKM) disatu wilayah kerja}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat miskin dan rentan di satu wilayah kerja}} \times 100\%$
		Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	$\frac{\text{Jumlah kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani < 24 jam}}{\text{Jumlah kelurahan yang mengalami KLB}} \times 100\%$
		Persentase peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
		Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur } (\text{t})}{\text{Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur } (\text{t} - 1)} \times 100\%$
		Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah rancangan produk hukum yang terselesaikan}}{\text{Jumlah rancangan produk hukum}} \times 100\%$

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi	Peningkatan Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi	Persentase pemrosesan produk inti (<i>core Business</i>) yang memiliki prosedur tetap	$\frac{\text{jumlah produk inti yang diproses}}{\text{jumlah produk inti}} \times 100\%$
		Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti	$\frac{\text{jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah keluhan masyarakat}} \times 100\%$
		% penduduk yang berKTP	$\frac{\text{jumlah penduduk yang ber - KTP}}{\text{jumlah penduduk yang wajib ber - KTP}} \times 100\%$
		Cakupan penerbitan akte kelahiran	$\frac{\text{jumlah penduduk lahir yang memperoleh akte kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{total kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	$\frac{\text{jumlah pelanggaran (K3) yang ditangani}}{\text{jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$
			$\text{Rata - rata tertimbang Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Penunjang Investasi} \times 25\%$

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi global;		Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)	$\frac{\text{jumlah layanan publik berbasis TIK}}{\text{Total layanan publik}} \times 100\%$
		Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK	$\frac{\text{jumlah pengguna layanan publik berbasis TIK melalui WEB}}{\text{Total pengguna layanan publik berbasis TIK}} \times 100\%$
Memastikan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, berkeadilan, dan bertanggungjawab dengan menempatkan kepentingan warga kota sebagai tujuan utama;	Mewujudkan Kemungkinan Keuangan Daerah	% Peningkatan PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD (t)} - (t - 1)}{\text{Realisasi PAD (t - 1)}} \times 100\%$
		% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Daerah Lainnya (t)} - (t - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah Lainnya (t - 1)}} \times 100\%$

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
<p>Menempatkan optimalisasi pemanfaatan aset atau kekayaan daerah sebagai tulang punggung upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara membangun loyalitas warga kota untuk berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah.</p>	<p>Peningkatan Kekayaan Daerah</p>	<p>Jumlah aset pemkot yang tersertifikat</p>	$\frac{\text{jumlah aset yang disertifikasi (t) + jumlah aset yang disertifikasi (t-1)}}{\text{total aset}} \times 100\%$
<p>Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan kemandirian dan kreatifitas individu warga kota yang diwadahi dalam kelembagaan berbasis komunitas;</p>	<p>Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja</p>	<p>% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja</p> <p>Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha</p>	$\frac{\text{jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan (t)}}{\text{jumlah pencari kerja (t-1)}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah sengketa pekerja dengan pengusaha yang berhasil ditangani}}{\text{jumlah sengketa yang dilaporkan}} \times 100\%$

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
<p>Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi kota guna mempercepat pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui implementasi strategi investasi serta dukungan sumber daya kelembagaan pemerintah kota;</p>	<p>Meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas</p>	<p>Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing</p> <p>Peningkatan jumlah koperasi berkualitas</p> <p>Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk</p> <p>Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara</p> <p>Jumlah kunjungan wisatawan nusantara</p> <p>Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha</p>	<p><i>jumlah kelompok usaha mikro kecil berdaya saing yang terbentuk (t - 1) + jumlah kelompok usaha menengah berdaya saing yang terbentuk (t - 1)</i></p> <p><i>jumlah koperasi berkualitas penilaian lembaga independen.(t)</i></p> <p><i>jumlah koperasi kelompok usaha mikro kecil berdaya saing yang terbentuk (t) + jumlah koperasi yang terbentuk dari usulan masyarakat (t)</i></p> <p><i>jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (t)</i></p> <p><i>jumlah kunjungan wisatawan nusantara (t)</i></p> <p><i>jumlah sentra PKL yang berdaya saing (t)</i></p>

10

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan strategi pengembangan ekonomi warga kota;	Terwujudnya perencanaan yang pembangunan yang terpadu	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	$\frac{\text{jumlah dokumen perencanaan yang tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen perencanaan}} \times 100\%$
Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.	Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	$\text{jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif yang terfasilitasi melalui mitra usaha}$
		Pola Pangan harapan	$\sum \left(\frac{\text{energi kelompok pangan (i)}}{\text{angka kecukupan gizi}} \times 100\% \right) \times \text{bobot kelompok pangan (i)}$
	Terbentuknya sentra produk pertanian		$\frac{\text{jumlah sentra produk pertanian tahun ke (t-1)} + \text{jumlah sentra produk pertanian yang dibentuk tahun ke (t)}}{2}$

II

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
Mempertegas komitmen dalam memfasilitasi dinamika aktifitas warga kota, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai serta kualitas yang setara dengan standar metropolis kontemporer;	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota	Lama jam sibuk	$\left(\frac{\text{Rentang jam puncak rata - rata (menit)} = \sum(\text{rentang jam puncak per ruas jalan diperoleh dari analisa hasil survey} \times \text{panjang jalan (km)})}{\sum \text{panjang jalan (km)}} \right)$
		Luas wilayah genangan	angka luas genangan didapat dari survei wawancara kepada masyarakat dan saat terjadi banjir
		Rata-rata Lama terjadinya genangan	Lama genangan didapat dari survei wawancara pada masyarakat dan survei pada saat terjadi banjir
		Rata-rata Tinggi genangan yang terjadi	Tinggi genangan didapat dari survei wawancara pada masyarakat dan survei saat terjadi banjir
		% Cakupan Layanan Air Bersih	$\frac{\text{jumlah penduduk terlayani}}{\text{jumlah penduduk yang harus dilayani}} \times 100\%$
		Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)	jumlah MBR yang menghuni permukiman layak

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
		Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)	<i>luas kawasan tidak layak huni yang mendapatkan layanan prasarana permukiman tahun ke (t) + (t-1)</i>
		Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan	$\frac{\text{kebutuhan makam sampai 5 tahun kedepan}}{\text{ketersediaan makam}}$
Mempertegas komitmen dalam memfasilitasi dinamika aktifitas warga kota, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai serta kualitas yang setara dengan standar metropolis kontemporer;	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota	Pencapaian waktu tanggap kurang < 15 menit	$\frac{\text{jumlah kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit}}{\text{jumlah kebakaran}} \times 100\%$
		Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	$\frac{\text{Luas wilayah pelayanan WMK}}{\text{luas wilayah kota Surabaya}} \times 100\%$
		Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan	$\frac{\text{panjang jalan yang sudah terpasang PJU}}{\text{panjang jalan seluruh kota Surabaya}}$

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
		Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer	$\frac{\text{panjang ruas jalan (km)}}{\text{waktu (jam)}}$
		Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder	$\frac{\sum \text{kecepatan rata-rata per ruas jalan (km/jam)} \times \text{panjang ruas jalan (km)}}{\sum \text{panjang ruas jalan (km)}}$
		Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet	$\frac{\sum \text{Headway rata-rata tiap trayek (menit)}}{\text{jumlah trayek}}$
		Headway angkutan umum (menit) untuk biskota	
		Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	$\frac{\text{luas RTH yang berfungsi optimal tahun } (t) + (t-1)}{\text{total luas RTH}} \times 100\%$

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
Menjaga, menata, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup kota demi terciptanya kota hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata dalam mencerdaskan kehidupan warga kota;	Meningkatnya kualitas lingkungan	Cakupan layanan Kebersihan	$\frac{\text{Jumlah/Volume TPS existing}}{\text{Jumlah/Volume kebutuhan TPS}}$
		Kualitas air limbah industri dengan menurunkan beban pencemaran : - BOD; - COD; dan - TSS	$\frac{\text{persentase penurunan beban } (t-1) + (\text{beban pencemaran } (t-1) - \text{beban pencemaran } (t))}{\text{beban pencemaran } (t-1)} \times 100\%$
		Kualitas air limbah domestik dengan menurunkan beban pencemaran : - BOD; dan - TSS	$\frac{\text{persentase penurunan beban } (t-1) + (\text{beban pencemaran } (t-1) - \text{beban pencemaran } (t))}{\text{beban pencemaran } (t-1)} \times 100\%$

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
		Kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban pencemaran : - BOD; dan - COD; dan - TSS	$\frac{\text{persentase penurunan beban } (t-1) + (\text{beban pencemaran } (t-1) - \text{beban pencemaran } (t))}{\text{beban pencemaran } (t-1)} \times 100\%$
		Kualitas air limbah hotel dengan menurunkan beban pencemaran : - BOD; dan - COD; dan - TSS	$\frac{\text{persentase penurunan beban } (t-1) + (\text{beban pencemaran } (t-1) - \text{beban pencemaran } (t))}{\text{beban pencemaran } (t-1)} \times 100\%$
		Kualitas udara emisi di kawasan industri dengan menurunkan beban pencemaran : - SO ₂ ; dan - NO ₂	$\frac{\text{persentase penurunan parameter } (t-1) + (\text{parameter } (t-1) - \text{parameter } (t))}{\text{parameter } (t-1)} \times 100\%$

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
<p>Memastikan diprioritaskannya pembangunan infrastruktur fisik dan sosial sesuai strategi pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dengan titik berat pada perekonomian berbasis kreatifitas dan kebersamaan antar warga kota.</p>	<p>Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota</p>	<p>Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang</p>	$\frac{\text{luas wilayah RDTRK yang tersusun} + \text{Luas tahun ke } (t-1)}{\text{luas wilayah kota Surabaya}} \times 100\%$
<p>Menempatkan aspek pelestarian dan revitalisasi budaya warga kota sebagai salah satu landasan terpenting dalam penyediaan infrastruktur fisik dan sosial, demi menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya</p>	<p>Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya</p>	<p>Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam event/festival seni budaya</p>	<p>jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam event/festival seni budaya tahun $(t-1)$</p> <p>+</p> <p>jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam event/festival seni budaya tahun $(t-1)$</p>
		<p>Terbentuknya destinasi wisata</p>	<p>jumlah destinasi wisata yang terbentuk tahun (t)</p> <p>+ jumlah destinasi wisata yang terbentuk tahun $(t-1)$</p>

Surabaya, dengan aslinya

KEPALA BANGUNAN MUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

MT. EKAWATI, SURABAYA, SH., MH.

SURABAYA

NIP. 49230504 199602 2 001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

